

711
HAM
P e

**PERKEMBANGAN
PUSAT SUB WILAYAH PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN CILACAP**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota**

Oleh:

**BUDI HANDAYANI
L4D003078**

8 Bkp
19/05/05



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

**PERKEMBANGAN
PUSAT SUB WILAYAH PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN CILACAP**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

BUDI HANDAYANI
L4D003078

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 5 April 2005

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, April 2005

Pembimbing Pendamping



Ir. JAWOTO SIH SETYONO, MDP

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Ir. SUGIONO SOETOMO, DEA

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro




SUGIONO SOETOMO, DEA

UPT-PUSTAK-UNDIP	
Nn. Daft:	3165/T/MT/2005
Tgl.	13 April 2005

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, April 2005

BUDI HANDAYANI
L4D003078

"Kepuasan dan Kebahagiaan
hanya bisa kita rasakan
apabila kita tahu caranya nikmat syukur
atas apa yang kita lakukan dan kita dapatkan
dan itu semua merupakan
jawaban atas doa dan usaha kita"

Tesis ini kupersembahkan buat:

- Cilacap, Jala Bhumi Wijaya Kusuma Cakti...
semoga ini dapat menambah kemampuan
membudidayakan bumi dan lautan untuk
kemakmuran
- Bapak MI Budiharjo & Mamah Nonok Supriyatin
tercinta, pengukir diriku.
- Mas Tamar suami tercinta, Adam anakku sayang,
Sigit dan Intan adik adikku tercinta

ABSTRAK

Kabupaten Cilacap terdiri dari 24 kecamatan, Berdasarkan Tinjauan Arahan Pengembangan Rencana Struktur Tata Ruang Kota dalam RTRW Kabupaten Cilacap 1990/1991 - 2000/2001 (Perda No. 14 tahun 1994), guna mencapai pertumbuhan yang lebih baik dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) Sub Wilayah Pembangunan (SWP), memiliki tingkat pertumbuhan yang tidak merata. Hal ini selain disebabkan oleh kondisi fisik, sosial dan ekonomi yang berbeda, pembangunan yang dilakukan saat ini banyak dipusatkan dipusat kota kabupaten, menyebabkan tidak seimbangny perkembangan pusat kota dengan perkembangan wilayah pinggiran kota (pusat kota menjadi sangat dominan terhadap wilayah pinggirannya). Dan kegiatan yang ada tidak berpengaruh besar terhadap daerah hinterlandnya. Berdasarkan masalah tersebut dirumuskan problem statement : perkembangan pusat sub wilayah pembangunan tidak berpengaruh terhadap perkembangan wilayah. Dan research question yang dapat dikaji dalam studi ini adalah : Bagaimana perkembangan pusat sub wilayah pembangunan dan sub wilayah pembangunan dalam perkembangan wilayah Kabupaten Cilacap.

Studi ini bertujuan menggali faktor faktor baik secara internal maupun eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pusat sub wilayah pembangunan sehingga kurang berperan dalam perkembangan wilayah untuk dirumuskan sebagai arahan pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kabupaten Cilacap. Metode Penelitian yang digunakan dalam studi ini dilakukan secara bertahap, yaitu :1. Analisis Pertumbuhan dan Perkembangan Pusat Sub Wilayah Pembangunan; 2. Analisis Keunggulan Atau Perkembangan Ekonomi Daerah Belakang; 3. Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan dan 4. Analisis Peran Pusat Pusat Wilayah Pembangunan di Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan temuan studi dapat disimpulkan bahwa selain kondisi geografis dari masing masing sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap yang beragam, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan saat ini banyak dipusatkan di pusat kota. Sehingga kebijakan pusat sub wilayah pembangunan dan sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap perlu ditinjau ulang, karena pelaksanaannya tidak efektif. Padahal pusat sub wilayah pembangunan merupakan salah satu konsep dalam perencanaan wilayah, yang digunakan untuk menyebarkan kemakmuran dari pusat wilayah ke pinggirannya sehingga wilayah di sekitarnya terpacu untuk berkembang dan mengurangi beban pelayanan yang diemban pusat kota. Dan kebijakan ini akan efektif apabila selain didukung oleh prasarana kota terutama yang menghubungkan pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya dan adanya konsentrasi atau aglomerasi aktivitas ekonomi di kota pusat pertumbuhan industri yang memiliki kaitan ke depan dan belakangnya (forward dan backward linkage), juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang efektif. Intervensi kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung perkembangan kawasan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasarannya, yang ditentukan oleh beberapa faktor yang berkenaan dengan proses perumusan dan implementasinya (Mayer dan Greenwood, 1984).

Secara implementatif, upaya pengembangan pusat sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap seharusnya tidak hanya melihat dari fisik semata tetapi juga memandang eksistensi kehidupan sosial ekonomi yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Karena pengembangan wilayah tidak hanya dengan local economic development tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi fisik, sosial dan budaya setempat.

Kata Kunci : Perkembangan wilayah, Peran pusat SWP

ABSTRACT

Cilacap Regency consists of 24 sub district, based on regional decree number 14 at the year of 1994 about Tinjauan Arahian Pengembangan Rencana Struktur Tata Ruang Kota in RTRW of Cilacap Regency at the years of 1990/1991 – 2000/2001, to achieve a better growth is grouped into 7 Sub Region Development (SWP), which have uneven distribution growth level. Beside caused by the difference of physical, social and economic condition, this is also due to the development that recently carried out is centered in the centre of regency, which lead to the imbalance between the development of city centre and the development of suburban area (city centre becomes dominant to its urban area). The existing activity do not affects its hinterland area. Based on this case, the writer formulates a problem statement : the improvement of developmental sub region centre does not affect to the regional development. The research question, which can be discussed in this study is : "How are the improvement of developmental sub region centre and developmental sub region in the improvement of Cilacap Regency".

The study has purpose to internally and externally explore the factors which affect the growth and the improvement of development sub region centre, so that it has a small role in the area development that will be formulated as the directive of growth and development of Cilacap Regency. The research method used in this study was performed periodically, namely : 1. The Analysis of Growth and Improvement of Developmental Sub Region Centre; 2. The Analysis Superiority or Economical Developmental of Retarted Area; 3. The Analysis of Factors which affect the Growth and Development, and; 4. The Analysis of Role of Developmental Sub Region Centre in Cilacap Regency.

Based on the study result, it can be concluded that beside the geographical condition from each developmental sub region in Cilacap Regency which varies, the implementation of development that is being performed recently in centered in the city centre. So that, the policy of developmental sub region centre and developmental sub region in Cilacap Regency should be reviewed since its implementation is not effective. Whereas in fact the developmental sub region centre is one concept in regional planning that is used to distribute the prosperity from the regional centre to its hinterland, so that its surrounding area will be triggered to develop and decrease the service performed by the city centre. And this policy will be effective if it is not only supported by city infrastucture particularly that connects the growth pole and its hinterland, but so concentration or agglomeration of economical activity in the city of industrial growth, which have forward and backward linkage that is supported by the an effective governmental policy. The intervention of governmental policy in supporting the regional development is required to achieve its goal and target determined by some factors related to the formulation process and its implementation (Mayer and Greenword, 1984).

Implementavely, the improvement effort of developmental sub region centre in Cilacap Regency should not only look at the existence of economic social life, which develops in the society. Cause, the regional development is not only with local economic deveoplment, but also with consideration of the related phisycal, social and culture condition.

Key words : The improvement of region, The affect of developmental sub region centre

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas perkenan-Nya penyusunan Tesis dengan judul "*Perkembangan Pusat Sub Wilayah Pembangunan di Kabupaten Cilacap*" yang merupakan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang ini dapat diselesaikan. Judul Tesis tersebut diambil berdasarkan gagasan yang penulis ajukan setelah mengamati fenomena/kondisi pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kabupaten Cilacap yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tidak merata, berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan pusat sub wilayah pembangunan ini dapat diselesaikan.

Kelancaran penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dosen dan bantuan dari berbagai pihak terkait, untuk itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pemerintah Kabupaten Cilacap, yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan tugas belajar dan mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana Magister Teknik Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang .
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA, selaku Ketua Program Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro dan Pembimbing Utama yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan bimbingan di sela-sela kesibukan beliau yang cukup padat.
3. Bapak Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP, selaku Pembimbing Pendamping yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan bimbingan di sela-sela kesibukan beliau yang cukup padat.
4. Bapak Ir. Hadi Wahyono, MA, selaku Pembahas yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berguna bagi penyempurnaan penulisan tesis ini.
5. Ibu Wiwandari Handayani, ST., MT, selaku Penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berguna bagi penyempurnaan penulisan tesis ini.
6. Rekan-rekan Mahasiswa MPPWK III, atas kritikan dan masukannya dalam penyusunan pratesis ini.
7. Staf Program Pascasarjana MPPWK Undip, atas bantuan administratifnya.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan tugas ini hingga selesai.

Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan pada tesis ini, saran dan masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan untuk kesempurnaannya. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro khususnya dan masyarakat Kabupaten Cilacap umumnya.

Semarang, April 2005
Penyusun,

Budi Handayani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Sasaran Studi	8
1.3.1 Tujuan Studi.....	8
1.3.2 Sasaran Studi.....	9
1.4 Manfaat Studi.....	9
1.5 Ruang Lingkup Studi.....	10
1.5.1 Ruang Lingkup Materi.....	10
1.5.2 Ruang Lingkup Spasial.....	11
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Metode Penelitian	12
1.6.2 Kerangka Analisis.....	13
1.6.3 Teknik Analisis.....	15
1.6.3.1 Analisis Pertumbuhan dan Perkembangan Pusat wilayah Pembangunan	15
1.6.3.2 Analisis Keunggulan Ekonomi Daerah Belakang	16
1.6.3.3 Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan.....	18
1.6.3.4 Analisis Peran Pusat Wilayah Pembangunan dalam Kabupaten Cilacap.....	20
1.6.4 Data yang Digunakan	20
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	21
1.6 Kerangka Pemikiran	22
1.7 Sistematika Penulisan	25
BAB II PERKEMBANGAN PUSAT PUSAT WILAYAH PEMBANGUNAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN WILAYAH	
2.1. Tinjauan Perkembangan Pusat Wilayah Pembangunan.....	27
2.2. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	27
2.2.1. Teori Pembangunan dan Pengembangan Wilayah	28
2.2.2. Perencanaan dalam Pengembangan Wilayah	29
2.3. Konsep Pengembangan Wilayah	29
2.3.1. Tinjauan Empirik Pengembangan Wilayah Pembangunan ...	31

2.3.2. Perkembangan Wilayah.....	32
2.4. Pengembangan Wilayah di Indonesia.....	34
2.4.1. Permasalahan Perkembangan Wilayah.....	35
2.4.2. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Wilayah	37
2.4.2.1 Faktor Pendorong Perkembangan.....	39
2.4.2.2 Faktor Penghambat Perkembangan	40
2.4.3 Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan.....	41
2.4.4 Faktor Faktor Penilai Perkembangan Pusat Pertumbuhan.....	43
2.5 Ringkasan Teori.....	45
2.5.2 Variabel yang digunakan	48

BAB III KAJIAN PUSAT PUSAT SUB WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CILACAP

3.1. Tinjauan Regional Kabupaten Cilacap.....	52
3.2. Kondisi Geografis Kabupaten Cilacap	56
3.3. Kondisi Kependudukan Kabupaten Cilacap.....	59
3.3.1. Kepadatan dan Distribusi Penduduk.....	59
3.3.2. Penduduk Menurut Bekerja	61
3.3.3. Penduduk Menurut Kesejahteraan.....	62
3.4. Kondisi Fasilitas Sosial Ekonomi Kabupaten Cilacap	63
3.4.1. Fasilitas Pendidikan	63
3.4.2. Fasilitas Kesehatan	65
3.4.3. Fasilitas Perekonomian.....	65
3.4.4. Fasilitas Transportasi	65
3.5. Kondisi Perekonomian Kabupaten Cilacap.....	68
3.5.1. PDRB Kabupaten Cilacap	69
3.6. Gambaran Pusat Pusat Pertumbuhan Di Kabupaten Cilacap.....	69
3.6.1. Kota Cilacap (SWP Ia)	71
3.6.2. Kecamatan Kroya (SWP III).....	72
3.6.3. Kecamatan Majenang (SWP IVb)	72
3.6.4. Kecamatan Sidareja (SWP IIa).....	73
3.6.5. Kecamatan Sampang (SWP Ib)	73
3.6.6. Kecamatan Kawunganten (SWP Iib).....	73
3.6.7. Kecamatan Karangpucung (SWP IVb).....	74
3.6.8. Kecamatan Kecamatan Prioritas Dalam Kabupaten Cilacap.	74
3.6.8.1. Kecamatan Dayeuhluhur (masuk dalam SWP IVa)	74
3.6.8.2. Kecamatan Nusawungu (masuk dalam SWP III) ...	76
3.6.8.3. Kecamatan Patimuan (masuk dalam SWP IIa).....	76
3.7. Kesimpulan.....	77

BAB IV ANALISIS PERKEMBANGAN PUSAT SUB WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CILACAP

4.1. Analisis Pertumbuhan dan Perkembangan Pusat Sub Wilayah Pembangunan.....	82
4.2 Analisis Sektor Unggulan (Perkembangan perekonomian daerah belakang).....	88
4.2.1 Sektor Basis	89
4.2.2 Sektor yang Mengalami Peningkatan Daya saing	90

4.2.3 Sektor Basis dan Sektor yang Mengalami Peningkatan Daya Saing	92
4.3 Keterkaitan Pertumbuhan Dan Perkembangan Pusat SWP dan Perkembangan Ekonomi Daerah Belakang	103
4.4 Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Wilayah	108
4.4.1 Analisis Kondisi Fisik	108
4.4.2 Analisis Kondisi Ekonomi	113
4.4.3 Analisis Kondisi Sosial	116
4.4.4 Analisis Kondisi Eksternal	119
4.4 Analisis Peran Pusat Sub Wilayah Pembangunan	121
 BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1 Kesimpulan.....	129
5.2 Rekomendasi	134
 DAFTAR PUSTAKA.....	137
LAMPIRAN	141

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Representasi Nilai KPP dan KPK.....	17
Tabel I.2 : Distribusi Frekuensi	19
Tabel I.3 : Data yang Digunakan.....	21
Tabel II.1 : Faktor faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Wilayah	51
Tabel III.1 : Penggunaan Lahan Di Kabupaten Cilacap	58
Tabel III.2 : Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Cilacap tahun 1998 – 2002	59
Tabel III.3 : Penyebaran dan Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Cilacap	61
Tabel III.4 : Rekapitulasi Identifikasi Penduduk Miskin Di Kabupaten Cilacap Tahun 1999.....	62
Tabel IV.1 : Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pusat SWP dan Kota Kota Kecamatan Lainnya di Kabupaten Cilacap.....	85
Tabel IV.2 : Pertumbuhan Penduduk Pusat SWP dan Kota Kota Kecamatan Lainnya di Kabupaten Cilacap.....	86
Tabel IV.3 : Sektor Basis pada Sub Wilayah Pembangunan di Kabupaten Cilacap	89
Tabel IV.4 : Sektor yang Mengalami Peningkatan Daya Saing pada Sub Wilayah Pembangunan di Kabupaten Cilacap.....	90
Tabel IV.5 : Sektor Basis dan sektor yang Mengalami Peningkatan Daya Saing pada Sub Wilayah Pembangunan di Kabupaten Cilacap.....	92
Tabel IV.6 : Keterkaitan Perkembangan Pusat Sub Wilayah dengan Perkembangan Ekonomi Daerah Belakang	104
Tabel IV.7 : Pola Pengembangan pada Sub Wilayah Pembangunan di Kabupaten Cilacap.....	106
Tabel IV.8 : Tingkat Pertumbuhan Tiap Sektor Tahun 1999 – 2003.....	122
Tabel IV.9 : Identifikasi Peran Pusat SWP dan Kota Kota Kecamatan Lainnya di Kabupaten Cilacap.....	126
Tabel V.1 : Identifikasi Peran Pusat SWP dan Kota Kota Kecamatan Lainnya di Kabupaten Cilacap.....	131

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.1 : Peta Hierarki Kota Kota di Kabupaten Cilacap	6
Gambar I.2 : Alur Proses Analisis Data	14
Gambar I.3 : Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar III.1 : Peta Kawasan Strategis Kabupaten Cilacap.....	53
Gambar III.2 : Pusat Pusat Wilayah Pembangunan Di Kabupaten Cilacap.....	57
Gambar III.3 : Peta Sebaran Penduduk di Kabupaten Cilacap	64
Gambar III.4 : Peta Jaringan Transportasi di Kabupaten Cilacap.....	67
Gambar III.5 : PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2002	69
Gambar III.6 : Peta Kontribusi PDRB Per Kecamatan di Kabupaten Cilacap.....	70
Gambar III.7 : Peta Kecamatan Prioritas di Kabupaten Cilacap.....	75
Gambar III.8 : Arah Perkembangan Wilayah	80
Gambar IV.1 : Analisis Perkembangan Pusat Sub Wilayah Pembangunan.....	87
Gambar IV.2 : Sektor Unggulan Sub Wilayah Pembangunan	91
Gambar IV.3 : Tingkat Spesialisasi dan Keunggulan Sektor Pertanian.....	93
Gambar IV.4 : Tingkat Spesialisasi dan Keunggulan Sektor Pertanian.....	94
Gambar IV.5 : Tingkat Spesialisasi dan Keunggulan Sektor Pertambangan dan Penggalian	95
Gambar IV.6 : Tingkat Spesialisasi dan Keunggulan Sektor Industri Pengolahan..	96
Gambar IV.7 : Tingkat Spesialisasi dan Keunggulan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	97
Gambar IV.8 : Tingkat Spesialisasi dan Keunggulan Sektor Bangunan.....	98
Gambar IV.9 : Tingkat Spesialisasi dan Keunggulan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restaurant	99
Gambar IV.10: Tingkat Spesialisasi dan Keunggulan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	100
Gambar IV.11: Tingkat Spesialisasi dan Keunggulan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	101
Gambar IV.12: Tingkat Spesialisasi dan Keunggulan Sektor Jasa Jasa.....	102
Gambar IV.13: Kategori Aksesibilitas Antar Kawasan	109
Gambar IV.14: Kategori Ketersediaan Sarana Pelayanan Masyarakat.....	111
Gambar IV.15: Faktor Fisik Sub Wilayah Pembangunan di Kabupaten Cilacap	112
Gambar IV.16: Kategori Kedekatan dengan Pusat Kota.....	113
Gambar IV.17: Kategori Penyediaan Lapangan Kerja.....	114
Gambar IV.18: Faktor ekonomi Sub Wilayah Pembangunan di Kabupaten Cilacap	115
Gambar IV.19: Kategori Keberadaan Pusat Perdagangan	116
Gambar IV.20: Kategori Banyaknya Kegiatan Masyarakat yang Dilakukan	117
Gambar IV.21: Kategori Tingkat Keamanan	117
Gambar IV.22: Faktor Sosial Sub Wilayah Pembangunan di Kabupaten Cilacap ...	118
Gambar IV.23: Kategori Keberadaan Investasi Swasta	119
Gambar IV.24: Faktor Eksternal Sub Wilayah Pembangunan di Kabupaten Cilacap.....	120

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A : DATA PENELITIAN

Lampiran A1	: Kuesioner Perkembangan Wilayah Berdasarkan Persepsi Masyarakat.....	141
-------------	---	-----

LAMPIRAN B : HASIL ANALISIS

Lampiran B1.1	: Sebaran Fasilitas	148
Lampiran B1.2	: Ketersediaan Fasilitas	151
Lampiran B1.3	: Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan.....	154
Lampiran B2.1	: Hasil <i>Location Quotient</i>	155
Lampiran B2.2	: Hasil <i>Shift Share</i>	164
Lampiran B2.3	: Rekapitulasi Sektor Basis dan Unggulan	177
Lampiran B3	: Rekapitulasi Hasil Kuesioner.....	183

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan apabila ada aktivitas penduduknya. Semakin beragam aktivitas penduduk suatu kota semakin cepat pula kota berkembang. Berkembangnya suatu kota ditandai dengan berkembangnya perekonomian melalui masuknya arus investasi dan berkembangnya sektor industri, perdagangan dan jasa serta perkembangan penduduk yang bermigrasi untuk mengisi kesempatan kerja yang timbul akibat perkembangan ekonomi yang didukung oleh tingkat kelengkapan prasarana kota yang mencukupi, terutama yang menghubungkan kota pusat pertumbuhan dengan daerah dibelakang (Parr: 1999).

Pada awal mula perkembangannya, aspek fisik alam suatu kota sangat mempengaruhi proses perkembangan kota tersebut. Aspek fisik ini merupakan wadah dari perkembangan selanjutnya. Kondisi alam memberikan pengaruh pada kedudukan dan bentuk morfologi suatu kota sehingga dapat dijumpai kota-kota yang berbentuk linier, radial, yang mengikuti bentang alam yang ada. Pada perkembangan selanjutnya, kota cenderung dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian dan kebudayaan penduduknya. Perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi yang pesat menjadi motor penggerak perkembangan kota.

Dalam proses berkembangnya kota, kawasan pusat kota akan menjadi orientasi pertumbuhan dan perkembangan kota. Menurut Bourne, 1972, pertumbuhan dan perkembangan kota diawali dari kawasan pusat kotanya. Pusat kota mempunyai potensi pendorong dan penarik kekuatan sosial ekonomi yang dapat menciptakan perubahan pesat pada suatu kota. Sebagai inti kota, ada beberapa fungsi pusat kota yaitu sebagai pusat

administrasi pemerintahan, pusat jasa dan perdagangan, pusat budaya dan hiburan, dan pusat transportasi.

Perkembangan kota umumnya dikendalikan dengan rencana tata ruang dan perangkat-perangkat pengendali, seperti peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan dan pemberian ijin-ijin pembangunan. Disamping pengendalian terhadap perkembangan kota diperlukan pula pemacu dan pengarahan. Salah satu yang diharapkan dapat melakukan hal ini adalah melakukan pembangunan infrastruktur. Ini adalah kegiatan pemerintah yang diharapkan dapat memacu perkembangan kota ke arah yang sesuai dengan rencana tata ruang. (Tumewu :1997).

Berdasarkan Tinjauan Arahan Pengembangan Rencana Struktur Tata Ruang Kota dalam RTRW Kabupaten Cilacap 1990/1991 – 2000/2001 (Perda No. 14 tahun 1994), guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, dengan memperhatikan perkembangan dan tingkat keeratan hubungan serta saling ketergantungan antara kegiatan dan wilayah yang ada, yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan, sejalan dengan kebijakan perwilayahan pembangunan Propinsi Jawa Tengah terbagi menjadi beberapa sub wilayah pembangunan, yaitu:

a. Sub Wilayah Pembangunan Ia (SWP Ia)

Meliputi Kota Cilacap dan Kecamatan Jeruklegi dengan pusat pengembangan di **Kota Cilacap**. Prioritas pada wilayah ini adalah usaha peningkatan tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan sektor pariwisata.

b. Sub Wilayah Pembangunan Ib (SWP Ib)

Meliputi Kecamatan Kesugihan, Maos dan Sampang. Dengan kegiatan pengembangan tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Pusat pengembangan di Kecamatan Sampang dengan Kota Sampang sebagai ibu kota kecamatan.

c. Sub Wilayah Pembangunan IIa (SWP IIa)

Meliputi Kecamatan Sidareja, Cipari, Kedungreja, Patimuan dan Gandrungmangu. Dengan prioritas pembangunan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan darat dan peternakan darat. Pusat pengembangan di Kecamatan Sidareja dengan Kota Sidareja sebagai ibu Kota Kecamatan.

d. Sub Wilayah Pembangunan IIb (SWP IIb)

Meliputi Kecamatan Kawunganten dengan Kota Kawunganten sebagai ibu kota kecamatan. Prioritas pembangunan sektor pariwisata, pertambangan, perikanan, perkebunan dan pengembangan Kawasan Kampung Laut.

e. Sub Wilayah Pembangunan III (SWP III)

Meliputi Kecamatan Kroya, Adipala, Binangun dan Nusawungu. Dengan prioritas pembangunan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan diiringi dengan sarana dan prasarana fisik. Pusat pengembangan di Kecamatan Kroya dengan Kota Kroya sebagai ibu kota kecamatan.

f. Sub Wilayah Pembangunan IVa (SWP IVa)

Meliputi Kecamatan Majenang, Dayeuhluhur dan Wanareja. Prioritas pembangunan sektor pertanian, perkebunan, perikanan darat, kehutanan dan perekonomian. Pusat pengembangan di Kecamatan Majenang dengan Kota Majenang sebagai ibu kota kecamatan.

g. Sub Wilayah Pembangunan IVb (SWP IVb)

Meliputi Kecamatan Karangpucung dan Cimanggu. Prioritas pembangunan sektor perkebunan, perekonomian serta pembangunan sarana dan prasarana fisik. Pusat pengembangan di Kecamatan Karangpucung dengan Kota Karangpucung sebagai ibu kota kecamatan.

Dan masing masing pusat wilayah pembangunan memiliki kondisi dan potensi yang beragam yang tentu saja membutuhkan penanganan yang berbeda beda. Karena pada dasarnya kota terbentuk dari berbagai aspek yang mencakup fisik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Perkembangan aspek-aspek tersebut secara otomatis akan mempengaruhi perkembangan kota satu dengan lainnya tidak sama, ada kota yang tumbuh pesat sebaliknya ada kota yang sulit berkembang. Hal ini dikarenakan setiap kota memiliki ciri maupun kondisi aspek yang berbeda-beda. Dari perbedaan tersebut suatu kota mempunyai pendorong perkembangan yang berbeda-beda pula. Dengan kondisi fisik yang dimiliki Kabupaten Cilacap maka terdapat wilayah wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam penanganannya. Wilayah prioritas tersebut dikriteriakan sebagai berikut:



1. Kawasan yang terbelakang karena keterbatasan sumber daya (Kecamatan Wanareja, Kawunganten, Cimanggu, Jeruklegi, Karangpucung, Adipala, Sidareja, Nusawungu, Kedungreja dan Patimuan).
2. Kawasan kritis yang perlu dipelihara fungsi lindungnya untuk menghindari kerusakan lingkungan (Kecamatan Kawunganten, Dayeuhluhur, Wanareja, Cimanggu, Karangpucung, Jeruklegi, Kedungreja, Gandrungmangu, Sidareja, Majenang dan Cipari)
3. Kawasan yang berperan menunjang sektor sektor strategis / unggulan (Kecamatan Cilacap Utara – Tengah – Selatan, Jeruklegi, Maos, Sampang, Kroya, Majenang dan Sidareja)
4. Kawasan yang pertumbuhannya lambat (Kecamatan Kawunganten dan Jeruklegi).
5. Kawasan perbatasan (Kecamatan Wanareja, Kedungreja, Patimuan, dan Dayeuhluhur).
6. Kawasan terpencil (Kecamatan Kawunganten dan Dayeuhluhur).

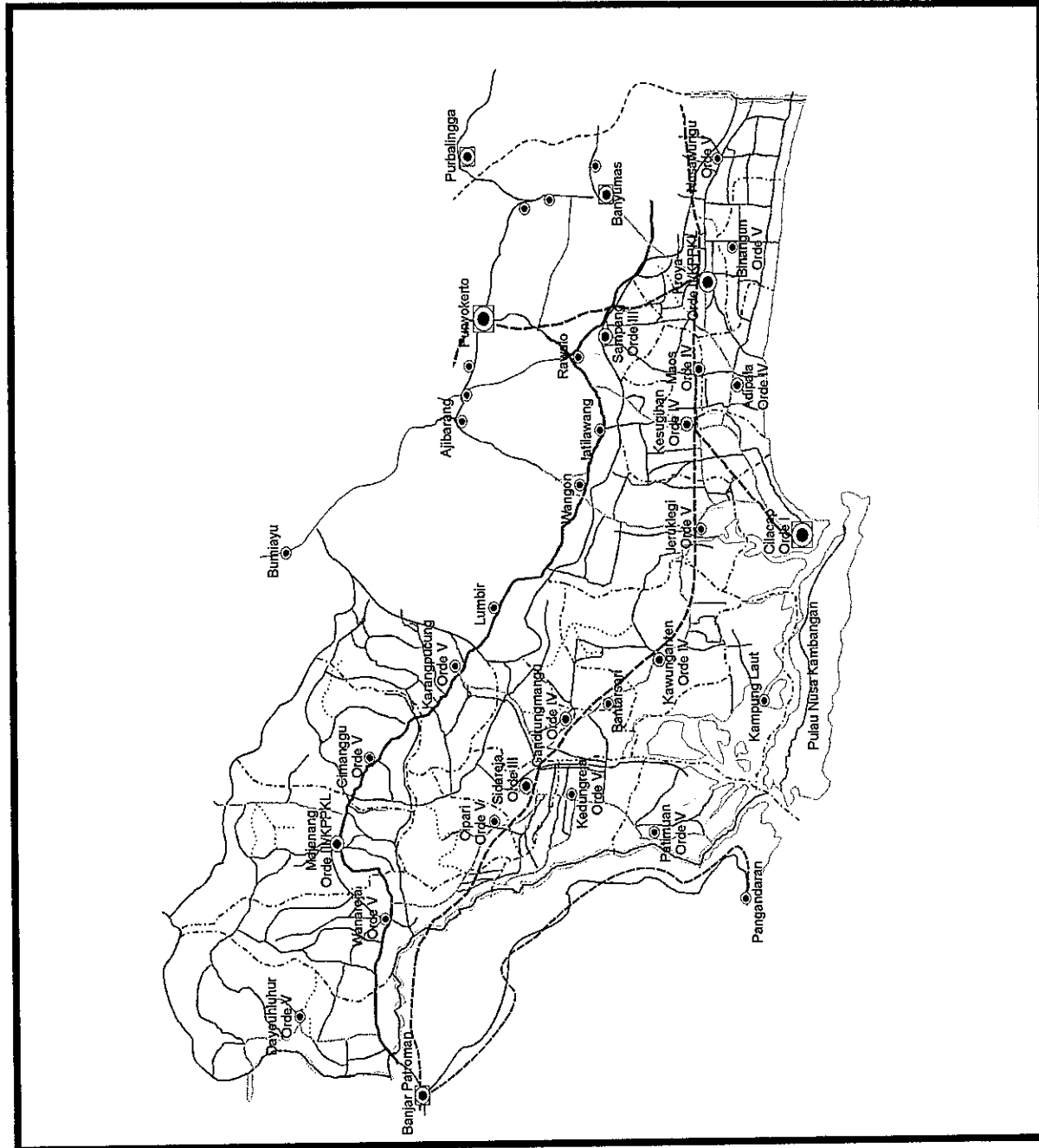
Dengan pembagian hierarki kota kota di Kabupaten Cilacap ditetapkan menurut orde orde kota sebagai berikut:

1. Orde I : Kota Cilacap
2. Orde II : Kecamatan Kroya
3. Orde III : Kecamatan Majenang, Sidareja, Sampang
4. Orde IV : Kecamatan Kesugihan, Adipala, Kawunganten, Gandrungmangu dan Maos
5. Orde V : Kecamatan Kedungreja, Binangun, Nusawungu, Jeruklegi, Karangpucung, Cimanggu, Wanareja, Dayeuhluhur, Cipari dan Patimuan

Secara lebih jelas, pembagian hierarki kota kota di Kabupaten Cilacap dapat di lihat dalam Gambar I.1.

Sedangkan dalam Rencana Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001, sesuai dengan arahan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan dan kawasan tertentu, Kabupaten Cilacap termasuk dalam kelompok kawasan strategis, yaitu kawasan yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya diprioritaskan. Sedangkan dalam arahan pengembangan sistem pelayanan permukiman wilayah atau sering juga disebut sistem pelayanan perkotaan, Kabupaten Cilacap dengan Kota Cilacap sebagai pusat kota kabupaten termasuk dalam kategori Kota Pusat Pelayanan Kegiatan Nasional (KPPKN). Hal ini memiliki arti, Kota Cilacap berpotensi menjadi pintu gerbang ke kawasan internasional dan pendorong perkembangan daerah sekitarnya. Selain itu, Cilacap juga menjadi pusat jasa pelayanan keuangan, pusat pengolahan atau pengumpul barang secara nasional atau beberapa propinsi, simpul transportasi, pusat jasa pemerintahan, dan juga pusat jasa lainnya. Sedangkan, Kota Majenang dan Kroya termasuk dalam kategori Kota Pusat Pelayanan Kegiatan Lokal (KPPKL).

 <p>MAGISTER TEKNIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	<p>TUGAS MATA KULIAH TESIS</p>																		
<p>PERKEMBANGAN PUSAT WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CILACAP</p>																			
<p>GAMBAR</p>																			
<p>HIERARKI KOTA KOTA DI KABUPATEN CILACAP</p>																			
<p>Legenda :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; height: 10px;"></td> <td>Batas Kabupaten</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px dashed black; height: 10px;"></td> <td>Batas Kecamatan</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px dotted black; height: 10px;"></td> <td>Jalan Nasional</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; height: 10px;"></td> <td>Jalan Propinsi</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; height: 10px;"></td> <td>Jalan Kabupaten</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; height: 10px;"></td> <td>Jalan Kereta api</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; height: 10px;"></td> <td>Sungai</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; height: 10px;"></td> <td>Kota Kabupaten/KPPKN</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; height: 10px;"></td> <td>Kantor Kecamatan</td> </tr> </table>			Batas Kabupaten		Batas Kecamatan		Jalan Nasional		Jalan Propinsi		Jalan Kabupaten		Jalan Kereta api		Sungai		Kota Kabupaten/KPPKN		Kantor Kecamatan
	Batas Kabupaten																		
	Batas Kecamatan																		
	Jalan Nasional																		
	Jalan Propinsi																		
	Jalan Kabupaten																		
	Jalan Kereta api																		
	Sungai																		
	Kota Kabupaten/KPPKN																		
	Kantor Kecamatan																		
 <p>UTARA</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">SKALA</td> <td style="text-align: center;">No. GAMBAR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 1 : 1.250.000 0 12,5 25km </td> <td style="text-align: center;">1.1</td> </tr> </table>	SKALA	No. GAMBAR	1 : 1.250.000 0 12,5 25km	1.1														
SKALA	No. GAMBAR																		
1 : 1.250.000 0 12,5 25km	1.1																		
<p>SUMBER</p>																			
<p>BAPPEDA Kabupaten Cilacap</p>																			



Tetapi saat ini perkembangan pusat sub wilayah pembangunan yang ada kurang optimal. Hal ini menjadikan Kabupaten Cilacap dalam pertumbuhan dan perkembangannya menjadi kurang optimal, terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan menurut hasil pendataan desa mengenai identifikasi penduduk miskin yang telah dilakukan pada tahun 1999 yang mencapai angka $\pm 40\%$. Padahal, Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kawasan maju dengan kontribusi terbesar dari sektor pertanian yang mencapai 31,57%, menurut PDRB atas dasar harga konstan 2002. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya pemusatan aktivitas kota di pusat kota, menyebabkan tidak seimbangya perkembangan pusat kota dengan perkembangan wilayah pinggiran kota (pusat kota menjadi sangat dominan terhadap wilayah pinggirannya). Dan kegiatan yang ada tidak berpengaruh besar terhadap daerah *hinterlandnya*.

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Cilacap terdiri dari 24 kecamatan guna mencapai pertumbuhan yang lebih baik dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) Sub Wilayah Pembangunan (SWP), memiliki tingkat pertumbuhan yang tidak merata, hal ini selain disebabkan oleh kondisi fisik, sosial dan ekonomi yang berbeda, pembangunan yang dilakukan saat ini banyak dipusatkan dipusat kota kabupaten. Padahal, secara fisik alam Kota Cilacap sudah tidak dapat diubah atau dimekarkan lagi, dimana pusat kota hanya dilewati atau didatangi oleh orang-orang yang benar-benar bertujuan ke Kota Cilacap. Sedangkan keberadaan Kota Cilacap sebagai kawasan strategis dengan industri skala besar – kecil, fasilitas perdagangan dan jasa yang ada belum mampu mempengaruhi perkembangan wilayah. Akibatnya potensi ekonomi yang seharusnya ada di wilayah ini tidak tergali secara optimal.

Guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kabupaten Cilacap memerlukan dukungan yang optimal dari pusat-pusat sub wilayah pembangunan yang ada.

Tetapi, kebijakan sub wilayah pembangunan sebagai salah satu konsep dalam perencanaan wilayah yang digunakan untuk menyebarkan kemakmuran dari pusat wilayah kepinggirannya, sehingga wilayah disekitarnya terpacu untuk berkembang dan mengurangi beban pelayanan yang diemban pusat kota di Kabupaten Cilacap tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga, masih terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan wilayah, dan kegiatan yang ada tidak berpengaruh besar terhadap daerah *hinterlandnya*. Berdasarkan masalah tersebut dirumuskan *problem statement*: Perkembangan pusat sub wilayah pembangunan tidak berpengaruh terhadap perkembangan wilayah..

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas *research question* yang dapat dikaji dalam studi ini adalah:

**“Bagaimana Perkembangan Pusat Sub Wilayah Pembangunan dan Sub Wilayah
Pembangunan Dalam Perkembangan Wilayah Kabupaten Cilacap? ”**

1.3 Tujuan dan Sasaran Studi

1.3.1 Tujuan Studi:

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan, maka studi ini bertujuan untuk menggali faktor faktor baik secara internal maupun eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pusat sub wilayah pembangunan sehingga kurang berperan dalam perkembangan wilayah untuk dirumuskan sebagai arahan pertumbuhan dan perkembangan pusat sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap.

1.3.2 Sasaran Studi:

Adapun sasaran dari studi ini adalah untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis pertumbuhan kota pusat sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap, dilihat dari kondisi fisik, ekonomi dan sosial serta pertumbuhan penduduk.
2. Mengkaji dan menganalisis keunggulan atau perkembangan ekonomi daerah belakang pada masing masing sub wilayah pembangunan.
3. Menganalisis perkembangan sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap berdasarkan persepsi masyarakat tentang daya tarik dan daya tolak kawasan dan kondisi lapangan yang meliputi faktor fisik, ekonomi, sosial dan eksternal kawasan.
4. Mengidentifikasi peran pusat sub wilayah pembangunan dalam Kabupaten Cilacap.

1.4 Manfaat Studi

Studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Pemerintah, sebagai masukan tentang konsep pengembangan pusat sub wilayah pembangunan dalam menentukan arahan pertumbuhan dan perkembangan pusat sub wilayah pembangunan Kabupaten Cilacap.
2. Masyarakat dan pihak swasta, sebagai wawasan pelaku/subyek aktivitas perkotaan sehingga lebih berperan dalam mengembangkan pusat sub wilayah pembangunan, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kabupaten Cilacap.

1.5 Ruang Lingkup

1.5.1 Ruang Lingkup Materi

Lingkup substansi yang akan dibahas adalah peran pusat sub wilayah pembangunan dalam pertumbuhan dan perkembangan Sub Wilayah Pembangunan (SWP) di Kabupaten Cilacap berdasarkan standar dan data-data sekunder. Pusat sub wilayah pembangunan dapat diartikan sebagai suatu daerah tertentu yang potensial direncanakan untuk pengembangan perencanaan ekonomi, sosial dan fisik; bertujuan menghidupkan (lebih lanjut) wilayah permukiman (kota dan desa) agar dapat mengangkat pertumbuhan daerah yang bersangkutan. Sedangkan perkembangan pusat sub wilayah pembangunan adalah pertumbuhan secara fisik suatu daerah yang disertai perkembangan keadaan ekonomi dan sosial daerah tersebut.

Perkembangan aktivitas kota merupakan indikator perkembangan kota, namun pemusatan aktivitas kota di pusat kota menyebabkan tidak seimbangya perkembangan pusat kota dengan perkembangan wilayah pinggiran kota (pusat kota menjadi sangat dominan terhadap wilayah pinggirannya). Para geografer tentang pembangunan daerah umumnya berpendapat bahwa demi keberhasilan pembangunan perlu adanya hierarki kota. Tanpa hadirnya kota-kota kecil sebagai pusat-pusat wilayah, perkembangan tak mungkin dibayangkan. Pusat-pusat regional ini akan berfungsi sebagai saluran sehat yang menghubungkan ibu kota dengan pedesaan dipedalaman. Dimana titik atau pusat pertumbuhan dalam suatu kota merupakan embrio perkembangan kota, dan pusat sub wilayah pembangunan merupakan salah satu konsep dalam perencanaan wilayah, yang digunakan untuk menyebarkan kemakmuran dari pusat wilayah ke pinggirannya sehingga wilayah di sekitarnya terpacu untuk berkembang dan mengurangi beban pelayanan yang diemban pusat kota.

Penilaian perkembangan pusat-pusat sub wilayah pembangunan dilakukan untuk mengetahui peran pusat sub wilayah pembangunan tersebut, antara lain :

1. Kajian perkembangan pusat sub wilayah pembangunan dalam rangka pengembangan wilayah Kabupaten Cilacap, yang dianalisis berdasarkan kajian teori. Dari hasil studi literatur dan observasi pendahuluan diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu kawasan meliputi:
 - a. Faktor Fisik, terdiri dari struktural alam, yaitu kondisi topografi tanah, ketersediaan sarana prasarana masyarakat, dan aksesibilitas kawasan baik di dalam maupun yang menghubungkan antar kawasan.
 - b. Faktor Ekonomi, meliputi kedekatan dengan pusat kota, penyediaan lapangan kerja, dan keberadaan pusat-pusat kegiatan perekonomian seperti pasar, pertokoan dan perbankan.
 - c. Faktor Sosial, meliputi ketersediaan pusat kegiatan masyarakat, keamanan lingkungan dan meningkatnya penghasilan.
 - d. Faktor Eksternal Kawasan, meliputi investasi swasta, keterkaitan dengan kawasan lain.
2. Perkembangan wilayah Kabupaten Cilacap dari aspek fisik, ekonomi, dan sosial yang diperoleh dari data sekunder.
3. Persepsi masyarakat tentang pendorong dan penghambat perkembangan pusat sub wilayah pembangunan berdasarkan aspek fisik, ekonomi, dan sosial sebagai referensi tambahan bagi hasil analisis faktor perkembangan wilayah Kabupaten Cilacap.

1.5.2 Ruang Lingkup Spasial

Perbedaan kondisi pusat sub wilayah pembangunan dan wilayah geografis Kota Cilacap memunculkan fenomena disparitas perkembangan antar wilayahnya, di mana Kota

Cilacap dianggap sebagai aktor utama dalam pembangunan berkembang jauh lebih pesat dibandingkan wilayah lainnya di Kabupaten Cilacap. Hal ini mendorong dilakukannya evaluasi terhadap peran pusat-pusat sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap, sebagai arahan untuk memacu perkembangan wilayah Kabupaten Cilacap. Dan ruang lingkup spasial serta obyek penelitiannya yang diambil untuk studi ini yaitu:

1. Data primer/responden persepsi masyarakat tentang daya tarik dan daya tolak pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kabupaten Cilacap. Obyek penelitiannya yaitu kepala keluarga di kecamatan dalam Kabupaten Cilacap.
2. Data sekunder tentang aspek fisik, ekonomi, dan sosial serta faktor faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pusat pusat sub wilayah pembangunan yang ada di Kabupaten Cilacap.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kerangka pendekatan pola pikir dalam rangka menyusun suatu penelitian yang dilakukan untuk mengarahkan proses berpikir dalam memecahkan suatu persoalan dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Atau dengan kata lain, metode penelitian juga merupakan suatu kesatuan sistem dalam penelitian yang terdiri dari prosedur dan teknik yang perlu dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan teknik penelitian merupakan alat ukur apa yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian.

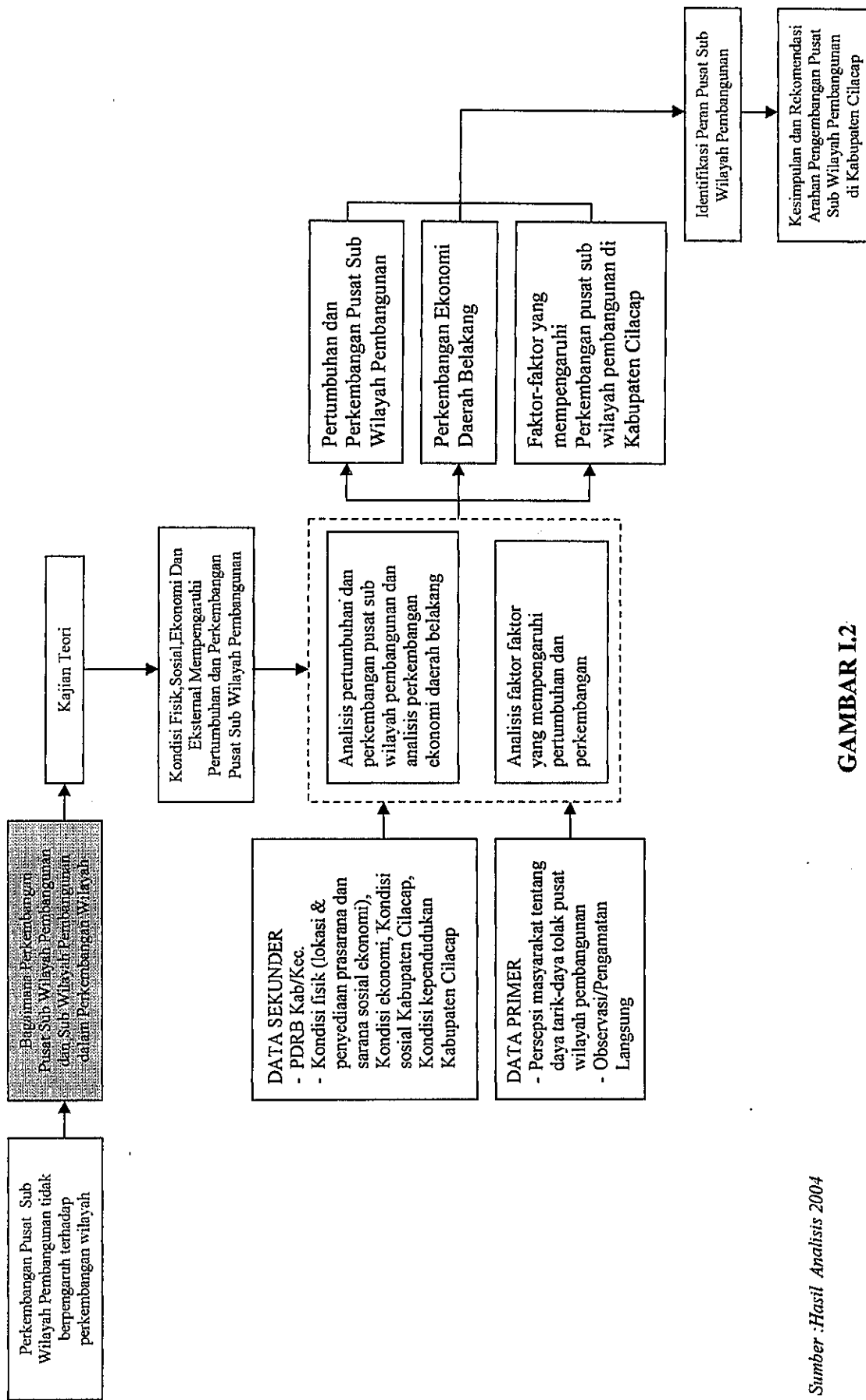
Pemilihan metode penelitian yang paling cocok akan sangat menentukan hasil yang akan dicapai. Metode penelitian untuk menggali faktor pendorong dan faktor penghambat perkembangan pusat sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap diawali dengan teknik menganalisis data-data yang telah diperoleh, menentukan kebutuhan data yang

diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan/penyajian data. Penelitian ini termasuk Penelitian Deskriptif mengingat tidak dilakukannya pengontrolan terhadap adanya semua perlakuan (Arikunto, 1997:369). Sedangkan Menurut Whitney (1960) dalam Nazir (1988:63), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

Pendekatan penelitian yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang mengkaji perkembangan pusat dan sub wilayah pembangunan-nya dalam perkembangan wilayah Kabupaten Cilacap, yang dilihat dari kondisi fisik, sosial dan ekonomi serta eksternal wilayah adalah pendekatan survey, yaitu suatu pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk mengumpulkan data yang luas dan banyak, sehingga dapat diketahui kedudukan (status), fenomena (gejala), dan menentukan persamaan status dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh dengan standar yang telah ditentukan.

1.6.2 Kerangka Analisis

Pada umumnya perkembangan terjadi disepanjang jalur utama, dimana faktor faktor yang menentukan perkembangan regional yang disusun khusus untuk kepentingan daerah adalah : lingkungan alam dalam arti ruang dan sumber daya alam serta pemanfaatannya, penduduk dalam arti kepadatan dan migrasinya dan peranan kota kota besar atas daerah serta campur tangan pemerintah. Dan mekanisme kerjasama faktor faktor tersebut akan mendorong proses pergeseran kepadatan penduduk dari pedalaman ke sekitar kota kota besar kecil dan sepanjang jaringan jalan raya. Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, kerangka analisis dalam mengkaji perkembangan pusat sub wilayah pembangunan dan sub wilayah pembangunan dalam perkembangan wilayah Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada halaman berikut.



GAMBAR I.2
ALUR PROSES ANALISIS DATA

Sumber Hasil Analisis 2004

1.6.3 Teknik Analisis

Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif yang didukung analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif, digunakan untuk menganalisis data yang tersaji dalam bentuk angka dan dapat diukur. Sedangkan metode analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang mengungkap fakta berbentuk non numerik. Adapun analisis yang dilakukan dalam mengkaji perkembangan pusat sub wilayah pembangunan dan sub wilayah pembangunan dalam perkembangan wilayah Kabupaten Cilacap antara lain:

1.6.3.1 Analisis Pertumbuhan dan Perkembangan Pusat Sub Wilayah Pembangunan

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pusat sub wilayah pembangunan yang ada di Kabupaten Cilacap sejak ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap, berdasarkan Tinjauan Arahan Pengembangan Rencana Struktur Tata Ruang Kota dalam RTRW Kabupaten Cilacap 1990/1991 – 2000/2001 (Perda No.14 Tahun 1994). Pertumbuhan dan perkembangan pusat wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap, dilihat dari ketersediaan fasilitasnya dengan menggunakan Skalogram Guttman.

Metode Skalogram (*Scaling Method*), yaitu dengan mencari tingkatan hierarki fasilitas dengan ukuran nominal 1 berarti ada fasilitas dan 0 berarti tidak ada fasilitas. Ketersediaan fasilitas baik prasarana fisik, ekonomi maupun sosial yang dilihat berdasarkan data sekunder pusat sub wilayah pembangunan dan Ibu Kota Kecamatan lainnya di Kabupaten Cilacap pada tahun 1999, 2002 dan 2003 sebagai data pembanding untuk mengetahui seberapa besar tingkat perkembangan yang terjadi.

1.6.3.2 Analisis Keunggulan Atau Perkembangan Ekonomi Daerah Belakang

Analisis ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sektor sektor unggulan atau perkembangan ekonomi masing masing sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap. Alat analisis yang dapat digunakan dalam mengkaji pertumbuhan dan perkembangan sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap, antara lain:

A. *Location Quotient (LQ)*

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor sektor pada suatu daerah, atau sektor sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau unggulan dan layak untuk dikembangkan di suatu wilayah/kota. Permintaan dari luar wilayah/kota akan mempengaruhi sektor basis dan non basis. Sektor basis yang ada di suatu daerah akan memberikan kontribusi berupa peningkatan pendapatan daerah. Dengan demikian sektor basis merupakan penggerak utama, dimana setiap perubahan yang terjadi akan memberikan efek menyebar terhadap sistem perekonomian wilayah. Formula untuk menentukan sektor basis dengan metoda LQ adalah (Warpani, 1984:68) :

$$LQ = \frac{Si/Ni}{S/N} = \frac{Si/S}{Ni/N}$$

Dimana :

- Si = Jumlah buruh sektor ekonomi i di kecamatan kecamatan dalam Kabupaten Cilacap
- S = Jumlah buruh seluruh sektor kegiatan ekonomi di kecamatan kecamatan dalam Kabupaten Cilacap
- Ni = Jumlah sektor kegiatan ekonomi i di Kabupaten Cilacap
- N = Jumlah seluruh buruh di Kabupaten Cilacap

Dari perhitungan suatu sektor, kriteria umum yang dihasilkan adalah :

- Jika $LQ > 1$, disebut sektor basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi dari pada tingkat wilayah acuan
- Jika $LQ < 1$, disebut sektor non-basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari pada tingkat wilayah acuan

- Jika $LQ = 1$, maka tingkat spesialisasi daerah sama dengan tingkat wilayah acuan.

B. Analisis Shift Share

Metode ini digunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian daerah, pergeseran struktur, posisi relatif sektor sektor ekonomi dan identifikasi sektor sektor unggul daerah dalam kaitannya dengan perekonomian wilayah yang lebih luas. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut :

$$PEK = KPW + KPP + KPK$$

Dimana :

PEK = Pertumbuhan Kinerja Ekonomi

KPW = Komponen Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Cilacap

KPP = Komponen Pertumbuhan Proporsional

KPK = Komponen Pergeseran atau Pertumbuhan Pangsa Wilayah (Ma'rif, 2003)

Atau

$$PEK = \left| \frac{Y^*}{Y} - 1 \right| + \left| \frac{Y_i'}{Y_i} - \frac{Y^*}{Y} \right| + \left| \frac{y_i'}{y_i} - \frac{Y_i'}{Y_i} \right|$$

Dengan :

Y^* : indikator ekonomi Kabupaten Cilacap akhir tahun kajian

Y : indikator ekonomi Kabupaten Cilacap awal tahun kajian

Y_i' : indikator ekonomi Kabupaten Cilacap sektor akhir tahun kajian

Y_i : indikatorekonomi Kabupaten Cilacap sektor awal tahun kajian

y_i' : indikator ekonomi Kecamatan sektor akhir tahun kajian

y_i : indikator ekonomi Kecamatan sektor awal tahun kajian

Pergeseran Netto (PN) dihitung dengan rumus :

$$PN = KPP + KPK$$

TABEL I.1
REPRESENTASI NILAI KPP DAN KPK

Keterangan	KPP	KPK
Unggul	+	+
Agak Unggul	(-)	+
Agak Mundur	+	(-)
Mundur	(-)	(-)

Sumber: Ma'rif, 2003

1.6.3.3 Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan

Tujuan dilakukannya analisis ini adalah untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pusat sub wilayah pembangunan sehingga kurang berperan dalam perkembangan wilayah Kabupaten Cilacap. Faktor faktor tersebut diperoleh berdasarkan persepsi masyarakat tentang daya tarik dan daya tolak kawasan dan kondisi lapangan yang meliputi faktor fisik, ekonomi, sosial dan eksternal, dengan menggunakan Analisis *Quota*.

Analisis *quota* digunakan untuk memberikan penilaian terhadap indikator-indikator setiap variabel sehingga dapat diketahui masing-masing parameter yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu mengenai faktor faktor yang mempengaruhi perkembangan pusat pusat sub wilayah pembangunan. Untuk mempermudah pelaksanaan penilaian terhadap faktor faktor yang mempengaruhi perkembangan baik itu faktor faktor yang menghambat maupun yang mendorong berkaitan dengan persepsi responden terhadap kondisi fisik, sosial dan ekonomi dan eksternal pusat pusat sub wilayah pembangunan yang telah ada, maka digunakan skala penilaian untuk masing-masing parameter tersebut.

Dalam penilaian ini, masing-masing parameter tersebut mempunyai ukuran yang sama. Dengan demikian, penilaiannya dapat dilakukan dengan menjumlahkan angka dari masing-masing parameter tersebut. Cara ini disebut dengan *judgment of similarity* (Rankin, 1983:6). Dengan cara ini, ukuran masing-masing parameter tersebut dinyatakan dalam obyek psikologi yang bentuknya dapat berupa segala sesuatu yang berkaitan dengan rasa yang menghasilkan pengaruh kognitif misalnya rasa puas dan tidak puas, baik dengan tidak baik dan sebagainya. Skala penilaian untuk masing-masing parameter harus simetris dengan kondisi netral (*moderate*). Dan penyebaran nilai-nilai tersebut perlu diringkas dalam suatu distribusi frekuensi dengan tidak mengurangi obyektivitas hasil penelitian, yaitu dengan

suatu daftar yang membagi data yang ada ke dalam tujuh kategori. yaitu “sangat baik, baik, cukup baik, sedang, agak jelek, jelek, sangat jelek” dan klasifikasi “sangat dekat, dekat, cukup dekat, sedang, cukup jauh, jauh, sangat jauh” dan sebagainya. Karena, semakin banyak pilihan justru akan mengaburkan perbedaan yang diinginkan diantara jenjang jenjang termaksud (Drs.,MA. Azwar, Saifuddin, 1999). Lagi pula responden tidak akan cukup peka dengan perbedaan jenjang yang lebih dari tujuh tingkat.

TABEL I.2
DISTRIBUSI FREKUENSI

No.	Variabel	Sangat Baik (7)	Baik (6)	Cukup Baik (5)	Sedang (4)	Agak Buruk (3)	Buruk (2)	Sangat Buruk (1)
1	2	3	4	5	6	7	7	8
1.	Faktor Fisik							
	A Ketersediaan Sarana Pelayanan Masyarakat							
	B Aksesibilitas inter Kawasan							
	C Kondisi Geografis Wilayah							
2.	Faktor Ekonomi							
	A Kedekatan dengan Pusat Kota							
	B Berkembangnya Kegiatan Ekonomi							
	C Tersedianya Lapangan Kerja							
3.	Faktor Sosial							
	A Tersedianya Pusat Kegiatan masyarakat							
	B Keamanan Lingkungan							
4.	Faktor eksternal							
	A Investasi Swasta							
	B Keterkaitan dengan Wilayah lain							
	C Intervensi Kebijakan Pemerintah							

Sumber : Pendekatan studi 2004

Dengan sistem tersebut, hasil akhir penilaian dapat diketahui nilai sebagai hasil penjumlahan.

1.6.3.4 Analisis Peran Pusat Pusat Wilayah Pembangunan di Kabupaten Cilacap

Analisis ini digunakan untuk mengetahui peran masing masing pusat sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap, yang digunakan sebagai acuan bagi arahan pertumbuhan dan perkembangan pusat sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dideskripsikan, yang dilakukan dengan mengadakan komparasi data dan sumbernya untuk mensistematisasikan baik perbedaan maupun persamaan pandangan atau pendapat berdasarkan kualifikasi, situasi sumber saat penyampaian data dan kesesuaian dengan dokumen.

Untuk menemukan arahan pertumbuhan dan perkembangan pusat sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap perlu pengamatan untuk melihat hubungan antara perkembangan pusat pusat sub wilayah pembangunan, perkembangan ekonomi daerah belakang dan faktor faktor yang mempengaruhi baik itu faktor penghambat maupun pendorong dengan faktor kebijakan pemerintah dalam hal pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Cilacap. Dan hasil dari perbandingan tersebut dideskripsikan.

1.6.4 Data yang Digunakan

Berdasarkan sasaran studi maka data yang dibutuhkan dalam studi ini meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner terhadap masyarakat Kabupaten Cilacap, sedangkan data sekunder yang dimaksud adalah data yang berasal dari tulisan tulisan yang berbentuk buku laporan, peraturan peraturan, dokumen dan sebagainya yang diperoleh dari instansi terkait di Kabupaten Cilacap seperti Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Kecamatan, Kelurahan, dan BPS serta dinas terkait lainnya.

TABEL I.3
DATA YANG DIGUNAKAN

SASARAN	JENIS DATA	UNIT ANALISIS
1. Mengkaji dan menganalisis pertumbuhan dan perkembangan pusat wilayah pembangunan dalam Kabupaten Cilacap yang meliputi faktor fisik, ekonomi, sosial dan eksternal.	1. Sarana Perekonomian 2. Sarana kesehatan dan pendidikan 3. Kepadatan & penyebaran penduduk 4. Tingkat pendidikan 5. Tingkat kesejahteraan penduduk 6. Panjang jalan menurut permukaan	Kecamatan (sumber : BPS, DiPerindag, Dinkes, Diknas, DPU dan Bappeda)
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pusat wilayah pembangunan dari faktor faktor yang mempengaruhi berdasarkan faktor yang diperoleh dari kajian teori	PDRB Atas Dasar Harga konstan 1993 – 2002 tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap	BPS dan Bappeda
3. Analisis faktor-faktor pendorong dan penghambat perkembangan Kabupaten Cilacap	Hierarki faktor pendorong dan penghambat perkembangan wilayah Kabupaten Cilacap	Kepala Keluarga Kelurahan/Desa
4. Mengidentifikasi peran pusat pusat wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap	Peran pusat wilayah pembangunan	Kabupaten Cilacap

Sumber : Pendekatan studi 2004

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui:

1. Pengumpulan data sekunder

Dokumentasi yaitu teknik untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan mencatat arsip-arsip atau data-data yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan diteliti untuk bahan menganalisa permasalahan, misalnya jumlah penduduk, jumlah rumah tangga serta peraturan perundang-undangan yang dapat diperoleh dari dinas atau instansi terkait. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian, hasil seminar, artikel-artikel dan penelusuran pustaka serta dokumen resmi dari instansi yang berkaitan.

2. Pengumpulan data primer

Pengambilan sampel data primer ini dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah KK per kecamatan. Dengan menggunakan kuesioner yang diajukan kepada responden, yaitu pengumpulan data yang menggunakan daftar pertanyaan yang sifatnya tertutup dan terbuka. Adapun sebagai responden dalam penelitian ini adalah kepala keluarga (KK). Menurut Singarimbun (1995:171), besarnya sampel agar distribusinya normal adalah

sampel yang jumlahnya > 30 yang diambil secara random. Untuk menentukan besarnya jumlah sampel yang akan diambil dalam studi ini digunakan rumus Slovin (Husein Umar, 2001) jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$S = \frac{N}{(N \alpha^2) + 1}$$

S = Jumlah minimal responden yang diperbolehkan

N = Jumlah populasi penduduk

α^2 = Derajat kesesuaian *sampling error* (antara 2% - 15 %).

Derajat kesesuaian atau batas signifikan (α) yang dipakai dalam menentukan jumlah sampel adalah 10%. Berdasarkan jumlah KK di Kabupaten Cilacap (736.912 KK), maka jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 KK yang tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Cilacap yang diambil secara proposional. Hal ini agar jumlah penyebaran sampel dapat mewakili seluruh areal yang akan diteliti (representatif) maka pengambilan sampel pada lokasi ditentukan secara proporsional.

Teknik pengolahan data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner meliputi kegiatan:

1. *Editing*, data yang masuk (*raw data*) diperiksa dan diteliti untuk menjaga kalau ada kesalahan dalam pengisian oleh jawaban responden, sehingga akan diperoleh data yang valid, reliable dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
2. *Tabulating*, jawaban-jawaban yang serupa dikelompokkan dengan cara yang teliti dan teratur, kemudian dihitung dan dijumlahkan banyaknya peristiwa, gejala maupun kategori.

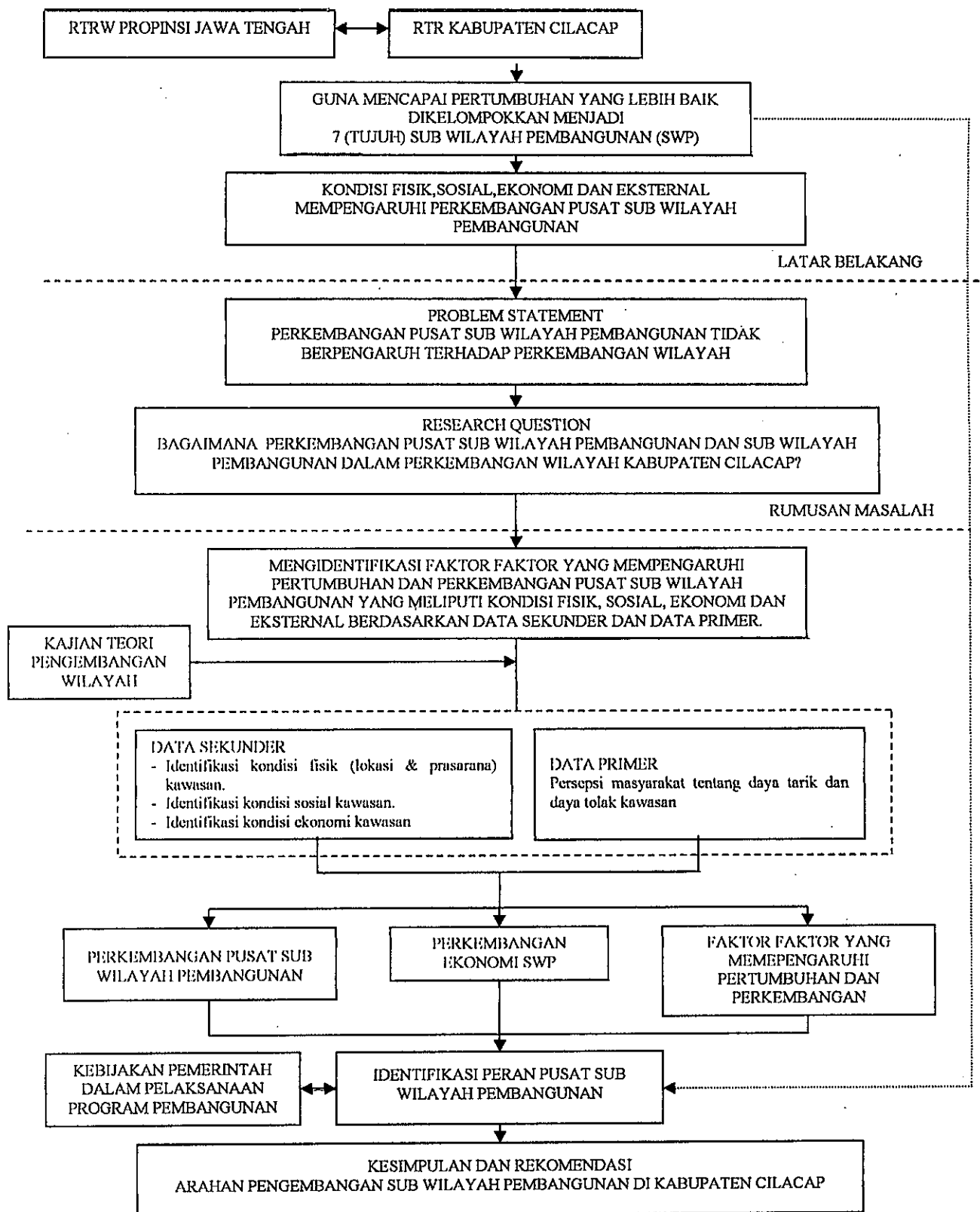
1.7 Kerangka Pikir

Perkembangan suatu wilayah yang cenderung memusat di pusat kota menyebabkan tidak meratanya perkembangan di bagian wilayah yang lain. Untuk mempercepat *trickling down effect* maka ditetapkan beberapa sub pusat yang berfungsi sebagai pusat sub wilayah

pembangunan. Tetapi, perbedaan kondisi geografis pusat sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap memunculkan fenomena disparitas perkembangan antar wilayahnya, di mana Kota Cilacap sebagai ibu kota kabupaten berkembang jauh lebih pesat dibandingkan wilayah lainnya.

Padahal, secara fisik alam Kota Cilacap sudah tidak dapat diubah atau dimekarkan lagi, sedangkan keberadaan Kota Cilacap sebagai kawasan strategis dengan industri skala besar – kecil, fasilitas perdagangan dan jasa yang ada belum mampu mempengaruhi perkembangan wilayah. Akibatnya potensi ekonomi yang seharusnya ada di wilayah ini tidak tergali secara optimal. Guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kabupaten Cilacap memerlukan dukungan yang optimal dari pusat pusat sub wilayah pembangunan yang ada.

Tetapi, kebijakan sub wilayah pembangunan sebagai salah satu konsep dalam perencanaan wilayah yang digunakan untuk menyebarkan kemakmuran dari pusat wilayah kepinggirannya, sehingga wilayah disekitarnya terpacu untuk berkembang dan mengurangi beban pelayanan yang diemban pusat kota di Kabupaten Cilacap tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pertumbuhan dan perkembangan pusat pusat sub wilayah pembangunan kurang berperan dalam perkembangan wilayah. Dan untuk mengetahui faktor faktor baik secara internal maupun eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pusat pusat sub wilayah pembangunan sehingga kurang berperan dalam perkembangan wilayah untuk dirumuskan sebagai arahan pertumbuhan dan perkembangan pusat sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap. Perlu dilakukan analisis terhadap pusat pusat sub wilayah pembangunan dalam Kabupaten Cilacap, kemudian hasil analisis tersebut dibandingkan dengan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap. Adapun Skema kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:



GAMBAR 1.3
KERANGKA PEMIKIRAN

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan studi ini meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan sasaran studi, ruang lingkup, manfaat studi, metode penelitian yang meliputi kebutuhan data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, teknik penyajian data, teknik sampling, dan teknik analisis, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II PUSAT SUB WILAYAH PEMBANGUNAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN WILAYAH

Berisi kajian teori yang relevan dengan tema perkembangan pusat pusat wilayah pembangunan dan pengaruhnya terhadap perkembangan wilayah. Dalam bab ini juga disinggung tentang tinjauan wilayah, faktor yang mempengaruhi perkembangan wilayah serta konsep konsep pengembangan wilayah.

BAB III KAJIAN PUSAT PUSAT SUB WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CILACAP

Berisi penjelasan tentang kebijakan tata ruang yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Cilacap Tahun 1994 – 2004 mengenai pusat pembangunan wilayah, gambaran umum wilayah, dan gambaran kondisi masing-masing pusat wilayah pembangunan dari berbagai aspek kependudukan, ekonomi, dan ketersediaan fasilitasnya.

BAB IV ANALISIS PERKEMBANGAN PUSAT SUB WILAYAH PEMBANGUNAN SEBAGAI ARAHAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN CILACAP

Berisi identifikasi faktor faktor yang mempengaruhi perkembangan pusat sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap ketersediaan fasilitas, keunggulan atau perkembangan

ekonomi daerah belakang dan , analisis faktor-faktor pendorong dan penghambat perkembangan pusat sub wilayah pembangunan yang meliputi aspek fisik, ekonomi, sosial dan eksternal berdasarkan persepsi masyarakat di Kabupaten Cilacap, dan merumuskan arahan pengembangan pusat sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berisi tentang kesimpulan penelitian sebagai hasil dari kajian perkembangan pusat sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap sebagai arahan pertumbuhan dan perkembangan pusat sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap yang akan digunakan sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap.

BAB II

PERKEMBANGAN PUSAT PUSAT WILAYAH PEMBANGUNAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN WILAYAH

2.1 Tinjauan Perkembangan Pusat Wilayah Pembangunan

Pusat wilayah pembangunan dapat diartikan sebagai suatu daerah tertentu yang potensial direncanakan untuk pengembangan perencanaan ekonomi, sosial dan fisik; bertujuan menghidupkan (lebih lanjut) wilayah permukiman (kota dan desa) agar dapat mengangkat pertumbuhan daerah yang bersangkutan. Sedangkan perkembangan pusat wilayah pembangunan adalah pertumbuhan secara fisik suatu daerah yang disertai perkembangan keadaan ekonomi dan sosial daerah tersebut.

Perkembangan aktivitas kota merupakan indikator perkembangan kota, namun pemusatan aktivitas kota di pusat kota menyebabkan tidak seimbang perkembangan pusat kota dengan perkembangan wilayah pinggiran kota (pusat kota menjadi sangat dominan terhadap wilayah pinggirannya). Pusat sub wilayah pembangunan merupakan salah satu konsep dalam perencanaan wilayah, yang digunakan untuk menyebarkan kemakmuran dari pusat wilayah ke pinggirannya sehingga wilayah di sekitarnya terpacu untuk berkembang dan mengurangi beban pelayanan yang diemban pusat kota.

2.2 Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Teori perencanaan wilayah dewasa ini telah berkembang menjadi teori khusus dalam ekonomi (*location*) dan geografi (*central places*); teori perencanaan kota yang berdasarkan ekologi manusia, ekonomi lahan dan estetika bentuk kota, menjadikan proses tumbuh kembangnya wilayah lebih banyak menggunakan teori teori ekonomi. Ada dua macam pendekatan dalam perencanaan wilayah menurut Friedman & Weaver (dalam Johara T. Jayadinata, 1999), yaitu:

1. Pendekatan territorial, merupakan perencanaan yang memperhitungkan mobilisasi terpadu dari semua sumber daya manusia dan sumber daya alam dari suatu wilayah tertentu yang terciptakan oleh perkembangan sejarahnya.
2. Pendekatan fungsional, merupakan suatu perencanaan wilayah yang memperhitungkan lokasi berbagai kegiatan ekonomi dan pengaturan secara ruang dari sistem perkotaan mengenai berbagai pusat jaringan. Hal tersebut banyak berhubungan dengan beberapa model, seperti : model gravitasi, analisis masukan – keluaran, dan sebagainya.

Perencanaan wilayah dan kota yang dipengaruhi globalisasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, memperkecil perbedaan pertumbuhan kemakmuran antar wilayah atau antar daerah (perbedaan kemakmuran perkotaan dan perdesaan), dengan melakukan perencanaan fisik yang diterapkan secara terpadu dengan perencanaan sosial dan ekonomi serta berkaitan dengan lingkungan. Dan perpaduan perencanaan ini harus dilakukan dalam skala regional, yang mencakup kota dan daerah pedalaman sekitarnya (*urban conurbation*). Dimana kontribusi yang penting dari perencanaan wilayah adalah kaitan antara masalah sosial ekonomi dan lingkungan yang berhubungan dengan perubahan wilayah perkotaan dan perdesaan. Dalam usaha memperbaiki mutu hidup, harus dijaga agar kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi tidak merusak. Sebab kalau kerusakan terjadi, bukannya perbaikan mutu hidup yang akan dicapai melainkan justru kemerosotan. Bahkan jika kerusakan terlalu parah, dapat terjadi kepunahan kehidupan kita sendiri, paling sedikit ekosistem tempat hidup kita dapat mengalami kerusakan sehingga pembangunannya tidak berkelanjutan (Soemarwotto, 2001).

2.2.1 Teori Pembangunan dan Pengembangan Wilayah

Dalam pembangunan terdapat beberapa teori, yaitu : *pertama*, teori modernisasi yang menyatakan bahwa pembangunan merupakan cara paling dikenal dan paling berkuasa.

Kedua, teori ketergantungan sepihak (*dependency theory*), yang merupakan reaksi terhadap teori modernisasi. Teori ini adalah kebijakan mengenai hubungan internasional dalam perdagangan dan pembangunan, dan merupakan pengembangan dari sistem pusat – pinggiran (*centre – periphery sistem*), tetapi mendapat hambatan karena tidak tersedianya pasaran lokal dan karena ketergantungan teknologi. *Ketiga*, teori saling ketergantungan (*interdependency theory*) yang timbul karena kesadaran akan saling berhubungan di dunia dan sebagai akibat dari pembahasan Tata Ekonomi Baru Internasional.

2.2.2 Perencanaan dalam Pengembangan Wilayah.

Wilayah dalam perencanaan wilayah secara keseluruhan (*regional planning*) dapat menggunakan bermacam macam metode, seperti:

1. Pengembangan wilayah secara administratif atau secara geografis.
2. Pengembangan wilayah khusus, seperti pengembangan wilayah aliran sungai dan pengembangan wilayah pedesaan.
3. Pengembangan wilayah menurut sistem perkotaan yang berdasarkan suatu proses dalam ruang (*spatial process*) yaitu proses difusi dalam ruang (*spatial diffusion process*), yang meliputi konsep kutub pertumbuhan (*growth pole*), dan konsep agropolitan.

2.3 Konsep Pengembangan Wilayah

Terjadinya kesenjangan wilayah yang terjadi dalam pembangunan membutuhkan adanya konsep pengembangan wilayah. Konsep pengembangan wilayah yang ada pada dasarnya dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Konsep Pengembangan Wilayah Dari Atas (*Development From Above*), memandang pengembangan wilayah berasal dari inti atau pusat pertumbuhan dan mengucur (*trickling down*) ke peri peri atau daerah belakangnya (*hinterlands*).

2. Konsep Pengembangan Dari Bawah (*Development From Below*), merupakan bantahan dari teori pengembangan wilayah dari atas dan menyatakan bahwa wilayah dikontrol lembaganya sendiri untuk menciptakan gaya hidup yang diinginkan oleh wilayah tersebut.
3. Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (*Local Economic Development*), merupakan jalan tengah akibat gagalnya konsep pengembangan dari atas yang makin memperlebar kesenjangan antara pusat dan wilayah pinggirannya, yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya disintegrasi, karena keterkaitan dengan kegiatan ekonomi lokal yang sangat lemah. Sedangkan konsep pengembangan dari bawah sulit dilakukan karena suatu wilayah tidak mungkin menutup diri dari perkembangan wilayah yang lebih luas, kondisi ini disebabkan karena sifat dari faktor produksi seperti investasi dan tenaga kerja.

Pengembangan wilayah di masa yang akan datang merupakan suatu kerangka untuk tindakan tindakan bagi terbentuknya suatu pembangunan lokal (*local development*), yang diartikan sebagai penumbuhan suatu lokalitas secara sosial ekonomi dengan lebih mandiri, berdasarkan potensi potensi yang dimilikinya, baik sumber daya alam, geografis, kelembagaan maupun yang lainnya. Pada konteks sosio – ekonomi dan budaya yang berbeda, di Eropa Barat pengembangan wilayah dengan basis pada *local development*, telah berhasil menciptakan distrik distrik industri yang pesat dan mandiri.

Orientasi pengembangan wilayah seharusnya memiliki perspektif jangka panjang, karena telah terintegrasinya bagian bagian dunia menjadi suatu ekonomi global maka syarat ketahanan (*survival*) bagi suatu wilayah adalah harus mempunyai akses dan cukup kompetitif. Artinya wilayah harus mampu menempatkan diri dalam jaringan (*networking*) ekonomi nasional dan global. Dimana keterkaitan kota kota dapat mendatangkan manfaat tertentu bagi kota kota itu dan juga lingkungan sekitar. Dan pembentukan sistem kota kota ini seringkali terjadi secara berhierarkis.

2.3.1 Tinjauan Empirik Pengembangan Wilayah Pembangunan

Sebagaimana hasil dari penelitian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain penelitian tentang kebijakan pembangunan prasarana kota yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Cirebon efektif dalam mendukung kinerja pusat pertumbuhan yang dilakukan oleh Yudi Yustiawan, namun efektifitas ini perlu disertai kemampuan kota pusat pertumbuhan untuk menarik investasi sektor industri. Berkembangnya suatu kota yang ditandai dengan berkembangnya perekonomian melalui masuknya arus investasi dan berkembangnya sektor industri, perdagangan dan jasa serta perkembangan penduduk yang bermigrasi untuk mengisi kesempatan kerja yang timbul akibat perkembangan ekonomi yang didukung oleh tingkat kelengkapan prasarana kota yang mencukupi, terutama yang menghubungkan kota pusat wilayah pembangunan dengan daerah dibelakang (Parr: 1999). Penelitian lainnya dilakukan oleh Saudara Wahyudi Pontjo N, yang melakukan penelitian di Kota Kajen yang memiliki pertumbuhan lambat, untuk meningkatkan pertumbuhannya perlu adanya peningkatan kegiatan ekonomi yang didukung oleh sarana dan prasarana perkotaan terutama jaringan jalan yang mempermudah pencapaian

Faktor yang berpengaruh dalam penetapan strategi pusat pertumbuhan agar berjalan secara optimal selain pemusatan prasarana kota pada pusat pertumbuhan yang meliputi prasarana jalan terutama yang menghubungkan pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya, juga adanya konsentrasi atau aglomerasi aktivitas ekonomi di kota pusat pertumbuhan terutama industri yang memiliki kaitan ke depan dan belakangnya (*forward dan backward linkage*). Dimana daerah dan kutub yang direncanakan terutama didasarkan pada kebijakan spasial untuk mengembangkan kutub pertumbuhan dengan melihat aspek keuntungan komparatif daerah kependudukan dan kinerja ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Saudara Rina Esti Wulandari yang

menyebutkan perlu adanya kegiatan produksi potensial yang memiliki kemampuan *linkage* yang didukung kemudahan akses dan intervensi kebijakan pemerintah. Dimana keterkaitan kota kota dapat mendatangkan manfaat tertentu bagi kota kota itu dan juga lingkungan sekitar.

Kondisi budaya dan geografis yang berbeda antara wilayah yang satu dengan lainnya, mengakibatkan terjadi perbedaan perkembangan antara wilayah satu dengan yang lainnya. Kabupaten Cilacap memiliki kondisi geografis yang beragam. Secara umum Kabupaten Cilacap bila dilihat dari arah barat laut merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian lebih dari 100 m (dpl) dengan puncak tertinggi ada di Kecamatan Dayeuhluhur. Selanjutnya ke arah Tenggara terbagi dua, bagian utara berupa pegunungan dan bagian selatan berupa dataran miring landai ke arah barat daya – selatan dan berbatasan dengan Segara Anakan. Bagian timur berupa dataran dan dibagian selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Sehingga, Sebagaimana hasil dari penelitian Saudara Bambang Wicaksono dan penelitian yang dilakukan oleh Saudara Darusman bahwa dalam pengembangan wilayah perlu adanya konsep pengembangan wilayah yang sesuai dengan kondisi geografis dan karakteristik yang ada. Salah satunya dengan pengembangan sistem transportasi darat dan laut. Hal ini hampir sama dengan yang dibutuhkan Kabupaten Cilacap dalam pengembangan wilayahnya.

2.3.2 Perkembangan Wilayah

Perkembangan wilayah tidak hanya melihat dari fisik semata tetapi juga memandang eksistensi kehidupan sosial ekonomi yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Perkembangan wilayah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang pada awalnya dipicu oleh adanya pasar yang dapat menyerap hasil produksi wilayah yang bersangkutan. Faktor-faktor internal ini meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Pengaruh eksternal dalam pertumbuhan

wilayah didekati melalui teori basis ekspor (*export base theory*). Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan suatu wilayah dipengaruhi oleh eksplotasi sumber daya alam dan pertumbuhan basis ekspor wilayah yang bersangkutan serta dipengaruhi oleh tingkat permintaan eksternal dari wilayah lainnya. Pendapatan yang diperoleh dari ekspor akan mengakibatkan berkembangnya kegiatan-kegiatan penduduk setempat, perpindahan modal dan tenaga kerja. Pengaruh-pengaruh eksternal dapat mempengaruhi pertumbuhan wilayah secara optimal jika faktor/variabel utama yaitu pola pendapatan dan pengeluaran sektor ekspor, inisiatif bisnis lokal, dan peranan pemerintah diusahakan secara maksimal (Richardson, 2001:44).

Keberhasilan Itali dan Spanyol dalam melakukan program *networking* bagi pengembangan wilayah dan ekonomi lokal patut dipelajari. Mereka cukup berhasil dalam mempertahankan dan mengembangkan industri industri tradisionalnya seperti kulit dan keramik yang mengalami persaingan ketat dari negara negara berkembang. Program ini pada gilirannya telah berhasil menciptakan distrik distrik industri (*industrial district*) yang didalamnya terjadi interaksi yang solid antar pelaku pelaku pengembangan industri. Perkembangan *technopoles* di negara negara maju, seperti Jerman, Jepang, Perancis dan Amerika Serikat, yang pada hakekatnya adalah pusat pusat industri dengan elemen elemen penunjang seperti perguruan tinggi, lembaga riset iptek, perbankan, yang terintegrasi dan beroperasi dengan inovatif (M. Castell dan P. Hall, 1994 dalam Tommy Firman 1995).

Tidak kalah menariknya adalah Pengembangan Wilayah Senzhen sebagai *Special Economic Zone* dan *Regionalisasi Pearl River Delta* (PRD/Delta Sungai Mutiara) berhasil dalam pengembangan wilayahnya, karena telah memiliki konsep pembangunan yang jelas sebelum pembangunan dilaksanakan. Dimana dalam pengembangan wilayahnya dilakukan:

1. Rencana pembangunan yang komprehensif dan terpadu.

2. Jaminan kepastian hukum dan stabilitas bagi investasi dunia usaha
3. Menggali keanekaragaman komoditas dan spesialisasi produk, dengan orientasi utama ekspor (walaupun sebelumnya diserap oleh pasar dalam negeri.)
4. Pembagian yang adil terhadap peran dan fungsi masing masing wilayah/kota
5. Penyediaan infrastruktur yang terintegrasi bagi berbagai peruntukan
6. kemudahan perijinan dan birokrasi pelayanan kepada masyarakat
7. Manajemen lahan yang optimal
8. Pemberian kemudahan/keringanan pajak, bea dan beban usaha secara bijaksana
9. ketaatan terhadap *masterplan* yang telah ditetapkan
10. Revitalisasi peran pemerintah dalam mengontrol dan memfasilitasi usaha kecil dan menengah
11. Pembentukan dan pengembangan sikap mental wirausaha
12. Insentif dan kompensasi bagi masyarakat yang menjadi korban pembangunan
13. Adanya keterbukaan untuk menjalin kerjasama dan pembelajaran dengan wilayah/daerah dan negara lain
14. Terbukanya akses informasi

2.4 Pengembangan Wilayah di Indonesia

Pengembangan Wilayah di Indonesia relatif masih baru, yaitu di mulai pada dasa warsa “80 dan “90. Ditandai dengan kehadiran Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten, yang bersifat *top – down* dan mengandalkan investasi dari luar sebagai pendorong. Pengembangan wilayah di Indonesia sangat penting dalam mendampingi pembangunan nasional. Tujuan pengembangan wilayah sangat bergantung pada permasalahan serta karakteristik spesifik wilayah yang terkait, namun pada dasarnya ditujukan pada pendayagunaan potensi serta manajemen sumber sumber daya melalui

pembangunan perkotaan, pedesaan dan prasarana untuk peningkatan kondisi sosial dan ekonomi wilayah tersebut.

Masalah pokok yang dihadapi sekarang adalah bukan ada atau tidak adanya kesenjangan wilayah, namun bagaimana perkembangan wilayah dapat dikonsepsikan dalam perspektif jangka panjang. Dalam konteks perkembangan sosial ekonomi dewasa ini, maka arah yang dituju dalam pembangunan wilayah jangka panjang adalah wilayah harus mandiri dan cukup memiliki daya saing sehingga mampu berintegrasi ke dalam sistem perekonomian nasional maupun global. Salah satu upaya yang sangat strategis adalah memobilisasi seluruh kelembagaan pembangunan di wilayah serta menciptakan interaksi yang erat melalui *networking* di antara kelembagaan tersebut dengan tujuan menciptakan kemampuan dan kemandirian ekonomi wilayahnya.

2.4.1 Permasalahan Perkembangan Wilayah

Masalah pengembangan wilayah tidak lepas dari masalah yang dihadapi akibat berkembangnya suatu kota. Perkembangan wilayah selain menimbulkan dampak positif seperti aliran modal dan meningkatnya kesempatan kerja, juga memiliki dampak negatif, antara lain : kemerosotan kualitas lingkungan, terjadinya kesenjangan wilayah dan masalah sosial lainnya.

Menurut Kartasmita (1995) dalam Badrul Munir (2002), permasalahan umum pembangunan daerah adalah:

1. Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mencurahkan dana yang lebih besar dalam pembangunan sarana dan prasarana sosial, ekonomi, dan membuka isolasi daerah;
2. Keterbatasan sumber daya manusia di wilayah terbelakang, yang antara lain menjadi penyebab dan sekaligus akibat keterbelakangan itu;

3. Masih lemahnya semangat dan kemampuan bersaing dalam menghadapi sistem ekonomi yang terbuka dan tantangan globalisasi;
4. Sulitnya menarik investasi swasta sebagai sumber dan memacu pertumbuhan wilayah, terutama investasi yang membuka kesempatan kerja dengan *multiplier effect* yang besar.

Dalam pandangan lain, Sumodiningrat (1998), melihat persoalan dalam pembangunan daerah di Indonesia bukan melulu akibat ketidaktepatan perencanaan, tetapi persoalan juga muncul dalam pelaksanaan dan koordinasi.

Sedangkan menurut Eko Budihardjo, 1997, pada dasarnya struktur, bentuk dan wajah serta penampilan kota, merupakan hasil dari penyelesaian konflik perkotaan yang selalu terjadi, dan mencerminkan perkembangan peradaban warga kota maupun pengelolanya. Dan dari pengamatan selama ini, dapat ditemukeni beberapa kelemahan daalam proses perencanaan, implementasi dan pengelolaan pembangunan dan lingkungan hidup di Indonesia sebagai berikut:

1. Perencanaan selalu berorientasi pada pencapaian tujuan ideal jangka panjang, yang sering meleset akibat banyaknya ketidakpastian (*uncertainties*), disisi lain terdapat jenis perencanaan yang disusun dengan landasan pemikiran pemecahan masalah secara *ad hoc* yang berjangka pendek, kurang berwawasan luas.
2. Keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan selama ini terkesan sekedar sebagai slogan atau hiasan bibir belaka, belum mengejawantah dalam kenyataan.
3. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup masih sangat terbatas.
4. Tipisnya wibawa dan kekuatan hukum suatu produk rencana tata ruang.

Pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Indonesia berlangsung secara lebih pesat, dan sebagai konsekuensinya maka terdapat disparitas atau perbedaan perkembangan antar kota dan desa. Selain itu sebagai akibat adanya prioritas pembangunan dan kondisi dari kota-kota itu sendiri mengakibatkan terjadinya perbedaan perkembangan antara kota-kota itu sendiri maupun dalam suatu wilayah. Baik itu mengenai masalah kurang meratanya penyediaan berbagai pelayanan kota seperti fasilitas dan utilitas kota, distribusi perekonomian kota, dan kurang meratanya persebaran penduduk kota.

2.4.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perkembangan Wilayah

Pengembangan wilayah (*regional development*) sebagai upaya memacu perkembangan sosio-ekonomi, mengurangi kesenjangan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah, sangat diperlukan karena kondisi sosial-ekonomi, budaya dan geografis yang berbeda antara wilayah yang satu dengan lainnya. Perbedaan-perbedaan penting antar kota atau wilayah sangat menarik untuk di kaji lebih jauh.

Masuknya investasi pada pusat-pusat perkotaan berpotensi meningkatkan kesenjangan wilayah yang menjadi masalah utama dalam pengembangan wilayah. Diakui bahwa pada saat ini di Indonesia belum banyak kajian antar wilayah untuk mendeteksi masalah kesenjangan wilayah. Ukuran kesenjangan wilayah seyogyanya tidak hanya didasarkan pada indikator statis seperti indeks pembangunan manusia (*human development index*) atau indeks kualitas kehidupan secara fisik (*physical quality of life index*) maupun laju pertumbuhan PDRB (*product domestic regional bruto*), namun juga harus dilengkapi dengan indikator-indikator dinamis yang harus dikaji secara antar wilayah (*interregional*), seperti aliran modal (investasi), komoditas dan penduduk (Tommy Firman, 1995).

Perkembangan wilayah kaitannya dalam kualitas hidup manusia berkembang cepat ditandai dengan semakin besar dan meningkatnya kejadian-kejadian. Menurut Badrul Munir

2002, pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik setiap daerah, meliputi kondisi fisik, sosial dan budaya. Akibatnya laju perkembangan setiap daerah pun berbeda beda.

Pada umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah meliputi:

- a. Faktor Fisik, terdiri dari struktural alam, yaitu kondisi topografi tanah, ketersediaan sarana prasarana masyarakat, dan aksesibilitas kawasan baik di dalam maupun yang menghubungkan antar kawasan.
- b. Faktor Ekonomi, meliputi kedekatan dengan pusat kota, penyediaan lapangan kerja, dan keberadaan pusat-pusat kegiatan perekonomian seperti pasar, pertokoan dan perbankan.
- c. Faktor Sosial, meliputi ketersediaan pusat kegiatan masyarakat, keamanan lingkungan dan meningkatnya penghasilan.
- d. Faktor Eksternal Kawasan, meliputi investasi swasta, keterkaitan dengan kawasan lain.

Perkembangan suatu kota juga dipengaruhi oleh perkembangan dan kebijakan ekonomi. Hal ini disebabkan karena perkembangan kota pada dasarnya adalah wujud fisik perkembangan ekonomi (Firman, 1996). Kegiatan sekunder dan tersier seperti manufaktur dan jasa-jasa cenderung untuk berlokasi di kota-kota karena faktor "*urbanization economics*" yang diartikan sebagai kekuatan yang mendorong kegiatan usaha untuk berlokasi di kota sebagai pusat pasar, tenaga kerja ahli, dan sebagainya.

Pertumbuhan dan perkembangan lebih sering dilihat dari aktivitas penduduknya. Semakin beragam aktivitas penduduk suatu kota semakin cepat pula kota berkembang. Berkembangnya suatu kota yang ditandai dengan berkembangnya perekonomian melalui masuknya arus investasi dan berkembangnya sektor industri, perdagangan dan jasa serta

perkembangan penduduk yang bermigrasi untuk mengisi kesempatan kerja yang timbul akibat perkembangan ekonomi yang didukung oleh tingkat kelengkapan prasarana kota yang mencukupi, terutama yang menghubungkan kota pusat wilayah pembangunan dengan daerah dibelakang (Parr: 1999).

2.4.2.1 Faktor Pendorong Perkembangan

a. Intervensi kebijakan pemerintah yang efektif

Intervensi kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung perkembangan kawasan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasarannya, yang ditentukan oleh beberapa faktor yang berkenaan dengan proses perumusan dan implementasinya (Mayer dan Greenwood, 1984). Upaya pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan pusat-pusat pelayanan kota tidak lepas dari kegiatan berbagai sektor produktif sebagai wujud nyata dari usaha-usaha pembangunan itu sendiri. Dan hal ini tidak terlepas dari ketersediaan investasi dan dana untuk membiayai kegiatan pembangunan tersebut. Dengan demikian maka faktor kebijakan pengembangan sektor-sektor produktif termasuk di dalamnya aspek ketergantungan investasi dan dana untuk pembiayaan pembangunan perlu dikaji karena faktor-faktor tersebut mempunyai peranan penting dalam menunjang usaha-usaha pengembangan wilayah yang dilakukan melalui strategi pusat-pusat perkotaan (Djalante, 1996).

b. Keterkaitan antar kawasan

Kota merupakan suatu kesatuan sistem pelayanan kota yang beragam fungsinya dan saling bergantung satu sama lain. Dalam pengembangan kota, proses saling keterhubungan dari berbagai fungsi ini dibentuk oleh keterkaitan yang terjadi di antara berbagai pusat-pusat pelayanan kota yang terdapat dalam suatu ruang kota. Keterkaitan antar berbagai fungsi dalam suatu ruang kota pada dasarnya tidak terlepas dari ketersediaan jaringan transportasi yang ada (Djalante, 1996).

c. Tersedianya fasilitas perkotaan

Pusat-pusat perkotaan bisa berjalan seperti yang diharapkan maka setiap pusat harus mempunyai fungsi dan peran yang jelas dalam sistem yang tersusun secara hirarkis. Hal ini menuntut disediakan berbagai fasilitas sosial dan ekonomi yang akan menunjang terlaksananya fungsi dan peran tersebut (Djalante, 1996). Berjalannya fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan yang didukung ketersediaan fasilitas sosial ekonomi tersebut pada gilirannya akan mampu mendorong perkembangan ke seluruh wilayah pengaruhnya.

2.4.2.2 Faktor Penghambat Perkembangan

Pembangunan merupakan daya tarik yang akan menciptakan konsentrasi pembangunan ekonomi di sekitar wilayah kota di mana pembangunan tersebut bermula. Terjadinya konsentrasi pembangunan disebabkan oleh faktor-faktor yang timbul di kawasan maju yang akan mempengaruhi dan menghambat pembangunan di kawasan yang tertinggal. Faktor-faktor yang menghambat tersebut disebutnya sebagai efek polarisasi atau pengaruh pemusatan.

Adapun faktor-faktor penghambat perkembangan kawasan yaitu:

a. Kebijakan pemerintah yang tidak efektif

Disparitas akan semakin melebar jika segmentasi penataan ruang dilakukan berdasarkan pertimbangan sektoral semata tanpa adanya upaya untuk mempertimbangkan heterogenitas tata guna lahan yang ada, sehingga menyebabkan terkelompoknya kawasan maju yang terpisah dari kelompok kawasan tertinggal (Williamson, 1960).

b. Lemahnya keterkaitan antar kawasan

Suatu kawasan yang tidak memiliki saluran transportasi dan komunikasi yang baik dengan pusat kotanya akan membuat kawasan itu kurang berkembang. Hal ini bisa terjadi karena isolasi alamiah (misalnya karena dipisahkan oleh laut, pegunungan atau sungai

besar), akibat pola jaringan jalan yang kurang mendukung, ataupun karena kekurangan sarana komunikasi dan transportasi (Siswanto, 2002).

c. Ketidakterediaan fasilitas sosial ekonomi

Pusat-pusat perkotaan bisa berjalan seperti yang diharapkan maka setiap pusat harus mempunyai fungsi dan peran yang jelas dalam sistem yang tersusun secara hirarkis. Hal ini menuntut disediakannya berbagai fasilitas sosial dan ekonomi yang akan menunjang terlaksananya fungsi dan peran tersebut (Djalante, 1996). Pusat-pusat perkotaan yang tanpa didukung ketersediaan fasilitas sosial ekonomi tersebut, fungsi dan perannya tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga pada gilirannya tidak mampu merangsang dan mendorong perkembangan dan perkembangan ke seluruh wilayah pengaruhnya.

2.4.3 Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan

Menurut Friedmann, pusat-pusat pertumbuhan harus dapat berperan dalam kegiatan (Friedmann, 1966) :

1. Mengkoordinasi kemajuan daerah dalam suatu sistem dengan memperhatikan daerah-daerah pendukung pasaran dan pelayanan administratif.
2. Untuk memudahkan koordinasi tersebut, ada jenjang pusat yang menentukan posisi pusat pertumbuhan.
3. Pusat pertumbuhan harus membawa pengaruh pembaharuan kepada daerah-daerah pengaruhnya.

Pusat pertumbuhan berperan sebagai pendorong pengembangan ekonomi wilayah pinggiran kota, menyebabkan perpindahan sebagian penduduk dari luar wilayah pusat pertumbuhan ke pusat pertumbuhan karena daya tarik dari pusat pertumbuhan dan daya tolak wilayah di sekitar pusat pertumbuhan. Peranan pusat-pusat pertumbuhan yang lain adalah : (Misra dalam Kuklinski, 1972)

1. Sebagai pusat industri dari daerah-daerah yang dilayani, sehingga memiliki fasilitas-fasilitas untuk kegiatan industri, pengolahan hasil pertanian (agro industri) dan fasilitas umum.
2. Sebagai alat penahan guncangan (*shock absorbers*) dalam proses migrasi yaitu menampung penduduk dari luar pusat pertumbuhan yang bermigrasi ke wilayah pusat pertumbuhan tersebut dan menyediakan lapangan pekerjaan.
3. Sebagai penarik tandingan (*counter magnet*) terhadap pusat-pusat perkotaan yang lebih besar.
4. Membantu distribusi barang (barang jadi dan setengah jadi) dan hasil-hasil pertanian dari pusat-pusat pelayanan yang lebih kecil.

Seperti teori Weber (aglomerasi), teori tempat sentral (Christaller dan Losch), teori kutub pertumbuhan (Perroux), dan teori daerah inti (Friedmann), Poernomosidi menekankan pula pentingnya peranan pusat-pusat, yang selanjutnya diidentifikasi sebagai simpul-simpul jasa distribusi (pada umumnya adalah kota). Menurut Poernomosidi Hadjisarora, pengembangan wilayah dimungkinkan oleh adanya pertumbuhan modal, yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, pengembangan kedua jenis sumber daya tersebut berlangsung sedemikian rupa sehingga menimbulkan arus barang.

Poernomosidi berpendapat bahwa kriteria yang dipilih untuk menyatakan tingkat pertumbuhan sesuatu daerah adalah tingkat kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya, baik berupa kebutuhan hidup maupun berupa kebutuhan untuk melakukan kegiatan usaha; pemakaian kriteria pendapatan daerah (perkapita) sangat sukar untuk mencari kaitannya dengan mekanisme pengembangan wilayah, selain daripada itu pendapatan belum memberikan gambaran yang memadai

tentang kebutuhan sebenarnya dari masyarakat; pendapatan tinggi belum berarti suatu kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhannya. Di kota-kota terdapat berbagai kemudahan, yang diartikan sebagai kesempatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Semakin tinggi tingkat kemudahan pada suatu tempat, semakin kuat daya tariknya mengundang manusia dan kegiatan ekonomi untuk datang ke tempat tersebut. Di antara kemudahan-kemudahan tersebut jasa distribusi merupakan unsur yang sangat penting. Tingkat interaksinya ditunjukkan dari tingkat kepadatan arus barang. Semakin kuat ciri-ciri simpul berarti semakin luas dan jauh jangkauan wilayah pengaruhnya. Lebih dekat pada simpul berarti lebih banyak jenis barang yang terjangkau oleh pelayanan pemasaran, yang berarti pula lebih besar kesempatan yang tersedia untuk perkembangan kegiatan usaha. Interaksi antar simpul tersebut menunjukkan korelasi negatif dengan jarak. Karena simpul merupakan pula konsentrasi penduduk, maka dapat dikatakan bahwa interaksi antar simpul berkorelasi terhadap jumlah penduduk.

2.4.4 Faktor Faktor Penilai Perkembangan Pusat Pertumbuhan

Beberapa penelitian tentang pusat pertumbuhan mempergunakan faktor-faktor tertentu untuk menilai perkembangan pusat pertumbuhan di suatu wilayah, sehingga dapat diketahui sejauh mana keberhasilan suatu pusat atau sub pusat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan. Beberapa faktor penilai yang dianggap sangat menentukan tingkat perkembangan pusat-pusat wilayah pembangunan adalah :

1. Pemusatan Penduduk

Pemusatan penduduk pada suatu pusat berhubungan erat dengan penyediaan tenaga kerja. Pemusatan penduduk pada suatu lokasi dapat merupakan satu indikator terjadinya pemusatan kegiatan sosial ekonomi. Kecenderungan pemusatan penduduk terjadi pada daerah yang dianggap "nyaman" dalam arti yang luas, seperti kemudahan kemudahan

terhadap fasilitas dan kondisi lingkungan yang baik. Menurut Hyot (dalam Hadi Sabari, 2002) pemusatan penduduk memiliki kecenderungan berkembang yang disebabkan antara lain oleh jalur transportasi atau komunikasi, memiliki kondisi lingkungan yang baik seperti bebas dari banjir, dekat dengan fasilitas fasilitas sosial dan perekonomian.

2. Kegiatan Ekonomi

Peranan kegiatan ekonomi adalah sangat penting untuk menunjang berfungsinya pusat-pusat pertumbuhan tersebut sebagai pusat pengolahan dan pusat pengumpul hasil-hasil produksi daerah belakangnya. Untuk menghemat ongkos produksi dan pemasaran, maka kegiatan ekonomi cenderung mengelompok pada suatu lokasi. Potensi industri yang terdapat pada suatu pusat dapat mencerminkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh pusat tersebut (apakah merupakan sektor basis atau non basis). Kegiatan industri itu menciptakan lapangan kerja dan menaikkan pendapatan baik bagi penduduk di pusat pertumbuhan dan sekitarnya.

3. Kelengkapan Fasilitas Sosial Ekonomi

Kelengkapan fasilitas sosial ekonomi yang ada di suatu pusat dapat merupakan suatu potensi bagi berkembangnya pusat tersebut, karena masyarakat di pusat tersebut makin mudah memenuhi kebutuhannya.

4. Tingkat Daya Hubung (Aksesibilitas)

Semakin tingginya tingkat daya hubung suatu pusat dengan pusat-pusat atau daerah lainnya, makin mudah pula penduduknya melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan serta usaha-usaha produktif. Sehingga dapat dikatakan semakin tinggi tingkat daya hubung suatu pusat, makin mudah pula berkembangnya pusat tersebut.

Sedangkan menurut Parr (1999) ada 3 (tiga) faktor yang berpengaruh dalam penetapan strategi pusat pertumbuhan agar berjalan secara optimal adalah:

1. Pemusatan prasarana kota pada pusat pertumbuhan yang meliputi prasarana jalan terutama yang menghubungkan pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya.
2. Konsentrasi atau aglomerasi aktivitas ekonomi di kota pusat pertumbuhan terutama industri yang memiliki kaitan ke depan dan belakangnya (*forward dan backward linkage*).
3. Daerah dan kutub yang direncanakan, hal ini terutama didasarkan pada kebijakan spasial untuk mengembangkan kutub pertumbuhan dengan melihat aspek keuntungan komparatif daerah kependudukan dan kinerja ekonomi daerah.

2.5 Ringkasan Teori

Berdasarkan kajian teori tentang pusat-pusat pertumbuhan kota sebagai bahan untuk studi Evaluasi Perkembangan Pusat-pusat Wilayah Pembangunan di Kabupaten Cilacap, maka dapat dirangkum sebagai berikut :

Masalah pokok yang dihadapi sekarang adalah bukan ada atau tidak adanya kesenjangan wilayah, namun bagaimana perkembangan wilayah dapat dikonsepsikan dalam perspektif jangka panjang. Dalam konteks perkembangan sosial ekonomi dewasa ini, maka arah yang dituju dalam pembangunan wilayah jangka panjang adalah wilayah harus mandiri dan cukup memiliki daya saing sehingga mampu berintegrasi ke dalam sistem perekonomian nasional maupun global.

Pada umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu kawasan meliputi:

- a. Faktor Fisik, terdiri dari Struktural Alam, yaitu kondisi topografi tanah, ketersediaan sarana prasarana masyarakat, dan aksesibilitas kawasan baik di dalam maupun yang menghubungkan antar kawasan.

- b. Faktor Ekonomi, meliputi kedekatan dengan pusat kota, penyediaan lapangan kerja, dan keberadaan pusat-pusat kegiatan perekonomian seperti pasar, pertokoan dan perbankan.
- c. Faktor Sosial, meliputi ketersediaan pusat kegiatan masyarakat, keamanan lingkungan dan meningkatnya penghasilan.
- d. Faktor Eksternal Kawasan, meliputi investasi swasta, keterkaitan dengan kawasan lain.

Perkembangan suatu wilayah ditandai dengan berkembangnya perekonomian melalui masuknya arus investasi dan berkembangnya sektor industri, perdagangan dan jasa, serta berkembangnya penduduk yang bermigrasi untuk mengisi kesempatan kerja yang timbul akibat perkembangan ekonomi yang didukung oleh tingkat kelengkapan prasarana kota yang mencukupi terutama yang menghubungkan kota pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya (Parr, 1999). Perkembangan kota yang terjadi pada gilirannya nanti akan turut mengembangkan wilayah secara keseluruhan.

Pengembangan wilayah yang sangat didasarkan pada kekuatan luar (*external force*) khususnya investasi swasta, sangat rawan bagi wilayah itu sendiri. Bukan berarti hal ini harus ditolak, karena bagaimanapun kehadirannya diperlukan dalam pengembangan wilayah. Singkat kata, anggapan bahwa investasi swasta sebagai penggerak utama bagi pengembangan wilayah sering keliru, karena hal itu tidak otomatis mampu mendorong pengembangan wilayah. Keuntungan lokasi serta ketersediaan prasarana yang dimiliki sangat menarik para investor untuk menanamkan modalnya pada pusat-pusat perkotaan tersebut, sehingga potensi kesenjangan cenderung akan naik bila tidak ada intervensi pemerintah.

Berkembangnya suatu wilayah dipengaruhi oleh keuntungan lokasi (kondisi geografis dan karakteristik), yang didukung oleh ketersediaan prasarana terutama yang

menghubungkan kota pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya yang mengakibatkan munculnya kegiatan ekonomi yang diikuti perkembangan penduduk, dan perkembangan ini akan lebih cepat apabila ada intervensi pemerintah berupa kebijakan yang menjadikannya pusat pertumbuhan.

Beberapa faktor penilai yang dianggap sangat menentukan tingkat perkembangan pusat-pusat wilayah pembangunan adalah:

1. Pemusatan Penduduk

Pemusatan penduduk pada suatu pusat berhubungan erat dengan penyediaan tenaga kerja. Pemusatan penduduk pada suatu lokasi dapat merupakan satu indikator terjadinya pemusatan kegiatan sosial ekonomi. Kecenderungan pemusatan penduduk terjadi pada daerah yang dianggap “nyaman” dalam arti yang luas, seperti kemudahan kemudahan terhadap fasilitas dan kondisi lingkungan yang baik. Menurut Hyot (dalam Hadi Sabari, 2002) pemusatan penduduk memiliki kecenderungan berkembang yang disebabkan antara lain oleh jalur transportasi atau komunikasi, memiliki kondisi lingkungan yang baik seperti bebas dari banjir, dekat dengan fasilitas fasilitas sosial dan perekonomian.

2. Kegiatan Ekonomi

Peranan kegiatan ekonomi adalah sangat penting untuk menunjang berfungsinya pusat-pusat pertumbuhan tersebut sebagai pusat pengolahan dan pusat pengumpul hasil-hasil produksi daerah belakangnya. Untuk menghemat ongkos produksi dan pemasaran, maka kegiatan ekonomi cenderung mengelompok pada suatu lokasi. Potensi industri yang terdapat pada suatu pusat dapat mencerminkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh pusat tersebut (apakah merupakan sektor basis atau non basis). Kegiatan industri itu menciptakan lapangan kerja dan menaikkan pendapatan baik bagi penduduk di pusat pertumbuhan dan sekitarnya.

3. Kelengkapan Fasilitas Sosial Ekonomi

Kelengkapan fasilitas sosial ekonomi yang ada di suatu pusat dapat merupakan suatu potensi bagi berkembangnya pusat tersebut, karena masyarakat di pusat tersebut makin mudah memenuhi kebutuhannya.

4. Tingkat Daya Hubung (Aksesibilitas)

Semakin tingginya tingkat daya hubung suatu pusat dengan pusat-pusat atau daerah lainnya, makin mudah pula penduduknya melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan serta usaha-usaha produktif. Sehingga dapat dikatakan semakin tinggi tingkat daya hubung suatu pusat, makin mudah pula berkembangnya pusat tersebut.

Sedangkan menurut Parr (1999) ada 3 (tiga) faktor yang berpengaruh dalam penetapan strategi pusat pertumbuhan agar berjalan secara optimal adalah:

1. Pemusatan prasarana kota pada pusat pertumbuhan yang meliputi prasarana jalan terutama yang menghubungkan pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya.
2. Konsentrasi atau aglomerasi aktivitas ekonomi di kota pusat pertumbuhan terutama industri yang memiliki kaitan ke depan dan belakangnya (*forward dan backward linkage*).
3. Daerah dan kutub yang direncanakan, hal ini terutama didasarkan pada kebijakan spasial untuk mengembangkan kutub pertumbuhan dengan melihat aspek keuntungan komparatif daerah kependudukan dan kinerja ekonomi daerah.

2.5.1 Variabel yang Digunakan

Berdasarkan kajian literatur dan observasi pendahuluan di lapangan maka didapat beberapa faktor yang mempengaruhi berkembangnya pusat wilayah pembangunan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kabupaten Cilacap, yaitu:

1. Kondisi Perekonomian Wilayah

Perkembangan suatu wilayah ditandai dengan berkembangnya perekonomian melalui masuknya arus investasi dan berkembangnya sektor industri, perdagangan dan jasa. Peranan kegiatan ekonomi adalah sangat penting untuk menunjang berfungsinya pusat-pusat pertumbuhan tersebut sebagai pusat pengolahan dan pusat pengumpul hasil-hasil produksi daerah belakangnya. Untuk menghemat ongkos produksi dan pemasaran, maka kegiatan ekonomi cenderung mengelompok pada suatu lokasi. Misalnya kegiatan industri baru, cenderung berlokasi pada tempat yang telah terdapat kegiatan industri lain sebelumnya. Potensi industri yang terdapat pada suatu pusat dapat mencerminkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh pusat tersebut (apakah merupakan sektor basis atau non basis). Kegiatan industri itu menciptakan lapangan kerja dan menaikkan pendapatan baik bagi penduduk di pusat pertumbuhan dan sekitarnya.

2. Pemusatan Penduduk

Penilaian terhadap pemusatan penduduk dengan dasar pertimbangan bahwa pemusatan penduduk pada suatu pusat merupakan suatu sumber daya manusia yang berhubungan erat dengan penyediaan tenaga kerja. Makin besar jumlah penduduk suatu pusat makin besar pula tenaga kerja yang tersedia dan harus ditampung dalam penyediaan lapangan kerja baru. Pemusatan penduduk pada suatu lokasi dapat merupakan satu indikator terjadinya pemusatan kegiatan sosial ekonomi. Mobilitas penduduk (migrasi) ke suatu wilayah akan dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki daya tarik aktivitas bagi masyarakat. Selain itu pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di suatu wilayah juga merupakan indikasi bahwa pertumbuhan wilayah tersebut baik.

3. Kelengkapan Fasilitas Sosial Ekonomi

Kelengkapan fasilitas sosial ekonomi yang ada di suatu pusat dapat merupakan suatu potensi bagi berkembangnya pusat tersebut, karena masyarakat di pusat tersebut makin mudah memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, kelengkapan fasilitas sosial ekonomi pada suatu pusat pertumbuhan dapat mencerminkan tingkat perkembangan pusat tersebut.

4. Tingkat Daya Hubung (Aksesibilitas)

Penilaian terhadap tingkat daya hubung ini dilakukan dengan anggapan bahwa makin tingginya tingkat daya hubung suatu pusat dengan pusat-pusat atau daerah lainnya, makin mudah pula penduduknya melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan serta usaha-usaha produktif. Sehingga dapat dikatakan semakin tinggi tingkat daya hubung suatu pusat, makin mudah pula berkembangnya pusat tersebut. Artinya wilayah harus mampu menempatkan diri dalam jaringan (*networking*) ekonomi nasional dan global. Dimana keterkaitan kota kota dapat mendatangkan manfaat tertentu bagi kota kota itu dan juga lingkungan sekitar. Artinya wilayah harus mampu menempatkan diri dalam jaringan (*networking*) ekonomi nasional dan global. Dimana keterkaitan kota kota dapat mendatangkan manfaat tertentu bagi kota kota itu dan juga lingkungan sekitar.

5. Intervensi Kebijakan Pemerintah

Perkembangan ini akan lebih cepat apabila ada intervensi kebijakan yang efektif dari pemerintah, berupa kebijakan spasial untuk mengembangkan kutub pertumbuhan dengan melihat aspek keuntungan komparatif daerah kependudukan dan kinerja ekonomi daerah.

6. Keuntungan lokasi (kondisi geografis dan karakteristik)

Kondisi budaya dan geografis yang berbeda antara wilayah yang satu dengan lainnya,

mengakibatkan terjadi perbedaan perkembangan antara wilayah satu dengan yang lainnya. Karena pada dasarnya pengembangan wilayah selain untuk mengurangi kesenjangan, dan memiliki perspektif jangka panjang, karena telah terintegrasinya bagian bagian dunia menjadi suatu ekonomi global maka syarat ketahanan (*survival*) bagi suatu wilayah adalah harus mempunyai akses dan cukup kompetitif, juga diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup pada wilayah tersebut.

TABEL II.1
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERKEMBANGAN WILAYAH

NO	FAKTOR YANG BERPENGARUH	REFERENSI	KRITERIA
1	Intervensi kebijakan pemerintah yang efektif	(Firman, 1996 dan Parr, 1999).	Perkembangan suatu kota juga dipengaruhi oleh perkembangan dan kebijakan ekonomi. Hal ini disebabkan karena perkembangan kota pada dasarnya adalah wujud fisik perkembangan ekonomi. kebijakan spasial untuk mengembangkan kutub pertumbuhan dengan melihat aspek keuntungan komparatif daerah kependudukan dan kinerja ekonomi daerah.
2	Keterkaitan antar kawasan	Johara T. Jayadinata, 1999	Keterkaitan kota kota dapat mendatangkan manfaat tertentu bagi kota kota itu dan juga lingkungan sekitar.
3	Ketersediaan Sarana prasarana transportasi	Djalante, 1996: 50 Charter dalam Sa'dah, 1995	Prasarana transportasi selain akan berfungsi sebagai media berlangsungnya <i>spread effects</i> juga berperan untuk melayani (peran pasif) sekaligus membangkitkan (peran aktif) kegiatan sosial ekonomi pada pusat-pusat perkotaan.
4	Berkembangnya kegiatan perekonomian	(Parr, 1999)	Berkembangnya suatu kota yang ditandai dengan berkembangnya perekonomian melalui masuknya arus investasi dan berkembangnya sektor industri, perdagangan dan jasa serta perkembangan penduduk yang bermigrasi untuk mengisi kesempatan kerja yang timbul akibat perkembangan ekonomi yang didukung oleh tingkat kelengkapan prasarana kota yang mencukupi, terutama yang menghubungkan kota pusat wilayah pembangunan dengan daerah dibelakang
5	Ketersediaan sarana prasarana sosial ekonomi	Djalante, 1996: 38 Charter dalam Sa'dah, 1995	Berjalannya fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan yang didukung ketersediaan fasilitas sosial ekonomi tersebut pada gilirannya akan mampu mendorong perkembangan dan perkembangan ke seluruh wilayah pengaruhnya.
6	Kondisi geografis dan karakteristik wilayah	Hirschman 1997:12)	Kondisi geografis akan mempengaruhi aktivitas ekonomi dalam jangka panjang

Sumber : *Kompilasi Literatur dan Observasi Lapangan, 2004.*

BAB III

KAJIAN PUSAT PUSAT SUB WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CILACAP

3.1 Tinjauan Regional Kabupaten Cilacap

Dalam rencana pelayanan perkotaan di Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah tahun 2001, Kota Cilacap sebagai pusat kota kabupaten termasuk pada Kota Pusat Pelayanan Kegiatan Nasional (KPPKN), sehingga dapat diartikan bahwa Kota Cilacap berpotensi menjadi pintu gerbang ke kawasan internasional dan pendorong perkembangan daerah sekitarnya. Selain itu, Cilacap juga menjadi pusat jasa jasa pelayanan keuangan, pusat pengolahan/pengumpul barang, simpul transportasi, pusat jasa pemerintahan dan pusat jasa jasa publik lainnya untuk nasional/beberapa propinsi. Sedangkan Kota Majenang dan Kroya sebagai Kota Pusat Pelayanan Kegiatan lokal (KPPKL)

Selain pengelompokan pusat kegiatan tersebut, kota kota di Jawa Tengah juga dikelompokkan menjadi beberapa kawasan strategis, dan Kabupaten Cilacap termasuk di dalamnya dengan masuknya Kota Cilacap sebagai kawasan strategi Cilacap dan sekitarnya, kawasan ini terdiri dari kota kota utama, yaitu Cilacap, Kroya, Wangon, Ajibarang dan Bumiayu dengan Kota Cilacap menjadi pusat pertumbuhan dalam kawasan ini. Dan Kawasan Majenang dan sekitarnya, kaitannya dengan jalur jalan regional yang menghubungkan Kota Banjar dan Bandung di bagian Barat serta Kota Purwokerto dan Cilacap di bagian timur. (lihat Gambar III.1)

Dari Tinjauan Arahan Pengembangan Rencana Struktur Tata Ruang Kota dalam RTRW Kabupaten Cilacap 1990/1991 – 2000/2001 (Perda No. 14 Tahun 1994), pembagian hierarki kota kota di Kabupaten Cilacap ditetapkan menurut orde orde kota sebagai berikut:

1. Orde I : Kota Cilacap
2. Orde II : Kecamatan Kroya
3. Orde III : Kecamatan Majenang, Sidareja, Sampang
4. Orde IV : Kecamatan Kesugihan, Adipala, Kawunganten, Gandrungmangu dan Maos
5. Orde V : Kecamatan Kedungreja, Binangun, Nusawungu, Jeruklegi, Karangpucung, Cimanggu, Wanareja, Dayeuhluhur, Cipari dan Patimuan

Sedangkan pembangunan daerah Kabupaten Cilacap guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, dirumuskan berdasarkan pada potensi kegiatan serta permasalahan yang dihadapi di bagi dalam 7 Sub Wilayah Pembangunan (SWP), adalah sebagai berikut:

a. Sub Wilayah Pembangunan Ia (SWP Ia)

Meliputi Kota Cilacap dan Kecamatan Jeruklegi dengan pusat di **Kota Cilacap**. Prioritas pembangunan pada wilayah ini adalah usaha peningkatan tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan sektor pariwisata.

b. Sub Wilayah Pembangunan Ib (SWP Ib)

Meliputi Kecamatan Kesugihan, Maos dan **Sampang**. Kegiatan pengembangan meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan kehutanan.

c. Sub Wilayah Pembangunan IIa (SWP IIa)

Meliputi **Kecamatan Sidareja**, Gandrungmangu Kedungreja, Patimuan dan Cipari. Dengan prioritas pembangunan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan darat dan peternakan.

d. Sub Wilayah Pembangunan IIb (SWP IIb)

Meliputi **Kecamatan Kawunganten** (sekarang dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kawunganten, Bantarsari dan Kampung Laut). Prioritas pembangunan sektor

pariwisata, pertambangan, perikanan, perkebunan, dan pengembangan Kawasan Kampung Laut.

e. Sub Wilayah Pembangunan III (SWP III)

Meliputi **Kecamatan Kroya**, Adipala, Binangun dan Nusawungu. Dengan prioritas pembangunan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan diiringi dengan sarana fisik dan non fisik.

f. Sub Wilayah Pembangunan IVa (SWP IVa)

Meliputi **Kecamatan Majenang**, Dayeuhluhur dan Wanareja. Prioritas pembangunan sektor pertanian, perkebunan, perikanan darat, kehutanan dan perekonomian.

g. Sub Wilayah Pembangunan IVb (SWP IVb)

Meliputi **Kecamatan Karangpucung** dan Cimanggu. Prioritas pembangunan sektor perkebunan, perekonomian, serta pembangunan sarana dan prasarana fisik.

Selain kondisi diatas, juga ditetapkan wilayah prioritas, yaitu wilayah wilayah yang perlu mendapatkan perhatian untuk penanganannya. Wilayah prioritas tersebut dikriteriakan sebagai berikut:

1. Kawasan yang terbelakang karena keterbatasan sumber daya (Kecamatan Wanareja, Kawunganten, Cimanggu, Jeruklegi, Karangpucung, Adipala, Sidareja, Nusawungu, Kedungreja dan Patimuan);
2. Kawasan kritis yang perlu dipelihara kawasan lindungnya untuk menghindari kerusakan lingkungan (Kecamatan Kawunganten, Dayeuhluhur, Wanareja, Cimanggu, Karangpucung, Jeruklegi, Kedungreja, Gandrungmangu, Sidareja, Majenang dan Cipari);
3. Kawasan yang berperan menunjang sektor sektor strategis/unggulan (Kecamatan Cilacap Utara, Tengah dan Selatan, Jeruklegi, Maos, Sampang, Kroya, Majenang dan Sidareja);



4. Kawasan yang pertumbuhannya lambat (Kecamatan Kawunganten dan Jeruklegi);
5. Kawasan perbatasan (Kecamatan Wanareja, Kedungreja, Patimuan dan Dayeuhluhur);
6. Kawasan terpencil (Kecamatan Kawunganten, Dayeuhluhur dan Kecamatan Kampung Laut).

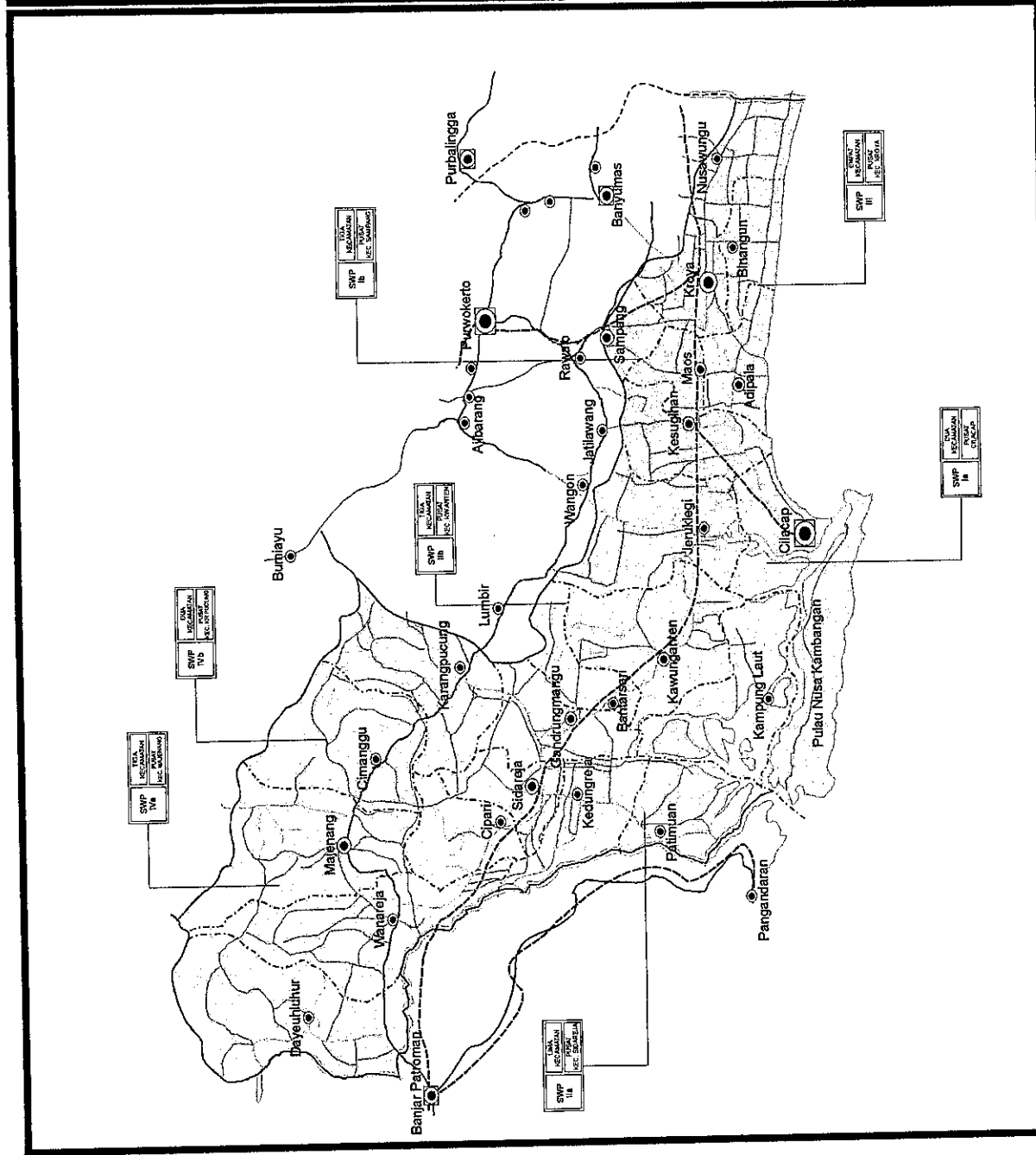
3.2 Kondisi Geografis Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap terletak di bagian selatan Pulau Jawa, merupakan kabupaten terluas Propinsi Jawa Tengah, terletak di antara 108 4'30" - 109 30'30" bujur timur dan 7 30' - 7 45'20" lintang selatan, dan secara administratif letaknya berbatasan dengan:

- Utara : Kabupaten Brebes
- Timur : Kabupaten Kebumen dan Banyumas
- Selatan : Samudra Hindia
- Barat : Kabupaten Ciamis dan Subang (Propinsi Jawa Barat)

Secara umum Kabupaten Cilacap bila dilihat dari arah barat laut merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian lebih dari 100 m (dpl) dengan puncak tertinggi ada di Kecamatan Dayeuhluhur. Selanjutnya ke arah Tenggara terbagi dua, bagian utara berupa pegunungan dan bagian selatan berupa dataran miring landai ke arah barat daya – selatan dan berbatasan dengan Segara Anakan. Bagian timur berupa dataran dan dibagian selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Pulau Nusakambangan memanjang dari barat ke timur, membatasi Segara Anakan dan Samudra Hindia berupa pegunungan dengan ketinggian kurang dari 100 m (dpl). Walaupun memiliki topografi yang beragam, namun secara umum Kabupaten Cilacap merupakan dataran rendah, kondisi ini di dukung oleh letak Kabupaten Cilacap yang berada pada daerah pesisir.

 <p>MAGISTER TEKNIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	<p>TUGAS MATA KULIAH TESIS</p>																		
<p>PERKEMBANGAN PUSAT WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CILACAP</p>																			
<p>GAMBAR</p>																			
<p>PUSAT PUSAT WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CILACAP</p>																			
<p>Legenda :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td>Batas Kabupaten</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border-bottom: 1px dashed black;"></td> <td>Batas Kecamatan</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td>Jalan Nasional</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td>Jalan Propinsi</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td>Jalan Kabupaten</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td>Jalan Kereta api</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td>Sungai</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td>Kota Kabupaten/KPPKN</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td>Kantor Kecamatan</td> </tr> </table>			Batas Kabupaten		Batas Kecamatan		Jalan Nasional		Jalan Propinsi		Jalan Kabupaten		Jalan Kereta api		Sungai		Kota Kabupaten/KPPKN		Kantor Kecamatan
	Batas Kabupaten																		
	Batas Kecamatan																		
	Jalan Nasional																		
	Jalan Propinsi																		
	Jalan Kabupaten																		
	Jalan Kereta api																		
	Sungai																		
	Kota Kabupaten/KPPKN																		
	Kantor Kecamatan																		
 <p>UTARA</p>	<p>SKALA NO. GAMBAR</p> <p>1 : 1.250.000 III.2</p> <p>0 12,5 25km</p>																		
<p>SUMBER</p>																			
<p>BAPPEDA Kabupaten Cilacap</p>																			



Kabupaten Cilacap memiliki luas wilayah sebesar 2.138,50 km² atau 213.850,288 ha, dengan penggunaan lahan terbesar adalah untuk persawahan sebesar 63.097.494 ha (29,5 %), kemudian untuk tegalan atau kebun sebesar 42.036,569 (19,65%) dan penggunaan lahan terkecil adalah untuk penggembalaan atau padang rumput sebesar 30 ha (0,014%). Secara rinci penggunaan lahan di Kabupaten Cilacap dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL. III.1
PENGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN CILACAP

No.	Penggunaan Lahan	Luas
1	Sawah	63.097,494
2	Pekarangan	34.684,830
3	Tegalan/Kebun	42.036,569
4	Ladang/Huma	819,000
5	Penggembalaan/Padang Rumput	30,000
6	Sementara Tidak Diusahakan	810,743
7	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	9.824,076
8	Hutan Negara	37.950,222
9	Perkebunan	10.521,927
10	Rawa rawa	239,810
11	Tambak	88,050
12	Kolam/Empang	453,448
13	Lain lain	13.294,119
Jumlah		213.850,288

Sumber : Cilacap Dalam Angka 2002

Wilayah Kabupaten Cilacap terdiri dari 24 kecamatan, 280 desa/kelurahan. Berdasarkan ciri ciri litologi, fasies dan lingkungan pengendapan serta batuan yang tersingkap di Kabupaten Cilacap, maka dibedakan menjadi 3 (tiga) cekungan air tanah potensial, yaitu : Cekungan Air Tanah Cilacap, Cekungan Air Tanah Sidareja dan Cekungan Air Tanah Majenang. Sedangkan sumber di wilayah Kabupaten Cilacap meliputi dua macam sumber air, yaitu sungai dan sumber air dangkal (mata air). Adapun sumber sumber air tersebut antara lain:

- a. Sungai, sebanyak 132 sungai, yang cukup besar antara lain Sungai Donan, Sungai Citanduy, Sungai Serayu dan Sungai Ijo di Perbatasan dengan kabupaten Kebumen.

- b. Mata Air, secara geologi memiliki mata air yang cukup potensial, terutama di bagian Utara (sekitar Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang dan Karangpucung). Sedangkan mata air yang lain terdapat di Kecamatan Cimangu (Mata Air Pamijahan), Gandrungmangu, Sidareja, Kawunganten dan Kesugihan.

3.3 Kondisi Kependudukan Kabupaten Cilacap

3.3.1 Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Salah satu hal yang penting dalam melakukan perencanaan terhadap suatu wilayah adalah dengan melihat dari jumlah, kepadatan dan distribusi penduduk. Dengan mengetahui jumlah, kepadatan dan distribusi penduduk, maka dapat diketahui kecenderungan yang terjadi baik kualitas pada suatu wilayah maupun dalam melihat tingkat pelayanan daerah terhadap penduduknya. Sehingga dapat terlihat juga tingkat kesejahteraan penduduknya.

Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang berkembang dengan stabil dengan jumlah penduduk yang relatif besar, yaitu 1.696.765 jiwa pada tahun 2002. Secara jelasnya mengenai perkembangan jumlah penduduk pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL.III.2
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN
DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 1998 – 2002

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		1998	1999	2000	2001	2002
1	Dayeuhluhur	46.092	46.161	46.454	46.834	47.066
2	Wanareja	89.185	89.806	90.514	91.254	91.890
3	Majenang	117.029	117.097	117.302	117.697	117.722
4	Cimanggu	92.534	92.859	93.288	93.819	94.664
5	Karangpucung	67.085	67.362	67.569	68.040	68.456
6	Cipari	61.242	61.417	61.750	63.472	63.819
7	Sidareja	55.866	56.011	56.323	56.585	56.655
8	Kedungreja	76.974	78.939	79.389	79.589	79.887
9	Patimuan	42.962	43.087	43.110	43.208	43.263
10	Gandrungmangu	95.811	96.019	96.570	99.225	99.542
11	Bantarsari	-	64.991	67.625	65.670	65.691
12	Kawunganten	151.918	87.163	88.053	91.091	92.807

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		1998	1999	2000	2001	2002
13	Jeruklegi	57.826	58.349	58.791	59.059	58.120
14	Kesugihan	92.689	92.838	93.086	93.434	93.621
15	Adipala	74.363	74.898	77.788	78.497	79.153
16	Maos	41.448	41.418	45.823	46.039	46.863
17	Sampang	35.996	36.328	36.579	36.761	36.900
18	Kroya	97.490	99.137	100.690	101.075	101.455
19	Binangun	60.096	60.452	60.933	63.469	63.834
20	Nusawungu	72.356	74.922	75.279	75.673	75.873
21	Cilacap Selatan	75.027	73.225	73.889	76.349	76.386
22	Cilacap Tengah	82.705	82.577	82.513	83.354	83.430
23	Cilacap Utara	56.094	56.963	58.461	59.020	59.668
Jumlah		1.642.725	1.652.019	1.671.779	1.689.214	1.696.765

Sumber : Kabupaten Cilacap dalam angka 1998 - 2002

Berdasarkan rincian tabel diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Cilacap secara keseluruhan memiliki rata rata pertumbuhan penduduk sebesar 0,87%, dengan penyebaran merata, yaitu 2,17% - 6,94%. Penyebaran penduduk terbesar terkonsentrasi di Kecamatan Majenang, yaitu 117.722 jiwa atau 6,94%, sedangkan penyebaran penduduk terkecil terdapat pada Kecamatan Sampang yaitu sebesar 36.900 atau 2,17%. Dan penurunan jumlah penduduk pada tahun 2002 dari tahun sebelumnya terjadi di Kecamatan Jeruklegi dan Kecamatan Cilacap Tengah. Besarnya penyebaran penduduk selain dipengaruhi oleh sektor ekonomi juga dipengaruhi oleh luasan wilayah.

Sementara itu, jika ditinjau dari segi kepadatan penduduknya Kabupaten Cilacap memiliki kepadatan penduduk yang tidak merata. Dalam arti, bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Cilacap sebagian kecamatan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi sedangkan beberapa kecamatan yang lain memiliki kepadatan yang rendah.

Kepadatan tinggi terjadi di Kecamatan Cilacap Tengah, Selatan dan Utara yaitu sekitar 3167 – 8385 Jiwa/Km². Kepadatan penduduk sedang terdapat di Kecamatan Kroya, Maos, Sampang, Adipala, Binangun, Binangun, Nusawungu, Kesugihan, Sidareja dan Kedungreja yaitu sebesar 1031 – 1725 jiwa/Km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan

penduduk rendah terdapat pada Kecamatan Majenang, Gandrungmangu, Bantarsari, Karangpucung, Jeruklegi, Cimanggu, Cipari, Patimuan, Wanareja dan Dayeuhluhur yaitu antara 254 – 850 jiwa/Km². Tingkat penyebaran penduduk di Kabupaten Cilacap secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL III.3
PENYEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK DI KABUPATEN CILACAP

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Penyebaran (%)
1	Dayeuhluhur	185.06	47,066	254	2.77
2	Wanareja	189.73	91,890	484	5.42
3	Majenang	138.56	117,722	850	6.94
4	Cimanggu	167.44	94,664	565	5.58
5	Karangpucung	115.00	68,456	595	4.03
6	Cipari	121.47	63,819	525	3.76
7	Sidareja	54.95	56,655	1,031	3.34
8	Kedungreja	71.43	79,887	1,118	4.71
9	Patimuan	75.30	43,263	575	2.55
10	Gandrungmangu	143.19	99,542	695	5.87
11	Bantarsari	95.54	65,691	688	3.87
12	Kawunganten	261.07	92,807	355	5.47
13	Jeruklegi	99.30	58,120	585	3.43
14	Kesugihan	82.31	93,621	1,137	5.52
15	Adipala	61.19	79,153	1,294	4.66
16	Maos	28.05	46,863	1,671	2.76
17	Sampang	27.30	36,900	1,352	2.17
18	Kroya	58.83	101,455	1,725	5.98
19	Binangun	51.42	63,834	1,241	3.76
20	Nusawungu	61.26	75,873	1,239	4.47
21	Cilacap Selatan	9.11	76,386	8,385	4.50
22	Cilacap Tengah	22.15	83,430	3,767	4.92
23	Cilacap Utara	18.84	59,668	3,167	3.52
Jumlah		2,138.50	1,696,765	33,298	100.00

Sumber : Cilacap dalam angka, 2002

3.3.2 Penduduk Menurut Penduduk Bekerja

Menurut jenis pekerjaannya, penduduk di Kabupaten Cilacap dikelompokkan dalam buruh tani, nelayan, buruh industri, buruh bangunan, PNS/TNI, pengusaha dan pensiunan.

Berdasarkan data yang diperoleh tahun 2001, penduduk bekerja di Kabupaten Cilacap sebesar 413.818 orang atau 24.75% dari jumlah total penduduk Kabupaten Cilacap, yang terperinci dalam penduduk yang bekerja sebagai buruh tani sebesar 268.605 orang atau 1,59%, nelayan sebanyak 14.853 orang atau 0.89%, buruh industri sebanyak 35.425 orang atau 2.12%, buruh bangunan sebanyak 42.149 orang atau 2.52%, PNS/TNI-Polri sebanyak 29.840 orang atau 1.78%, pengusahaan sebanyak 13.831 orang atau 0.83% dan pensiunan sebanyak 9.115 orang atau 0.55%.

3.3.3 Penduduk Menurut Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah merupakan suatu ukuran keberhasilan suatu wilayah dalam meningkatkan pertumbuhan wilayahnya, begitu juga halnya dengan Kabupaten Cilacap.

Menurut hasil pendataan desa mengenai identifikasi penduduk miskin yang telah dilakukan pada tahun 1999, dapat dirinci sebagai berikut:

TABEL III.4
REKAPITULASI IDENTIFIKASI PENDUDUK MISKIN
DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 1999

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Kepala Keluarga	
		Total	Miskin	Total	Miskin
1	Dayeuhluhur	44.094	19.819	14.804	6.218
2	Wanareja	89.423	47.966	23.282	12.668
3	Majenang	116.975	61.239	27.669	14.811
4	Cimanggu	92.709	34.707	21.460	8.521
5	Karangpucung	67.195	31.587	16.678	7.580
6	Cipari	61.312	34.590	13.069	8.273
7	Sidareja	55.898	27.917	12.546	6.748
8	Kedungreja	77.417	41.606	17.459	9.190
9	Patimuan	42.965	17.969	10.807	4.700
10	Gandrungmangu	95.946	52.723	20.072	12.433
11	Bantarsari	64.978	33.312	13.689	8.279
12	Kawunganten	87.124	46.635	18.212	10.839
13	Jeruklegi	58.135	23.089	13.097	6.011
14	Kesugihan	92.718	46.350	21.891	11.286
15	Adipala	74.609	25.293	17.450	6.346
16	Maos	41.395	16.005	9.246	3.808

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Kepala Keluarga	
		Total	Miskin	Total	Miskin
17	Sampang	36.114	16.124	8.103	3.582
18	Kroya	97.961	39.600	21.190	8.944
19	Binangun	60.256	23.500	12.858	5.817
20	Nusawungu	72.779	38.006	16.454	9.318
21	Cilacap Selatan	73.415	24.557	17.218	5.711
22	Cilacap Tengah	82.650	13.663	17.921	3.093
23	Cilacap Utara	56.394	11.707	11.737	2.866
Jumlah		1.642.465	727.016	376.912	117.042
%		100%	44.26%	100%	46,97%

Sumber: Identifikasi Penduduk Miskin Hasil Pendataan Desa, 1999

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cilacap pada tahun 1999 hampir setengah dari jumlah penduduk yang ada. Keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap masih rendah. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Cilacap harus dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, yaitu antara lain dengan cara mengurangi tingkat kesenjangan yang ada di masyarakat, atau dengan memberikan penambahan atau memperluas lapangan pekerjaan di Kabupaten Cilacap.

3.4 Kondisi Fasilitas Sosial Ekonomi Kabupaten Cilacap

3.4.1 Fasilitas Pendidikan

Hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Cilacap telah memiliki fasilitas pendidikan dari mulai pendidikan dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas. Bahkan ada beberapa kecamatan yang memiliki fasilitas pendidikan tinggi, yaitu di Kecamatan Kesugihan, Kecamatan Cilacap Utara, Tengah dan Selatan serta Kecamatan Sidareja. Kecamatan Adipala merupakan satu satunya kecamatan di Kabupaten Cilacap yang tidak memiliki fasilitas pendidikan tingkat atas.

3.4.2 Fasilitas Kesehatan

Di Kabupaten Cilacap, setiap kecamatan telah memiliki minimal satu puskesmas. Bahkan beberapa kecamatan yang penduduknya relatif banyak telah berdiri dua puskesmas. Disamping itu, untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, di Kabupaten Cilacap telah ada 63 puskesmas pembantu. Sedangkan rumah sakit dan rumah bersalin terpusat di empat kecamatan yaitu, Kecamatan Cilacap Utara, Tengah dan Selatan dan Kecamatan Majenang.

3.4.3 Fasilitas Perekonomian

Dalam PDRB Kabupaten Cilacap Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar harga Berlaku Tahun 2002 sektor perdagangan menjadi penyumbang kedua kegiatan perekonomian dengan nilai \pm Rp. 1,8 trilyun. Penyebaran fasilitas ekonomi di Kabupaten Cilacap seperti pasar meliputi pasar umum, pasar ikan dan pasar hewan, toko/kios/warung, koperasi, KUD/BUUD, Bank baik negeri maupun swasta dan lumbung telah merata, karena hampir semua kecamatan terlayani. Menurut data yang diperoleh, jumlah fasilitas yang melayani Kabupaten Cilacap sebanyak 16.765 buah, yang sebagian besar terkonsentrasi di Kota Cilacap (Kecamatan Cilacap Utara, Tengah dan Selatan). Hal ini dipengaruhi oleh fungsi fungsi kecamatan kecamatan tersebut yaitu sebagai daerah pusat Kota Cilacap yang merupakan pusat aktifitas.

3.4.4 Fasilitas Transportasi

Sarana dan prasarana perhubungan merupakan salah satu aspek vital dalam melakukan aktivitas di Kabupaten Cilacap. Ketersediaan sarana prasarana yang memadai akan menunjang kelancaran sistem transportasi. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan (tahun 2002), sarana yang melayani aktivitas dalam atau antar wilayah di

Kabupaten Cilacap saat ini sebanyak 181 unit dengan kapasitas 11 tempat duduk (melayani aktivitas dalam Kota Cilacap), AKAP sebanyak 95 unit, AKDP sebanyak 265 unit dan angkudes sebanyak 451 unit. Sarana penunjang yang telah tersedia di Kabupaten Cilacap, antara lain : Terminal, meliputi Terminal Gunungsimping Cilacap (Tipe A); Terminal Adipala (Tipe B); Terminal Kroya (Tipe B); Terminal Karangpucung (Tipe B); Terminal Majenang (Tipe B); dan Terminal Sidareja (Tipe B). Sedangkan Sub Terminal, Sub Terminal Jeruklegi, Kawunganten, Rawa Apu, Ciparik, Dayeuhluhur, Wanareja, Kesugihan dan Sampang.

Panjang jalan di Kabupaten Cilacap tahun 2001 sama dengan tahun 2000 yaitu sepanjang 1010,120 km. Dalam arti, pembangunan yang dilakukan hanya memperbaiki jalan yang rusak dan mengganti perkerasan jalan. Berdasarkan fungsinya, jaringan jalan yang ada di Kabupaten Cilacap dibedakan dalam jaringan jalan arteri (menghubungkan antar kota/ menghubungkan kegiatan utama kota dari arah luar kota dan dilewati kendaraan berat) 131,735 km, kolektor primer (jalan utama kota yang berfungsi sebagai jalan penghubung antar kegiatan utama yang ada di dalam kota) sepanjang 199,860 km, kolektor sekunder adalah sama dengan kolektor primer tetapi tidak boleh dilewati oleh kendaraan berat, dengan panjang 10,705 km, sedangkan jalan lokal adalah jalan lingkungan dalam kota yang menghubungkan antar lingkungan dengan panjang 667,82 km.

Jaringan Kereta Api di Kabupaten Cilacap merupakan jaringan pelayanan tingkat nasional dengan melewati Kecamatan Wanareja, Cipari, Sidareja, Gandrungmangu, Kawunganten, Jeruklegi, Kesugihan, Maos, Kroya (paling ramai), sedangkan jalur yang menuju ke Kota Cilacap melewati jalur utara (Kabupaten Banyumas), Kecamatan Kroya, Maos dan Kesugihan dengan Sistem jaringan rel yang ada (*single track*). Di Kabupaten Cilacap juga terdapat sarana perhubungan laut sebanyak 12 pelabuhan, yang dibedakan



MAGISTER TEKNIK
PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TUGAS MATA KULIAH
TESIS

PERKEMBANGAN PUSAT WILAYAH PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN CILACAP

GAMBAR

JARINGAN TRANSPORTASI
DI KABUPATEN CILACAP

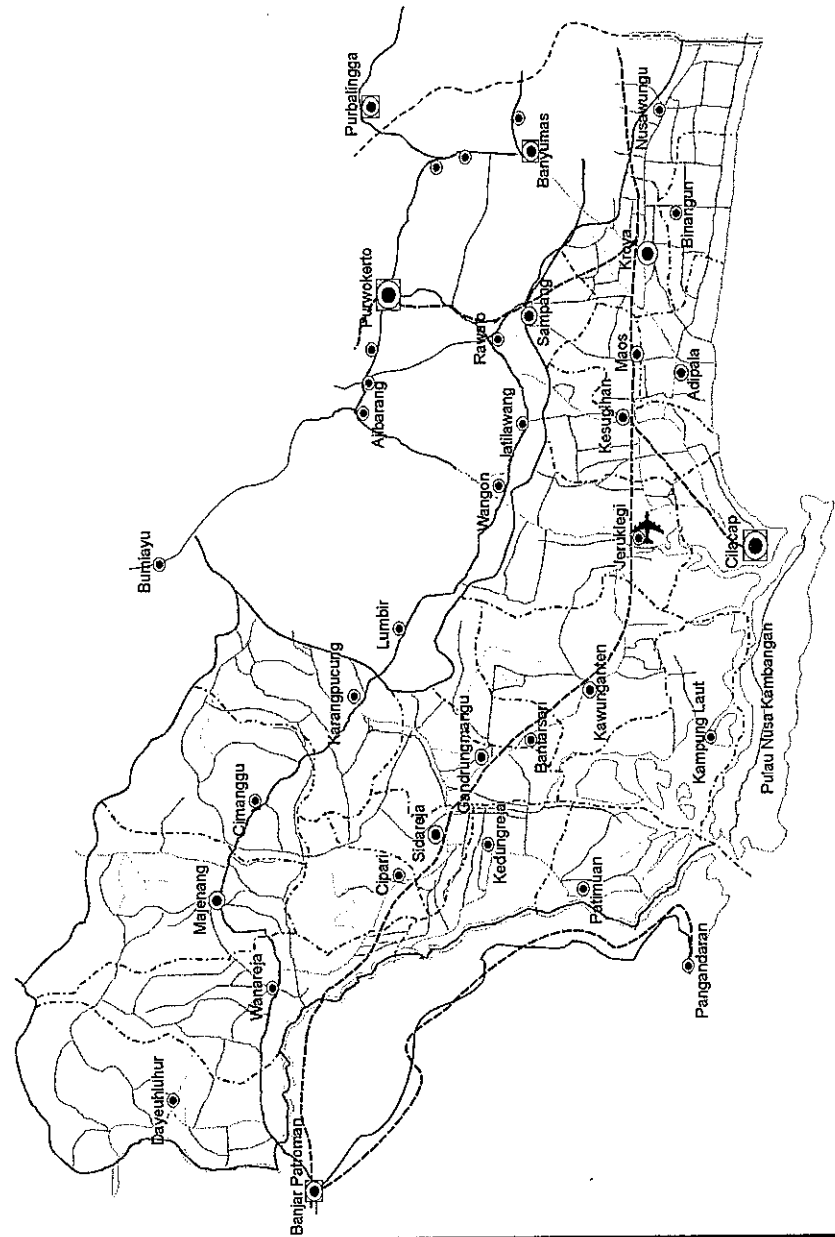
Legenda :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan Nasional
- Jalan Propinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Kereta api
- Sungai
- Kota Kabupaten/KPPKN
- Kantor Kecamatan

UTARA	SKALA	NO. GAMBAR
	1 : 1.250.000 0 12,5 25km	III.4

SUMBER

DPU Kabupaten Cilacap



menjadi, *pelabuhan umum*; yaitu Pelabuhan Tanjung Intan Pelindo III. *Pelabuhan khusus*, meliputi Pelabuhan Pertamina UP IV Lomanis, Pelabuhan Pertamina Tongkang di Areal 70, Pelabuhan PT Semen Cibinong Lomanis, Pelabuhan PT Pusri Donan, dan Pelabuhan PT. Antam Tbk di Areal 70. *Pelabuhan Penyebrangan*, meliputi Pelabuhan Lomanis, Montehan dan Klaces. *Pelabuhan Perikanan*, yaitu Pelabuhan di Tegal Kamulyan dan *Pelabuhan Wisata* yang berada di Lomanis dan Sleko. Pelabuhan pelabuhan tersebut tidak hanya digunakan sebagai pelabuhan bongkar muat barang saja, tetapi juga melayani penumpang. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan, jumlah perahu/kapal penumpang/barang berjumlah 70 buah, sedangkan jumlah perahu/kapal ikan sebanyak 2.613 buah.

Untuk mendukung perhubungan udara di Kabupaten Cilacap terdapat Bandara Tunggal Wulung yang merupakan bandara kelas III berada di Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi dan Desa Tritih Kulon di Kecamatan Cilacap Utara, berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat umum baik yang menuju Cilacap maupun keluar dari Cilacap dengan harapan secara langsung atau tidak dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Pada awal tahun 2004 Pelabuhan Tunggal Wulung melayani Penerbangan dengan rute Jakarta – Cilacap dan Cilacap – Jakarta, tetapi saat ini, untuk sementara waktu dihentikan (Suara Merdeka 10 November 2004, jalur penerbangan sudah di buka kembali). Dan dengan dibangunnya jalur jalan selatan selatan, Pelabuhan Tunggal Wulung akan dikembangkan untuk melayani kegiatan *eksport – import*.

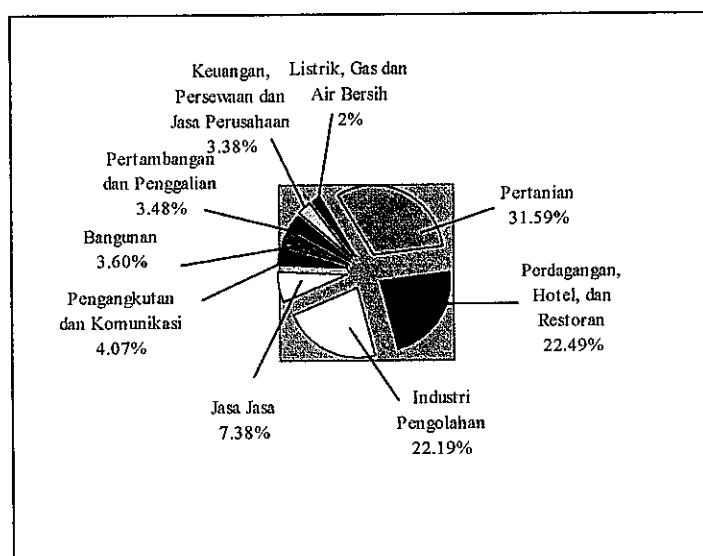
3.5 Kondisi Perekonomian Kabupaten Cilacap

Kegiatan utama ekonomi penduduk Kabupaten Cilacap di dominasi oleh 3 (tiga) sektor utama yaitu sektor Pertanian, sektor perdagangan, jasa dan restoran dan sektor industri. Pendapatan per kapita penduduk dari data terakhir yang didapat mengalami

peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2002 pendapatan per kapita menurut harga konstan sebesar Rp. 1.377.747,19,- naik menjadi Rp. 1.396.099,52,- atau naik 1,31 %. Pendapatan per kapita riil mengalami pertumbuhan di atas pertumbuhan penduduk, hal ini merupakan indikasi adanya kemajuan tingkat kesejahteraan penduduk secara rata-rata di Kabupaten Cilacap.

3.5.1 PDRB Kabupaten Cilacap

Dari kesembilan sektor perekonomian yang ada, ternyata struktur perekonomian Kabupaten Cilacap didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor industri pengolahan. Sektor pertanian kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto tahun 2002 mencapai 31,57%.



Sumber : PDRB Kabupaten Cilacap, 2002

GAMBAR III.5
PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2002

3.6 Gambaran Pusat Pusat Sub Wilayah Pembangunan di Kabupaten Cilacap

Pusat pusat wilayah pembangunan yang ada di Kabupaten Cilacap, apabila berdasarkan pada sistem perwilayahan pembangunan wilayah Kabupaten Cilacap memang

ada 7 (tujuh) Sub Wilayah Pembangunan (SWP). Tetapi yang memiliki potensi dan peran yang relatif besar hanya 5 (lima) Sub Wilayah Pembangunan (SWP). Secara lebih jelas baran pusat pusat sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap, adalah sebagai berikut:

3.6.1 Kota Cilacap (SWP Ia)

Kota Cilacap yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Cilacap Utara, Tengah dan Selatan walaupun memiliki berbagai macam potensi, antara lain sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Cilacap, Kota Pusat Pelayanan Kegiatan Nasional (KPPKN), pusat pertumbuhan Jawa Tengah bagian selatan, kawasan industri yang didukung potensi pelabuhan baik transportasi laut maupun perikanan dan juga memiliki potensi pariwisata unggulan seperti Pantai teluk Penyus, Benteng Pendem dan Hutan Payau, memiliki kendala dalam pengembangannya. Letaknya yang berada di ujung selatan Pulau Jawa sehingga jaringan jalan yang menuju Kota Cilacap tidak dapat terus melewatinya tetapi harus berbalik arah melalui jalan yang sama, menjadikan Kota Cilacap berpola *Cul De Sacx*, yaitu pola yang tertutup pelayanan dalam kota. Bentuk/pola ini menjadi salah satu kendala bagi pengembangan Kota Cilacap, karena pusat kota hanya dilewati atau didatangi oleh orang-orang yang benar-benar bertujuan ke Kota Cilacap.

Perkembangan kota cenderung linear dengan aktivitas perkotaan terkonsentrasi sepanjang jalan utama dan keterbatasan pengembangan secara fisik pada daerah-daerah yang masuk dalam wilayah pertahanan dan pengelolaan pelabuhan. Selain itu, jangkauan pelayanan sarana – prasarana kota belum mencakup semua daerah dalam wilayah perkotaan dan sering terjadi perubahan fungsi lahan yang menyimpang dari peruntukannya.

3.6.2 Kecamatan Kroya (SWP III)

Kecamatan Kroya dengan Kota Kroya sebagai ibu kota kecamatan merupakan salah satu akses menuju ataupun keluar dari Kabupaten Cilacap dari arah timur, yaitu jalur pertemuan antara Kabupaten Cilacap, Kebumen dan Banyumas. Kecamatan Kroya berpotensi sebagai daerah penyangga swasembada pangan Kabupaten Cilacap dengan adanya sektor pertanian yang didukung sarana irigasi yang memadai. Selain itu juga berpotensi sebagai pusat perdagangan, hal ini didukung dengan adanya pasar berskala regional. Kecamatan Kroya memiliki kendala dalam pengembangannya, karena jalur jalan yang ada secara kualitas dan kuantitas masih perlu ditingkatkan.

3.6.3 Kecamatan Majenang (SWP IVa)

Kecamatan Majenang dengan Kota Majenang sebagai pusat kota kecamatan merupakan salah satu kota di Kabupaten Cilacap selain Kota Cilacap yang pengembangannya dipertimbangkan oleh kebijaksanaan RTRW Propinsi Jawa Tengah yaitu sebagai kawasan kerjasama strategis dalam propinsi, yaitu diarahkan pada pengembangan kota beserta kegiatannya pada daerah selatan serta daerah kosong pada kawasan pusat kota dan transisi untuk menjamin efisiensi pelayanan dan pusat pusat pelayanan yang ada.

Letaknya yang dilewati jalur jalan regional yang menghubungkan Kota Banjar dan Bandung di bagian barat serta Kota Purwokerto di bagian timur, menjadikan Kecamatan Majenang sebagai pusat pelayanan distribusi yang strategis. Dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan wilayah salah satunya adalah merupakan wilayah rawan bencana di Kabupaten Cilacap (banjir dan tanah longsor hampir terjadi setiap tahun).

3.6.4 Kecamatan Sidareja (SWP IIa)

Memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan yang didukung dengan letaknya yang strategis, selain sebagai pusat SWP IIa juga dilalui oleh jalur wisata nasional (Pangandaran, Cilacap, Banyumas, Yogyakarta dan Bandung), yang juga merupakan jalur alternatif utama yang menghubungkan Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jalur Jalan selatan selatan yang direncanakan melewati wilayah ini. Kendala yang dihadapi, cakupan wilayahnya yang relatif luas didukung oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai.

3.6.5 Kecamatan Sampang (SWP Ib)

Letaknya yang strategi, yaitu merupakan jalur pertemuan yang menuju Kota Cilacap, Kabupaten Banyumas dan Kebumen berpotensi sebagai kota transit dan pusat perdagangan skala regional. Selain itu, karena lokasinya yang dilewati oleh jaringan irigasi primer dari Bendung Gerak Serayu, memungkinkan Kecamatan Sampang dikembangkan sebagai lahan kawasan pertanian lahan basah. Saat ini, perkembangan wilayah Kecamatan Sampang hanya terkonsentrasi pada sekitar jalur utama (linear), sehingga terjadi kesenjangan antara wilayah disekitar jalur utama kota dengan wilayah yang berada jauh dari jalur utama.

3.6.6 Kecamatan Kawunganten (SWP IIb)

Terletak dijalur wisata nasional (Pangandaran, Cilacap, Banyumas, Yogyakarta dan Bandung), yang juga merupakan jalur alternatif utama yang menghubungkan Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jalur Jalan selatan selatan yang direncanakan melewati wilayah ini. Kendala yang dihadapi, cakupan wilayahnya yang relatif luas didukung oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai. Selain itu, karena letaknya yang berada di sekitar kawasan Segara Anakan, sangat berpotensi sebagai pengembangan sektor perikanan air tawar (tambak) dan Laut. Tetapi, pengembangan budidaya yang dilakukan masih sangat kurang.

3.6.7 Kecamatan Karangpucung (SWP IVb)

Letaknya yang strategi, yaitu jalur regional yang merupakan jalur pertemuan yang menuju Kecamatan Sidareja, Majenang dan Kabupaten Banyumas. Saat ini, perkembangan wilayah Kecamatan Karangpucung hanya terkonsentrasi pada sekitar jalur utama (linear), sehingga terjadi kesenjangan antara wilayah disekitar jalur utama kota dengan wilayah yang berada jauh dari jalur utama.

3.6.8 Kecamatan Kecamatan Prioritas dalam Kabupaten Cilacap

Selain kecamatan kecamatan yang merupakan pusat dari Sub Sub Wilayah Pembangunan yang ada, di Kabupaten Cilacap juga terdapat kecamatan kecamatan yang memiliki potensi dan prioritas dalam pengembangan wilayah Kabupaten Cilacap dikarenakan letaknya yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau propinsi lain. Adapun kecamatan kecamatan tersebut, antara lain:

3.6.8.1 Kecamatan Dayeuhluhur (masuk dalam SWP IVa)

Lokasinya yang berada di perbatasan Kabupaten Cilacap dengan Propinsi Jawa Barat bagian selatan, tepatnya Kabupaten Ciamis dan Kuningan menjadikan Kecamatan Dayeuhluhur sebagai jalur penghubung strategis antara ketiga kabupaten tersebut pada khususnya dan Propinsi Jawa Tengah dengan Propinsi Jawa Barat pada umumnya. Selain potensi pertanian lahan kering dan perkebunan hortikultura juga memiliki potensi wisata alam yang cukup besar untuk dikembangkan. Letaknya yang berada di daerah pegunungan dan merupakan dataran tinggi (tertinggi di Kabupaten Cilacap) menjadikan Kecamatan Dayeuhluhur memiliki kawasan rawan bencana tanah longsor, hal tersebut juga masih didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang kurang memadai.

3.6.8.2 Kecamatan Nusawungu (masuk dalam SWP III)

Merupakan wilayah perbatasan antara Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen. Dan arah pengembangannya sesuai dengan kebijakan nasional serta propinsi, jalur selatan selatan yang direncanakan melewati kecamatan Nusawungu selain Kecamatan Binangun, Adipala, Kesugihan, Cilacap Utara, Jeruklegi, Kawunganten, Bantarsari, Gandrungmangu, Sidareja, Kedungreja dan Patimuan. Jalur ini sangat berguna bagi pendistribusian barang dari Kabupaten Cilacap menuju kabupaten kabupaten lain di Jawa Tengah maupun DIY dan Jawa Timur. Kecamatan Nusawungu selain memiliki potensi pertanian yang menjadikannya diarahkan sebagai Kota Agropolitan, juga merupakan pusat industri kecil dan rumah tangga, bahkan kerajinan bambu yang ada telah dieksport.

Selain memiliki potensi konflik dengan kabupaten Kebumen tepatnya di Desa Jetis, kaitannya dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), perkembangan Kecamatan Nusawungu juga hanya terkonsentrasi pada sekitar jalur utama yang mengakibatkan kesenjangan wilayah, sedangkan sarana dan prasarana yang ada kurang memadai dan mendukung kegiatan kegiatan yang ada.

3.6.8.3 Kecamatan Patimuan (masuk dalam SWP IIa)

Kemudahan akses menuju Kabupaten Ciamis selain memiliki potensi konflik yang tinggi juga berpotensi menjadikan Kecamatan Patimuan sebagai jalur penghubung utama antar propinsi di bagian selatan. Selain itu, karena letaknya yang berada di sekitar kawasan Segara Anakan, sangat berpotensi sebagai pengembangan sektor perikanan air tawar (tambak) dan Laut. Tetapi, pengembangan budidaya yang dilakukan masih sangat kurang selain itu, penyediaan sarana dan prasarana yang ada kurang mendukung sehingga masyarakat banyak melakukan aktivitasnya ke Kabupaten Ciamis.

3.7 Kesimpulan

Kabupaten Cilacap yang terletak di ujung selatan Pulau Jawa, merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah. Dilihat dari kondisi topografinya, Kabupaten Cilacap memiliki kondisi fisik dan potensi yang beragam. Dan berdasarkan Tinjauan Arahan Pengembangan Rencana Struktur Tata Ruang Kota dalam RTRW Kabupaten Cilacap 1990/1991 – 2000/2001 (Perda No. 14 Tahun 1994), guna mencapai pertumbuhan yang lebih baik terbagi menjadi 7 (tujuh) Sub Wilayah Pembangunan (SWP). Tetapi, pembangunan yang dilakukan saat ini banyak dipusatkan di pusat kota (pusat kota menjadi sangat dominan terhadap wilayah pinggirannya).

Keberadaan Kota Cilacap sebagai kawasan strategis dengan industri skala besar – kecil, fasilitas perdagangan dan jasa yang ada belum mampu mempengaruhi perkembangan wilayah. Sehingga, guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah memerlukan dukungan yang optimal dari pusat pusat sub wilayah pembangunan yang ada. Pusat sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap diharapkan dapat berperan selain sebagai simpul jasa distribusi, juga sebagai pendorong pengembangan ekonomi dari sub wilayah pembangunan yang dilayani. Sehingga, secara langsung maupun tidak langsung dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kabupaten Cilacap, sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian ini.

Secara umum pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Cilacap terjadi di sekitar jalur utama. Secara lebih *detail*, pertumbuhan dan perkembangan pusat sub wilayah pembangunan dan daerah yang dilayaninya, adalah sebagai berikut :

a Sub Wilayah Pembangunan Ia (SWP Ia)

Meliputi Kota Cilacap dan Kecamatan Jeruklegi dengan pusat di Kota Cilacap, memberikan kontribusi PDRB terbesar yang didominasi oleh sektor industri dan

pertanian dengan pendapatan perkapita terbesar juga memiliki jumlah penduduk miskin yang tidak lebih sedikit dari SWP IVb, yaitu $\pm 4.45 - 4.69$ % dari jumlah total penduduk kabupaten (1.642.465 jiwa, tahun 1999).

Letaknya yang berada di ujung selatan Pulau Jawa sehingga jaringan jalan yang menuju Kota Cilacap tidak dapat terus melewatinya tetapi harus berbalik arah melalui jalan yang sama, menjadikan Kota Cilacap berpola *Cul De Sac*, yaitu pola yang tertutup pelayanan dalam kota. Bentuk/pola ini menjadi salah satu kendala bagi pengembangan Kota Cilacap, karena pusat kota hanya dilewati atau didatangi oleh orang-orang yang benar-benar bertujuan ke Kota Cilacap. Perkembangan kota cenderung linear dengan aktivitas perkotaan terkonsentrasi sepanjang jalan utama dan keterbatasan pengembangan secara fisik pada daerah-daerah yang masuk dalam wilayah pertahanan dan pengelolaan pelabuhan. Selain itu, jangkauan pelayanan sarana – prasarana kota belum mencakup semua daerah dalam wilayah perkotaan dan sering terjadi perubahan fungsi lahan yang menyimpang dari peruntukannya.

b Sub Wilayah Pembangunan Ib (SWP Ib)

Meliputi Kecamatan Kesugihan, Maos dan **Sampang**, kontribusi PDRB didominasi oleh sektor industri, bangunan dan perdagangan, hotel dan restaurant. Memiliki pendapatan perkapita dan jumlah penduduk miskin yang lebih besar dari SWP IVb yaitu $\pm 4.78 - 4.96$ % dari jumlah total penduduk kabupaten (1.642.465 jiwa, tahun 1999).

Letaknya yang strategis, yaitu merupakan jalur pertemuan yang menuju Kota Cilacap, Kabupaten Banyumas dan Kebumen berpotensi sebagai kota transit dan pusat perdagangan skala regional. Saat ini, perkembangan wilayah Kecamatan Sampang hanya terkonsentrasi pada sekitar jalur utama (linear), sehingga terjadi kesenjangan antara

wilayah disekitar jalur utama kota dengan wilayah yang berada jauh dari jalur utama. Dengan arah perkembangan ke Kabupaten Banyumas (Lihat Gambar III.8)

c Sub Wilayah Pembangunan Ila (SWP Ila)



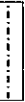



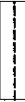
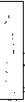

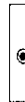

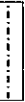



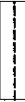
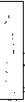

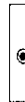

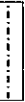



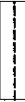
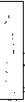

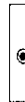

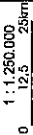
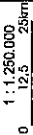
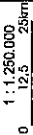
Meliputi **Kecamatan Sidareja**, Gandrungmangu Kedungreja, Patimuan dan Cipari, memiliki pendapatan perkapita nomor 2 (dua) dari bawah dengan kontribusi PDRB didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restaurant. Dan jumlah penduduk miskin paling banyak dibandingkan dengan sub wilayah pembangunan lainnya, yaitu 10.64 – 10.97 % dari jumlah total penduduk kabupaten (1.642.465 jiwa, tahun 1999). Sidareja sebagai pusat SWP Ila dilalui oleh jalur wisata nasional (Pangandaran, Cilacap, Banyumas, Yogyakarta dan Bandung), yang juga merupakan jalur alternatif utama yang menghubungkan Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat.

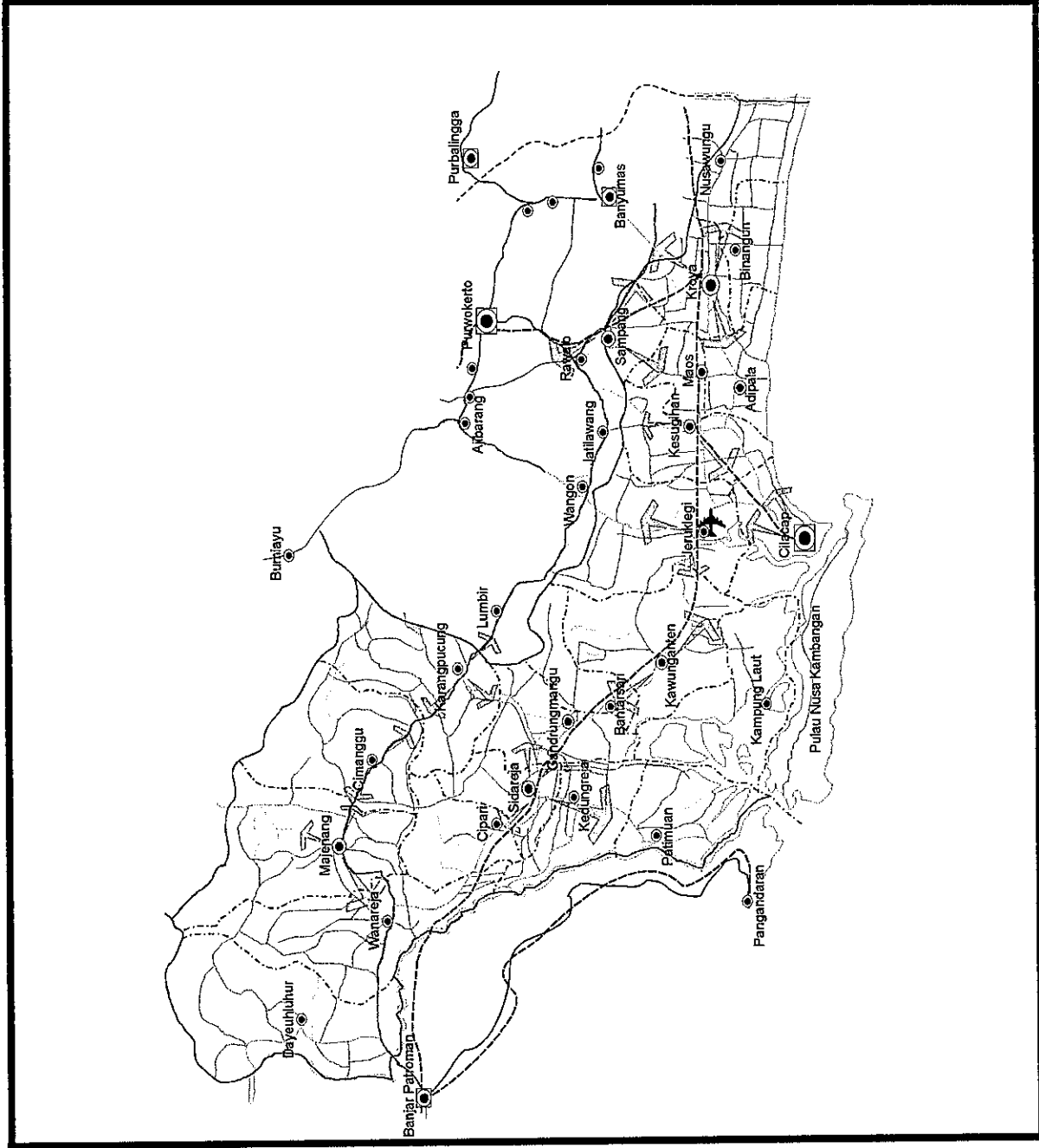
Kendala yang dihadapi, cakupan wilayahnya yang relatif luas didukung oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sedangkan obyek wisata yang ada belum dikembangkan secara optimal.

d Sub Wilayah Pembangunan Iib (SWP Iib)

Meliputi **Kecamatan Kawunganten** (sekarang dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kawunganten, Bantarsari dan Kampung Laut). Memiliki pendapatan perkapita paling sedikit dibandingkan dengan sub wilayah pembangunan lainnya, dengan kontribusi terbesar dari sektor pertanian. Sedangkan jumlah penduduk miskin berkisar antara 4.87 – 5.07 % dari jumlah penduduk miskin kabupaten (44.26% - 46.97%).

Dalam perkembangannya memiliki kondisi topografi beragam dan banyaknya lahan tidur yang merupakan kendala sekaligus potensi. Selain itu, juga memiliki cakupan wilayah pelayanan yang luas dan didukung oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai.

 <p>MAGISTER TEKNIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	<p>TUGAS MATA KULIAH TESIS</p>																		
<p>PERKEMBANGAN PUSAT WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CILACAP</p>																			
<p>GAMBAR</p>																			
<p>ARAH PERKEMBANGAN WILAYAH</p>																			
<p>Legenda :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td>Batas Kabupaten</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Batas Kecamatan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jalan Nasional</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jalan Propinsi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jalan Kabupaten</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jalan Kereta api</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sungai</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kota Kabupaten/KPPKN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kantor Kecamatan</td> </tr> </table>			Batas Kabupaten		Batas Kecamatan		Jalan Nasional		Jalan Propinsi		Jalan Kabupaten		Jalan Kereta api		Sungai		Kota Kabupaten/KPPKN		Kantor Kecamatan
	Batas Kabupaten																		
	Batas Kecamatan																		
	Jalan Nasional																		
	Jalan Propinsi																		
	Jalan Kabupaten																		
	Jalan Kereta api																		
	Sungai																		
	Kota Kabupaten/KPPKN																		
	Kantor Kecamatan																		
 <p>UTARA</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">SKALA</td> <td style="text-align: center;">No. GAMBAR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 1 : 1.250.000  </td> <td style="text-align: center;">III.8</td> </tr> </table>	SKALA	No. GAMBAR	1 : 1.250.000 	III.8														
SKALA	No. GAMBAR																		
1 : 1.250.000 	III.8																		
<p>SUMBER</p>																			



e Sub Wilayah Pembangunan III (SWP III)

Meliputi **Kecamatan Kroya**, Adipala, Binangun dan Nusawungu. Kontribusi PDRD didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restaurant memiliki pendapatan perkapita di bawah pendapatan perkapita kabupaten, dengan angka kemiskinan yang lumayan besar yaitu 7.70 – 8.07 % dari jumlah total penduduk kabupaten (1.642.465 jiwa, tahun 1999). Kecamatan Kroya merupakan salah satu akses menuju ataupun keluar dari Kabupaten Cilacap dari arah timur, yaitu jalur pertemuan antara Kabupaten Cilacap, Kebumen dan Banyumas.

f Sub Wilayah Pembangunan IVa (SWP IVa)

Meliputi **Kecamatan Majenang**, Dayeuhluhur dan Wanareja. Kontribusi PDRD didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restaurant memiliki pendapatan perkapita di atas pendapatan perkapita kabupaten, tetapi memiliki angka kemiskinan yang lumayan besar yaitu 7.86 – 8.94 % dari jumlah total penduduk kabupaten (1.642.465 jiwa, tahun 1999). Letaknya yang dilewati jalur jalan regional yang menghubungkan Kota Banjar dan Bandung di bagian barat serta Kota Purwokerto di bagian timur, menjadikan Kecamatan Majenang sebagai pusat pelayanan distribusi yang strategis. Dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan wilayah salah satunya adalah merupakan wilayah rawan bencana di Kabupaten Cilacap (banjir dan tanah longsor hampir terjadi setiap tahun).

g Sub Wilayah Pembangunan IVb (SWP IVb)

Meliputi **Kecamatan Karangpucung** dan Cimanggu. Kontribusi PDRD didominasi oleh sektor pertanian, memiliki pendapatan perkapita di bawah pendapatan perkapita kabupaten, memiliki angka kemiskinan paling kecil dibandingkan sub wilayah lainnya, yaitu 4.04 – 4.27 % dari jumlah total penduduk kabupaten (1.642.465 jiwa, tahun 1999).

Letaknya yang strategi, yaitu jalur regional yang merupakan jalur pertemuan yang menuju Kecamatan Sidareja, Majenang dan Kabupaten Banyumas. Saat ini, perkembangan wilayah Kecamatan Karangpucung hanya terkonsentrasi pada sekitar jalur utama (linear), sehingga terjadi kesenjangan antara wilayah disekitar jalur utama kota dengan wilayah yang berada jauh dari jalur utama.

BAB IV

ANALISIS PERKEMBANGAN PUSAT SUB WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CILACAP

4.1. Analisis Pertumbuhan dan Perkembangan Pusat Sub Wilayah Pembangunan

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pusat sub wilayah pembangunan yang ada di Kabupaten Cilacap sejak ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap, berdasarkan Tinjauan Arah Pengembangan Rencana Struktur Tata Ruang Kota dalam RTRW Kabupaten Cilacap 1990/1991 – 2000/2001 (Perda No.14 Tahun 1994). Adapun yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan di sini adalah keadaan fisik pusat sub wilayah pembangunan yang tumbuh atau berkembang, dan pertumbuhan tersebut disertai perkembangan keadaan ekonomi dan sosialnya.

Dalam proses berkembangnya kota, kawasan pusat kota akan menjadi orientasi pertumbuhan dan perkembangan kota. Menurut Bourne, 1972, pertumbuhan dan perkembangan kota diawali dari kawasan pusat kotanya. Pusat kota mempunyai potensi pendorong dan penarik kekuatan sosial ekonomi yang dapat menciptakan perubahan pesat pada suatu kota. Sebagai inti kota, ada beberapa fungsi pusat kota yaitu sebagai pusat administrasi pemerintahan, pusat jasa dan perdagangan, pusat budaya dan hiburan, dan pusat transportasi. Dan perkembangan pusat sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap, dilihat dari ketersediaan fasilitas yang dimiliki, dianalisis dengan menggunakan *Skalogram Guttman*. Analisis ini menggunakan data fasilitas, seperti pada lampiran B1.1 dan B1.2.

Dari hasil perhitungan, diketahui bahwa Kota Cilacap sebagai pusat sub wilayah pembangunan Ia dan juga pusat kota kabupaten memiliki tingkat ketersediaan fasilitas yang

paling baik dan lengkap. Diperingkat kedua Kota Kroya, sedangkan Majenang dan Sidareja di peringkat ketiga. Adapun Kota Maos, Binangun dan Cimanggu memiliki ketersediaan fasilitas paling sedikit.

Pada tingkat sub wilayah pembangunan, SWP IIa dan SWP IVa merupakan sub wilayah pembangunan, dimana kota kotanya mengalami peningkatan jumlah fasilitas. SWP IIa mengalami peningkatan jumlah fasilitas paling banyak, mulai dari fasilitas pendidikan di Kota Sidareja, fasilitas sosial (ibadah) di Kota Kedungreja dan Patimuan dan fasilitas perdagangan (pasar hewan) di Kecamatan Gandrungmangu. Dan Kota Cipari merupakan satu satunya kota di sub wilayah pembangunan IIa yang tidak mengalami peningkatan jumlah fasilitas. Sedangkan penambahan fasilitas di SWP IVa hanya terdapat di Kota Majenang, yaitu fasilitas perdagangan (pasar ikan).

Kebalikan dari kedua SWP diatas, SWP IIB justru mengalami pengurangan jumlah fasilitas yang dimiliki kota kotanya. Fasilitas sosial (ibadah) berkurang di Kota Bantarsari, yang merupakan kota kecamatan hasil dari pemekaran Kecamatan Kawunganten. Lain halnya dengan SWP Ib yang mengalami perkembangan jumlah fasilitas justru terjadi di Kota Kesugihan sebagai akibat adanya pengembangan kota kearah timur. Sedangkan Kota Maos merupakan satu satunya kota di SWP Ib yang mengalami peningkatan jumlah penduduk. Hal ini, kemungkinan disebabkan oleh letak Kota Maos yang berada di antara Kota Sampang dan Kesugihan yang didukung dengan kemudahan aksesibilitas, dengan adanya peningkatan jaringan jalan secara kualitas dan kuantitas.

Sehingga guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan Kota Sampang sebagai kota pusat sub wilayah pembangunan Ib, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana. Dimana pusat pertumbuhan berperan sebagai pendorong pengembangan ekonomi wilayah pinggiran kota, menyebabkan perpindahan sebagian penduduk dari luar wilayah pusat

pertumbuhan ke pusat pertumbuhan karena daya tarik dari pusat pertumbuhan dan daya tolak wilayah di sekitar pusat pertumbuhan.

Sedangkan Kota Kroya justru memiliki penurunan jumlah sebaran fasilitas perdagangan sebagai indikator tingkat perkembangan ekonomi pada tahun 2003 jika dibandingkan tahun sebelumnya (lampiran B1.1b). Perkembangan pusat pusat sub wilayah pembangunan dan kota kota kecamatan lainnya di Kabupaten Cilacap ketersediaan fasilitasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

TABEL IV.1
TINGKAT KETERSEDIAAN FASILITAS PUSAT SWP DAN
KOTA KOTA KECAMATAN LAINNYA DI KABUPATEN CILACAP

No.	Kota	SWP	Rangking			Keterangan
			1999	2002	2003	
1	Cilacap	Ia	1	1	1	Tetap
2	Jeruklegi		5	5	5	Tetap
3	Sampang	Ib	6	6	6	Tetap
4	Kesugihan		5	4	4	Berkembang
5	Maos		7	7	7	Tetap
6	Sidareja	IIa	3	3	2	Berkembang (bertambahnya fasilitas pendidikan)
7	Cipari		5	5	5	Tetap
8	Kedungreja		6	5	5	Berkembang (tambah fasilitas ibadah)
9	Patimuan		7	5	5	Berkembang (tambah fasilitas ibadah dan pendidikan)
10	Gandrungmangu		5	4	4	Berkembang (tambah fasilitas perdagangan)
11	Kawunganten	IIb	4	4	4	Tetap
12	Bantarsari		5	6	6	Berkurang fasilitas sosial (ibadah)
13	Kroya	III	2	2	2	Tetap
14	Adipala		6	6	6	Tetap
15	Binangun		7	7	7	Tetap
16	Nusawungu		5	5	5	Tetap
17	Majenang	IVa	3	3	3	Berkembang (tambah fasilitas perdagangan)
18	Wanareja		5	5	5	Tetap
19	Dayeuhluhur		6	6	6	Tetap
20	Karangpucung	IVb	4	4	4	Tetap
21	Cimanggu		7	7	7	Tetap

Sumber: analisis 2005

Berdasarkan peningkatan jumlah penduduk pada masing masing pusat sub wilayah pembangunan dan kota kota kecamatan lainnya di Kabupaten Cilacap pada tahun 1999 –

2002 hanya Kota Majenang yang mengalami penurunan jumlah penduduk, sedangkan Kota Maos mengalami peningkatan jumlah penduduk terbesar di susul oleh Kota Sidareja, Adipala dan Karangpucung. Sebaliknya pada tahun 2003 Kota Karangpucung mengalami penurunan jumlah penduduk paling besar disusul Patimuan, Kesugihan dan Cipari. Pertumbuhan penduduk tertinggi di capai oleh Kota Wanareja disusul oleh Kota Majenang, Sidareja dan Dayeuhluhur. Secara lengkap pertumbuhan jumlah penduduk pada pusat pusat sub wilayah pembangunan dan kota kota kecamatan lainnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

TABEL IV.2
PERTUMBUHAN PENDUDUK PUSAT SWP DAN
KOTA KOTA KECAMATAN LAINNYA DI KABUPATEN CILACAP

No.	Kota	SWP	Penduduk			Keterangan
			1999	2002	2003	
1	Cilacap	Ia	212.765	219.484	221.904	Meningkat
2	Jeruklegi		11.652	11.875	11.978	Meningkat
3	Sampang	Ib	18.360	18.536	18.521	Turun 2003
4	Maos		8.649	10.151	10.187	Meningkat
5	Kesugihan		12.810	12.886	12.643	Turun 2003
6	Sidareja	Ila	32.894	37.985	39.120	Meningkat
7	Cipari		13.800	14.319	14.264	Turun 2003
8	Kedungreja		30.160	30.643	30.939	Meningkat
9	Patimuan		14.682	15.090	14.663	Turun 2003
10	Gandrungmangu		23.020	23.391	23.313	Turun 2003
11	Kawunganten	Iib	29.689	29.828	29.812	Turun 2003
12	Bantarsari		48.483	48.860	49.263	Meningkat
13	Kroya	III	49.490	50.130	50.263	Meningkat
14	Adipala		19.472	21.921	22.014	Meningkat
15	Binangun		17.314	18.136	18.224	Meningkat
16	Nusawungu		17.158	17.499	17.579	Meningkat
17	Majenang	IVa	50.818	50.797	53.804	Turun 2002 dari 1999
18	Wanareja		17.452	17.707	18.943	Meningkat
19	Dayeuhluhur		7.686	7.850	7.948	Meningkat
20	Karangpucung	IVb	20.808	23.169	21.344	Turun 2003
21	Cimanggu		26.859	27.299	27.345	Meningkat

Sumber: analisis 2005

Sedangkan perkembangan yang terjadi pada masing masing pusat sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

Apabila dilihat dari kepadatan jumlah penduduk, Kota Cilacap memiliki tingkat kepadatan yang tinggi yaitu 4429.22 jiwa/km², untuk tingkat kepadatan rendah yaitu kurang dari 1000 jiwa/km² dialami oleh Kota Kawunganten, Karangpucung, Jerukiegi, Dayeuhluhur, Wanareja, Cipari dan Cimanggu. Sedangkan Kota kota lainnya memiliki tingkat kepadatan sedang yaitu antara 1000 – 3000 jiwa/km². Hal ini semakin membuktikan bahwa telah terjadi pemusatan kegiatan di pusat kota kabupaten, di mana Kota Cilacap dianggap sebagai aktor utama dalam pembangunan berkembang jauh lebih pesat dibandingkan wilayah lainnya di Kabupaten Cilacap. Berkembangnya suatu kota yang ditandai dengan berkembangnya perekonomian melalui masuknya arus investasi dan berkembangnya sektor industri, perdagangan dan jasa serta perkembangan penduduk yang bermigrasi untuk mengisi kesempatan kerja yang timbul akibat perkembangan ekonomi yang didukung oleh tingkat kelengkapan prasarana kota yang mencukupi, terutama yang menghubungkan kota pusat pertumbuhan dengan daerah dibelakang (Parr: 1999). Hal ini dapat dilihat lebih rinci pada rekapitulasi panjang jalan menurut jenis permukaan pada lampiran B1.3.

4.2 Analisis Sektor Unggulan (Perkembangan perekonomian daerah belakaug)

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* dan *Shift Share*, maka perkembangan pada masing masing sub wilayah pembangunan dalam RTRW Kabupaten Cilacap 1990/1991 – 2000/2001 (Perda No. 14 Tahun 1994), sektor yang memiliki pertumbuhan pesat dan berpengaruh positif terhadap PAD adalah pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Dan hanya Kota Cilacap dan Kecamatan Kesugihan yang sebagian besar pendapatannya berasal dari sektor sektor yang pesat pertumbuhannya, sehingga porsinya akan meningkat dalam perekonomian wilayah Kabupaten Cilacap (*ceteris paribus*). Tetapi, apabila yang

terjadi sebaliknya, maka pendapatan di daerah tersebut akan tumbuh di bawah tingkat pertumbuhan wilayah.

4.2.1 Sektor Basis

Hampir semua kecamatan mengalami kemunduran dari sektor sektor basisnya dan pendapatan perkapita pada tiap kecamatan rata rata terus meningkat walaupun sempat mengalami fluktuasi pada tahun 1998 – 1999 akibat krisis moneter, kecuali kecamatan Sampang dan Kesugihan serta Kecamatan Bantarsari yang merupakan pemekaran Kawunganten pada tahun 1999. Adapun Kecamatan kecamatan yang tidak mengalami kemunduran dari sektor basisnya, yaitu Kecamatan Kawunganten, Bantarsari, Nusawungu dan Majenang. Secara lebih jelas perkembangan perekonomian pada masing masing sub wilayah pembangunan menurut sektor basisnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL IV.3
SEKTOR BASIS SUB WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CILACAP

No	SWP	Sektor									Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Ia		√	√	√	√		√	√	√	1 – 9 merupakan nomor sektor, mulai dari sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan,; perdagangan, hotel dan restaurant; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa jasa
2	Ib		√	√	√	√		√	√	√	
3	IIa	√	√				√		√		
4	IIb	√							√		
5	III	√					√	√		√	
6	IVa	√					√				
7	IVb	√							√	√	

Sumber : Analisis 2005, PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 – 2002 diolah

Dari tabel tersebut dapat diketahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor sektor pada suatu daerah, atau sektor sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau unggulan. Sehingga dapat digunakan untuk menentukan sektor-sektor basis ekonomi yang layak untuk dikembangkan di suatu wilayah/kota. Permintaan dari luar wilayah/kota akan mempengaruhi sektor basis dan nonbasis. Sektor basis yang ada di suatu daerah akan memberikan kontribusi berupa peningkatan pendapatan daerah. Dengan demikian sektor basis merupakan

penggerak utama, dimana setiap perubahan yang terjadi akan memberikan efek menyebar terhadap sistem perekonomian wilayah. Secara lebih lengkap sektor basis tiap kecamatan dapat dilihat dalam lampiran Tabel B2.3.

4.2.2 Sektor yang Mengalami Peningkatan Daya Saing

Sektor yang mengalami peningkatan daya saing adalah sektor yang memiliki keunggulan komparatif dalam kaitannya dengan daerah lain dalam waktu kajian. Suatu sektor dianggap mengalami peningkatan daya saing apabila memiliki nilai positif pada komponen pergeseran atau pertumbuhan pangsa wilayahnya. Komponen ini merupakan komponen terpenting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah.


Dan semua sektor mengalami peningkatan daya saing di SWP IIB. Sedangkan SWP IVb memiliki sektor sektor yang mengalami peningkatan daya saing paling sedikit. Untuk lebih jelasnya, sektor sektor yang mengalami peningkatan daya saing pada masing masing sub wilayah pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

TABEL IV.4
SEKTOR SEKTOR YANG MENGALAMI PENINGKATAN DAYA SAING
PADA SUB WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CILACAP

No.	SWP	Sektor									Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Ia		√		√			√	√		1 – 9 merupakan nomor sektor, mulai dari sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restaurant; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa jasa
2	Ib	√		√	√	√	√	√			
3	IIa		√					√	√	√	
4	IIb	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5	III		√	√		√			√	√	
6	IVa		√	√	√		√		√		
7	IVb		√			√		√		√	

Sumber : Analisis 2005, PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 – 2002 diolah

Secara lebih rinci, sektor sektor yang mengalami peningkatan daya saing pada masing masing sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



MAGISTER TEKNIK
PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO










TUGAS MATA KULIAH
TESIS

PERKEMBANGAN PUSAT WILAYAH PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN CILACAP

GAMBAR


SEKTOR SEKTOR UNGGULAN
SUB WILAYAH PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN CILACAP

Legenda :

-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Jalan Nasional
-  Jalan Propinsi
-  Jalan Kabupaten
-  Jalan Kereta api
-  Sungai
-  Kota Kabupaten/KPPKN
-  Kantor Kecamatan

SKALA

1 : 1.250.000



UTARA

SKALA

1 : 1.250.000

0 12,5 25km

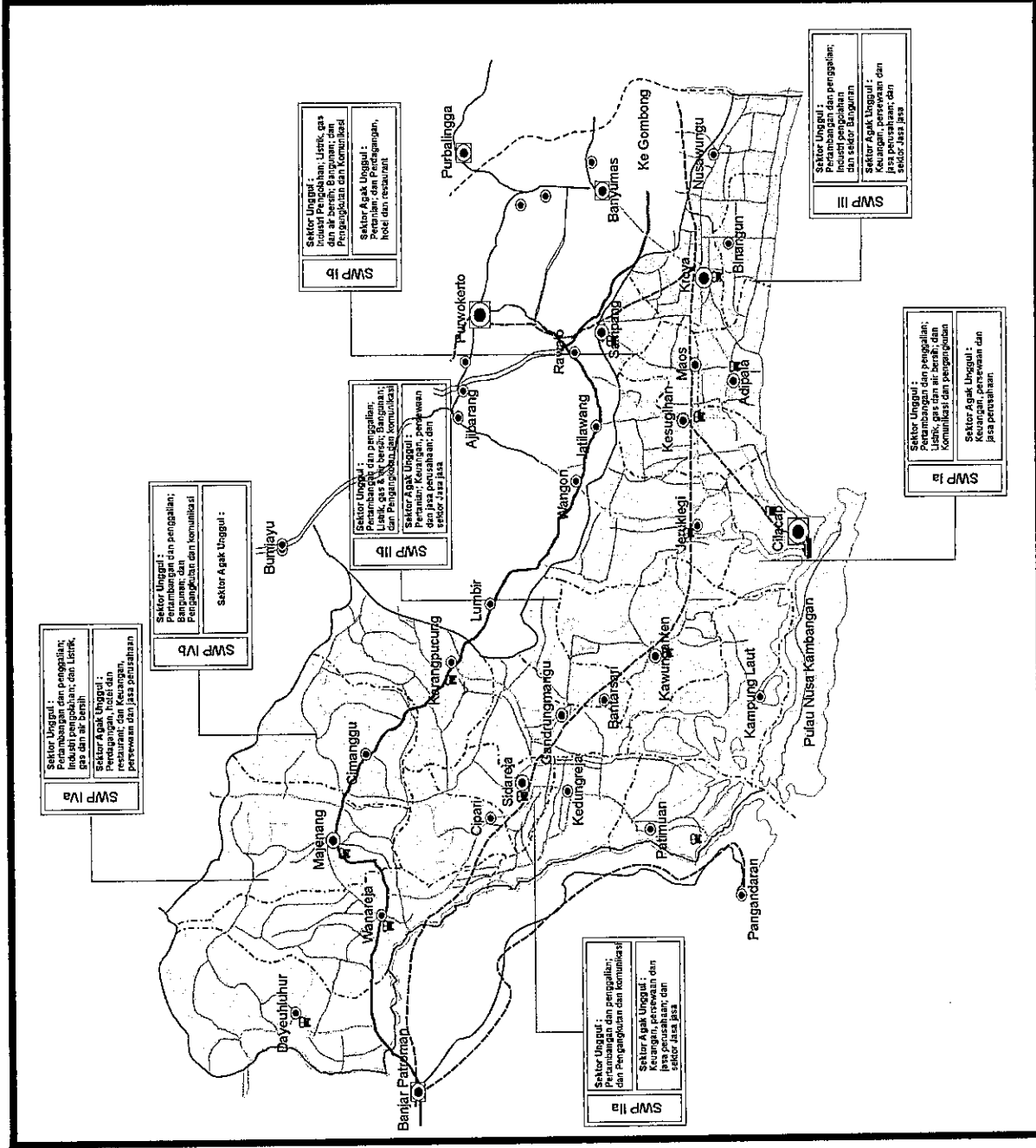
UTARA

NO. GAMBAR

IV.2

SUMBER

ANALISIS 2005



4.2.3 Sektor Basis Dan Sektor Yang Mengalami Peningkatan Daya Saing



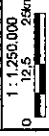
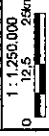
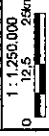
Selanjutnya untuk analisis secara keseluruhan terhadap sektor sektor apa saja yang merupakan sektor basis dan sekaligus merupakan sektor yang mengalami peningkatan daya saing dari sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap dilakukan analisis gabungan. Adapun penggabungan hasil dari kedua analisis tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

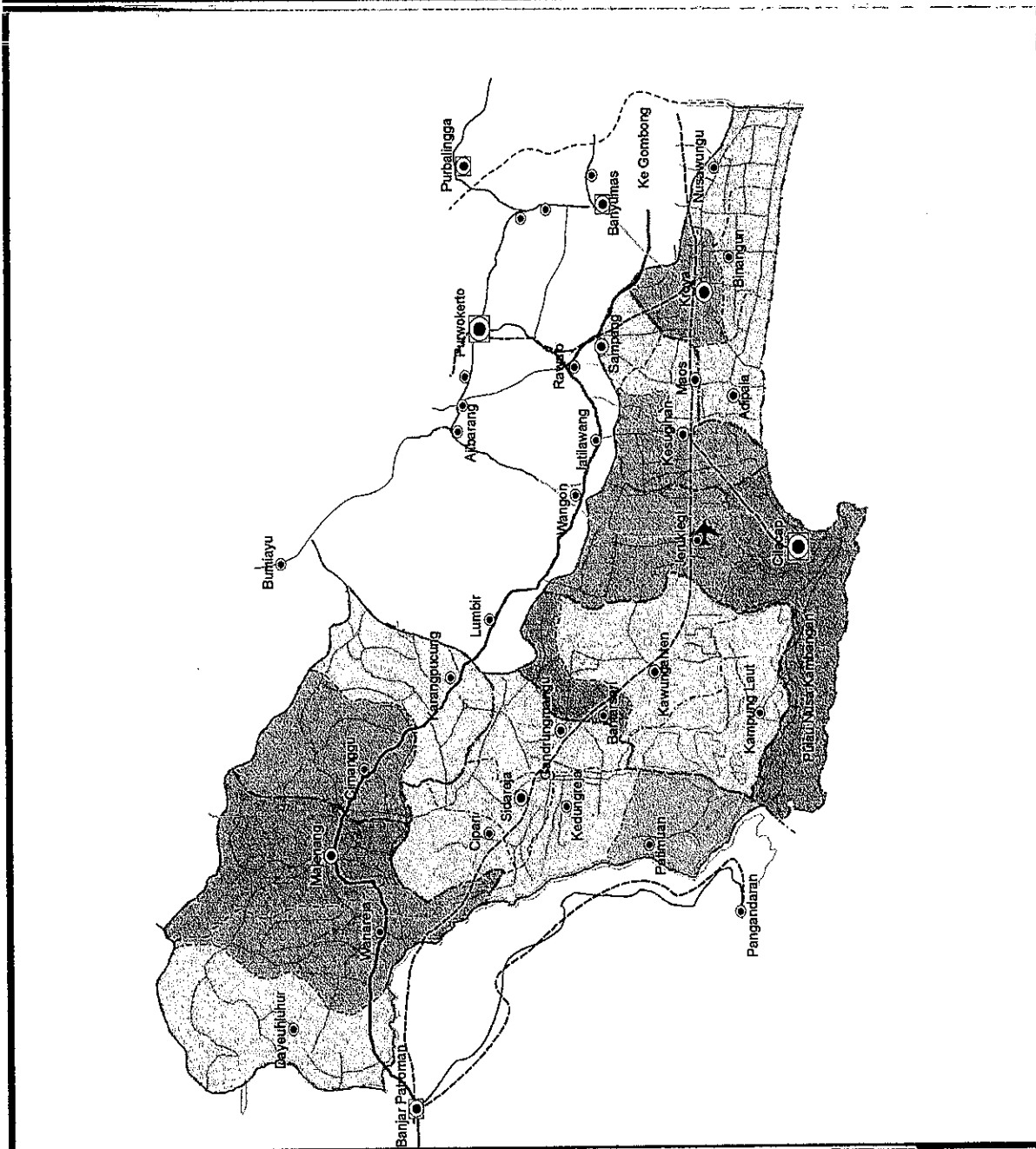
TABEL IV.5
SEKTOR BASIS DAN SEKTOR
YANG MENGALAMI PENINGKATAN DAYA SAING
PADA SUB WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CILACAP



No	SWP	Sektor									Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Ia		√		√			√	√		1 – 9 merupakan nomor sektor, mulai dari sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan,; perdagangan, hotel dan restaurant; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa jasa
2	Ib			√	√	√		√			
3	IIa		√						√		
4	IIb	√							√		
5	III								√	√	
6	IVa						√				
7	IVb									√	

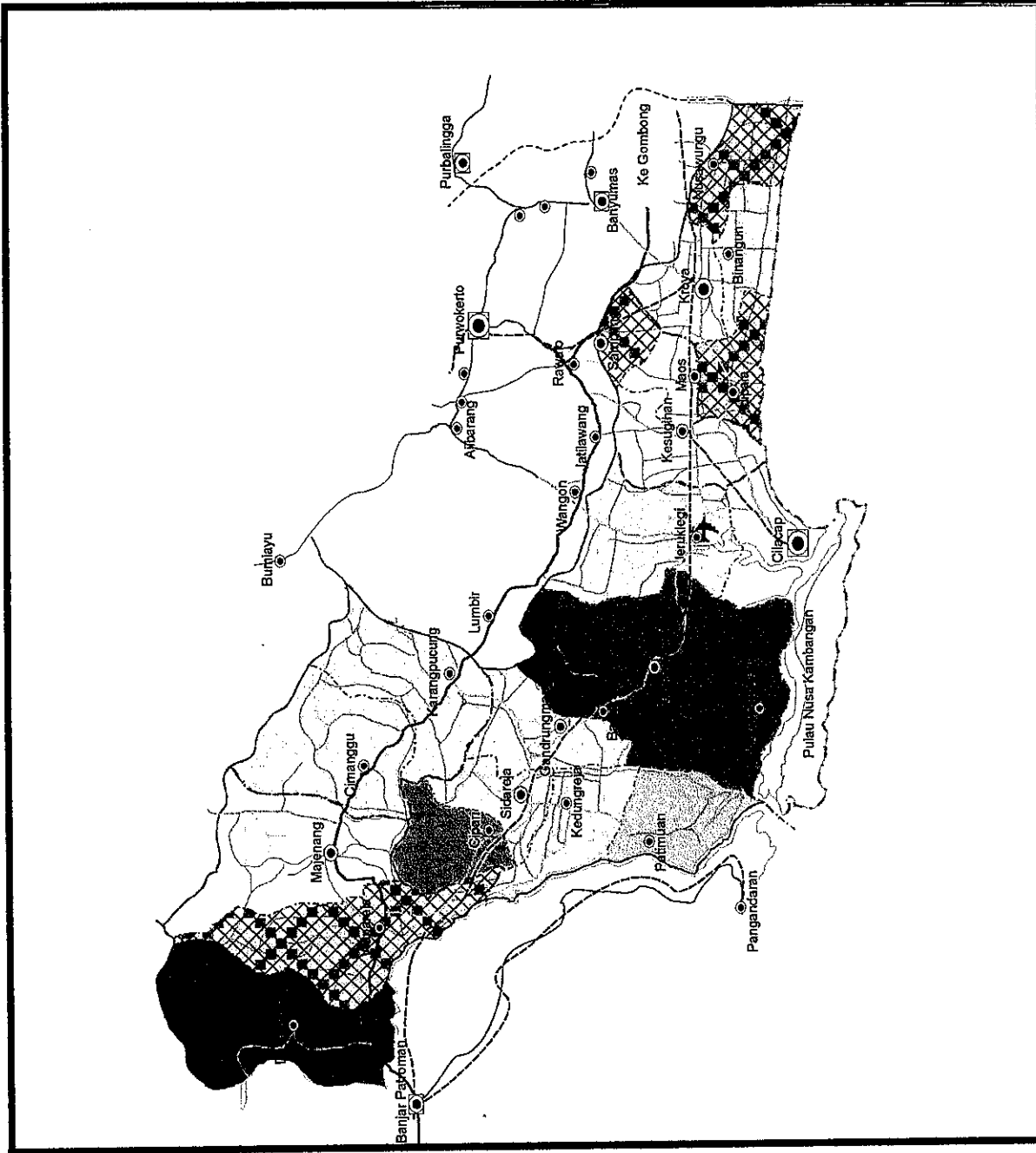
Sumber : Analisis 2005, PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 – 2002 diolah










Sesuai dengan apa yang dimaksud dengan sektor basis dan sektor yang mengalami peningkatan daya saing, maka suatu sektor yang merupakan sektor basis sekaligus sektor yang mengalami peningkatan daya saing adalah sektor yang layak untuk dikembangkan di suatu wilayah/kota dan memiliki keunggulan komparatif dalam kaitannya dengan daerah lain dalam waktu kajian. Sehingga setiap perubahan yang terjadi akan memberikan efek menyebar terhadap sistem perekonomian wilayah dan sekaligus merupakan komponen terpenting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan sebaran masing masing sektor pada tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada Gambar IV.3 – IV.12

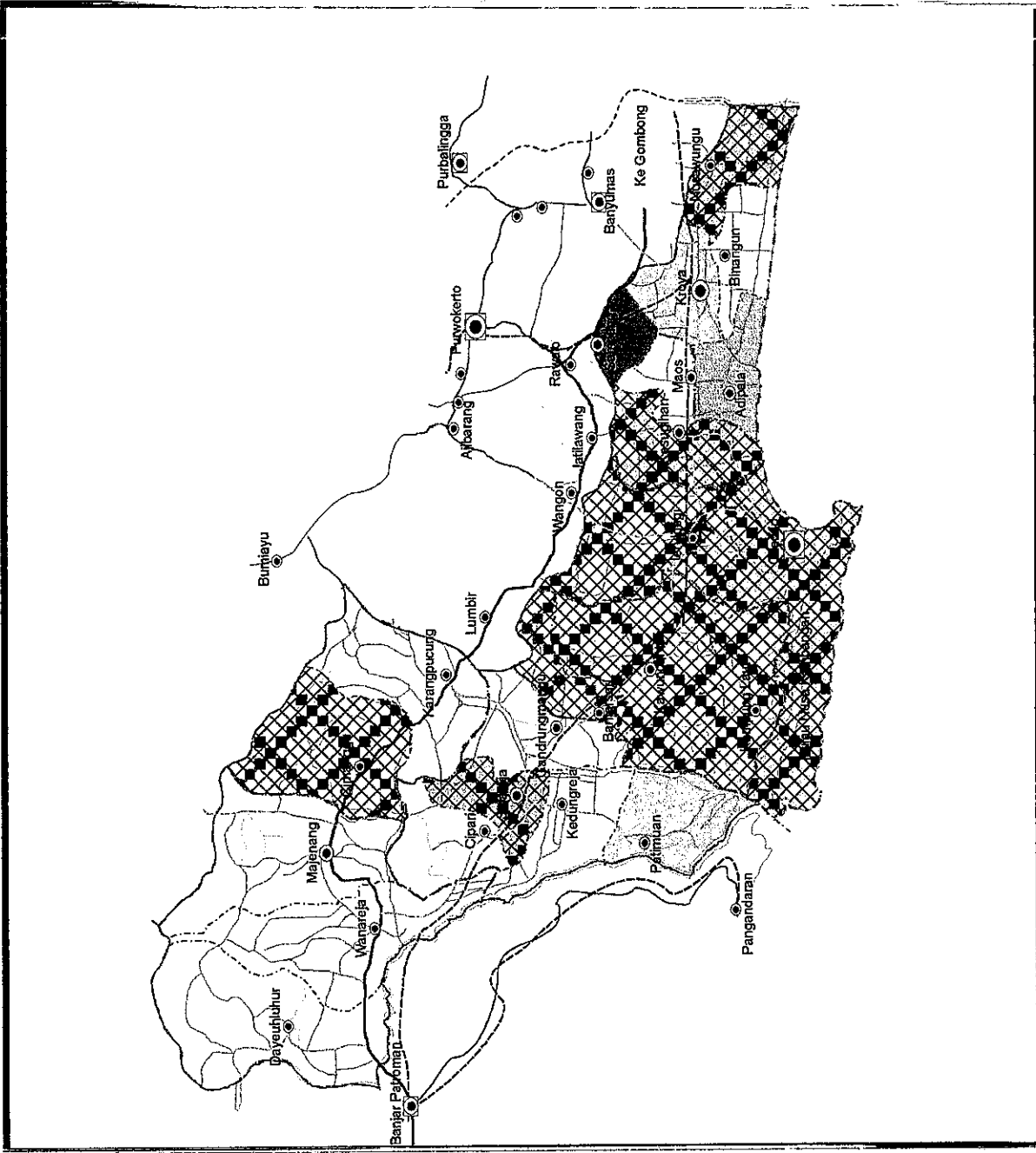
 <p>MAGISTER TEKNIK PERKEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	<p>TUGAS MATA KULIAH TESIS</p>								
<p>PERKEMBANGAN PUSAT WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CILACAP</p>									
<p>GAMBAR</p>									
<p>TINGKAT SPESIALISASI DAN KEUNGGULAN SEKTOR JASA JASA TIAP KOTA DAN KECAMATAN DI KABUPATEN CILACAP</p>									
<p>Legenda :</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 15px; background-color: #cccccc;"></td> <td>: Kontributor I >= 5.5%</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 15px; background-color: #999999;"></td> <td>: Kontributor II 4 - 5.48%</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 15px; background-color: #666666;"></td> <td>: Kontributor III 2.5 - 3.99%</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 15px; background-color: #333333;"></td> <td>: Kontributor IV 1 - 2.49%</td> </tr> </table>			: Kontributor I >= 5.5%		: Kontributor II 4 - 5.48%		: Kontributor III 2.5 - 3.99%		: Kontributor IV 1 - 2.49%
	: Kontributor I >= 5.5%								
	: Kontributor II 4 - 5.48%								
	: Kontributor III 2.5 - 3.99%								
	: Kontributor IV 1 - 2.49%								
 <p>UTARA</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">SKALA</td> <td style="text-align: center;">No. GAMBAR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 1 : 1.250.000  </td> <td style="text-align: center;">IV.3</td> </tr> </table>	SKALA	No. GAMBAR	1 : 1.250.000 	IV.3				
SKALA	No. GAMBAR								
1 : 1.250.000 	IV.3								
<p>SUMBER</p>									
<p>ANALISIS 2005</p>									













 <p>MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	<p>TUGAS MATA KULIAH TESIS</p>
<p>PERKEMBANGAN PUSAT WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CILACAP</p>	
<p>GAMBAR</p>	
<p>TINGKAT SPESIALISASI DAN KELINGGULAN SEKTOR PERTANIAN TIAP KOTA DAN KECAMATAN DI KABUPATEN CILACAP</p>	
<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> : Tingkat Spesialisasi ≥ 3 : Tingkat Spesialisasi 2,5 - 2,99 : Tingkat Spesialisasi 2 - 2,49 : Tingkat Spesialisasi 1,5 - 1,99 : Tingkat Spesialisasi 1 - 1,49 : Sektor Unggul : Sektor Agak Unggul 	
	<p>SKALA</p> <p>1 : 1.250.000</p> <p>0 12,5 25 km</p>
<p>NO. GAMBAR</p> <p>IV.4</p>	
<p>SUMBER</p>	
<p>ANALISIS 2005</p>	

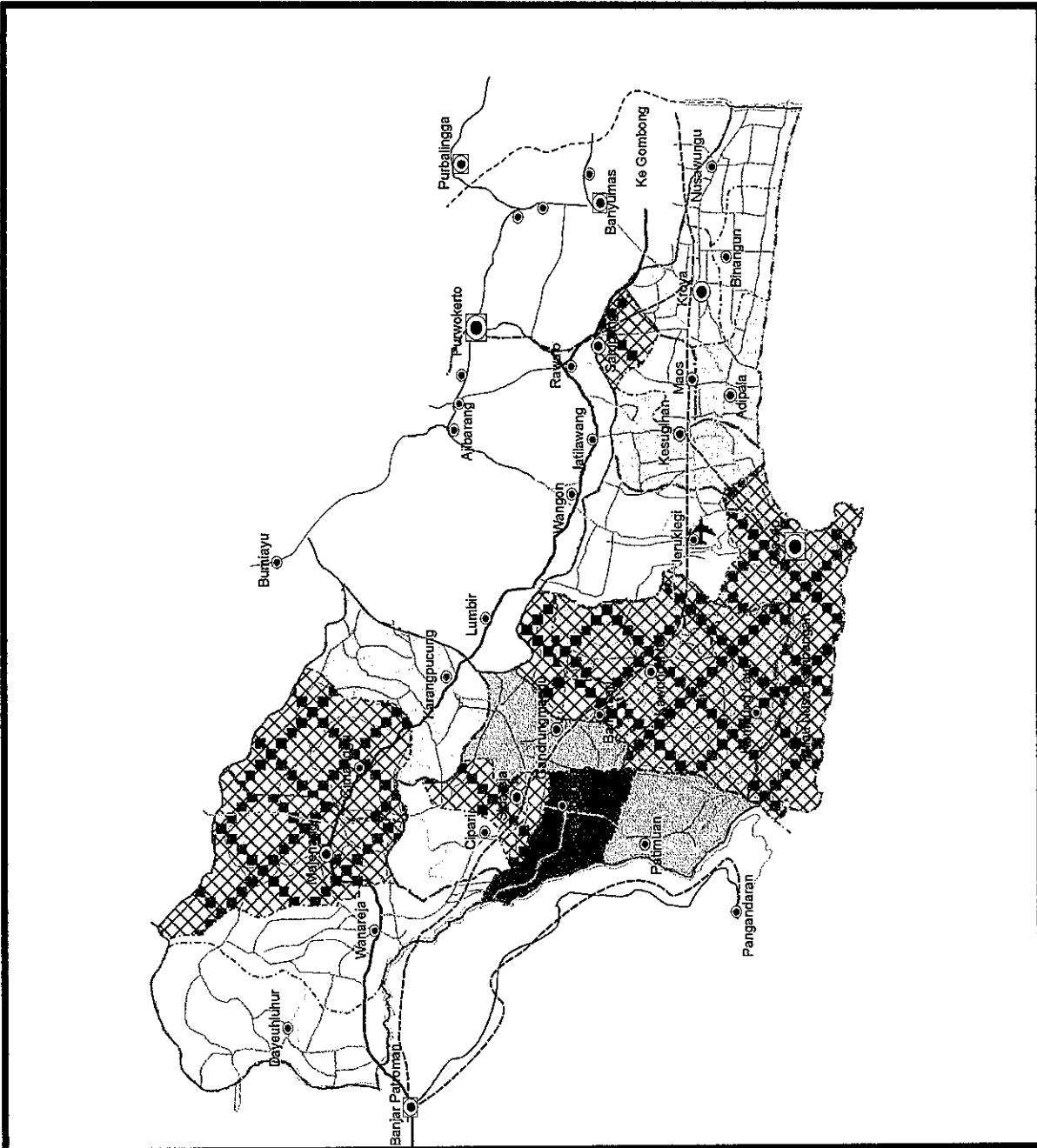











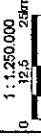
 <p>MAKOSTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	<p>TUGAS MATA KULIAH TESIS</p>
<p>PERKEMBANGAN PUSAT WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CILACAP</p>	
<p>GAMBAR</p>	
<p>TINGKAT SPESIALISASI DAN KELINGGILAN SEKTOR PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI TIAP-KOTA DAN KECAMATAN DI KABUPATEN CILACAP</p>	
<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none">  : Tingkat Spesialisasi > / = 3  : Tingkat Spesialisasi 2.5 - 2.99  : Tingkat Spesialisasi 2 - 2.49  : Tingkat Spesialisasi 1.5 - 1.99  : Tingkat Spesialisasi 1 - 1.49  : Sektor Unggul  : Sektor Agak Unggul 	
 <p>UTARA</p>	<p>SKALA</p> <p>1 : 1.250.000</p> <p>0 12,5 25 km</p>
<p>No. GAMBAR</p> <p>IV.10</p>	<p>SUMBER</p>
<p>ANALISIS 2005</p>	

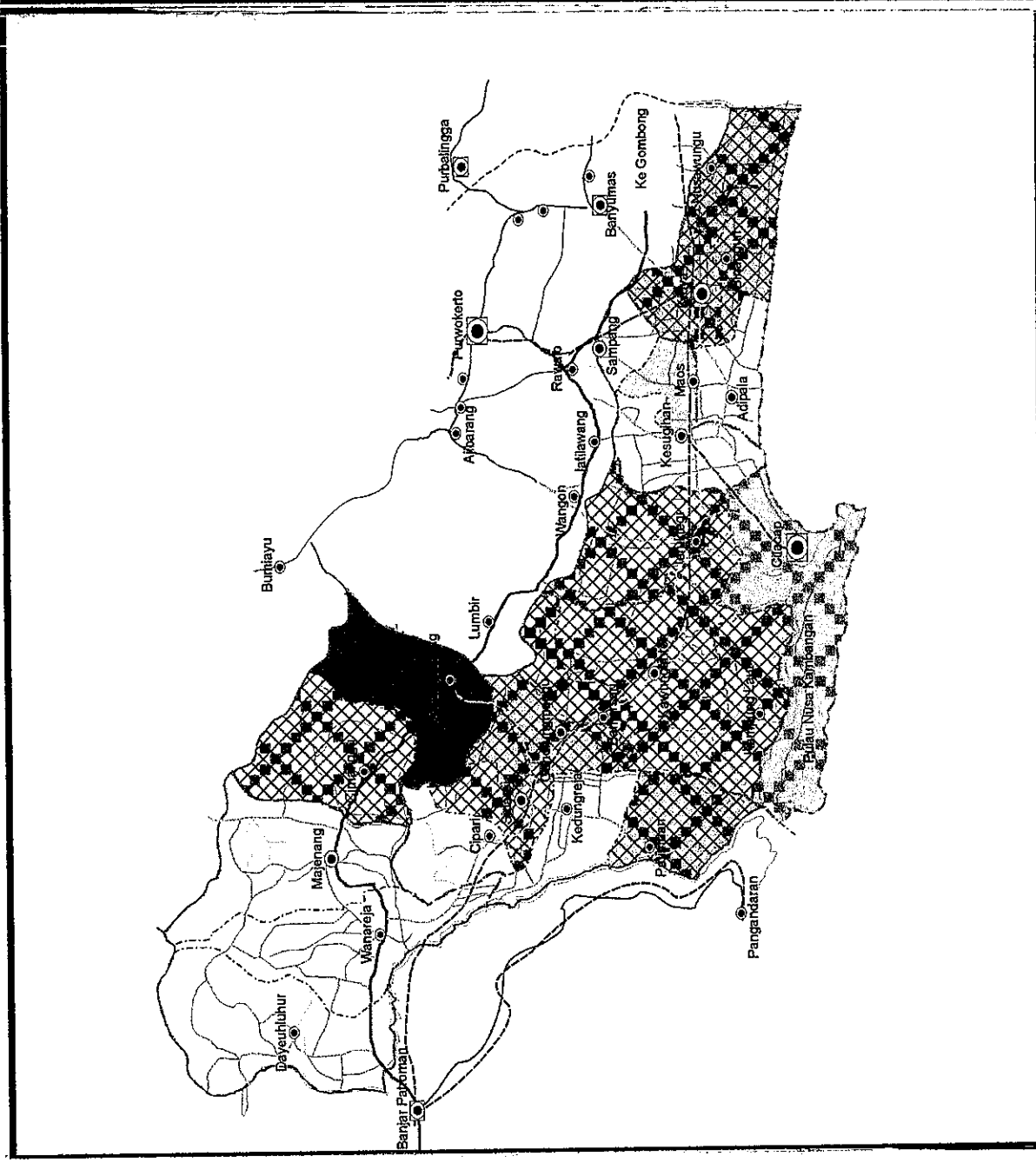


UNIVERSITAS DIPONEGORO
 FAKULTAS TEKNIK
 JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN

 <p>MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	<p>TUGAS MATA KULIAH TESIS</p>
<p>PERKEMBANGAN PUSAT WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CILACAP</p>	
<p>GAMBAR</p>	
<p>TINGKAT SPESIALISASI DAN KEUNGGULAN SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN TIAP KOTADAN NECAMATAN DI KABUPATEN CILACAP</p>	
<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none">  : Tingkat Spesialisasi ≥ 3  : Tingkat Spesialisasi 2,5 - 2,89  : Tingkat Spesialisasi 2 - 2,49  : Tingkat Spesialisasi 1,5 - 1,99  : Tingkat Spesialisasi 1 - 1,49  : Sektor Unggul  : Sektor Agak Unggul 	
	<p>SKALA</p> <p>1 : 1.250.000</p> 
<p>No. GAMBAR</p> <p>IV.11</p>	
<p>SUMBER</p>	
<p>ANALISIS 2005</p>	



 <p>MAKSTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	<p>TUGAS MATA KULIAH TESIS</p>
<p>PERKEMBANGAN PUSAT WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CILACAP</p>	
<p>GAMBAR</p>	
<p>TINGKAT SPESIALISASI DAN KEUNGGULAN SEKTOR JASA JASA TIAP KOTA DAN KECAMATAN DI KABUPATEN CILACAP</p>	
<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none">  : Tingkat Spesialisasi > / = 3  : Tingkat Spesialisasi 2,5 - 2,99  : Tingkat Spesialisasi 2 - 2,49  : Tingkat Spesialisasi 1,5 - 1,99  : Tingkat Spesialisasi 1 - 1,49  : Sektor Unggul  : Sektor Agak Unggul 	
	<p>SKALA</p> <p>1 : 1.250.000</p> 
<p>No. GAMBAR</p> <p>IV.12</p>	
<p>SUMBER</p>	
<p>ANALISIS 2005</p>	



4.3 Keterkaitan Pertumbuhan Dan Perkembangan Pusat SWP dan Perkembangan Ekonomi Daerah Belakang

Tujuan dari analisis keterkaitan pertumbuhan dan perkembangan pusat sub wilayah pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi daerah belakang adalah untuk mengetahui sejauhmana pertumbuhan dan perkembangan pusat sub wilayah pembangunan mempengaruhi perkembangan wilayahnya. Dan sektor sektor apa saja yang layak dikembangkan dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dikaitkan dengan sektor sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam sub wilayahnya.

Dari hasil analisis pertumbuhan dan perkembangan pusat sub wilayah pembangunan yang dilihat dari ketersediaan fasilitasnya, dapat diketahui bahwa tingkat kelengkapan fasilitas dan berkembangnya perekonomian yang didukung oleh tingkat kelengkapan prasarana kota yang mencukupi, terutama jaringan jalan berpengaruh terhadap perkembangan penduduk. Tetapi ada beberapa daerah yang mengalami penurunan jumlah penduduk walaupun memiliki tingkat kelengkapan prasarana kota yang mencukupi terutama jaringan jalan. Sehingga, agar tidak mengalami penurunan jumlah penduduk, maka sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan guna mendukung kinerja pusat sub wilayah pembangunan, selain tingkat kelengkapan fasilitas yang didukung oleh tingkat kelengkapan prasarana kota yang mencukupi, terutama jaringan jalan juga perlu disertai kemampuan kota pusat pertumbuhan untuk menarik investasi sektor industri.

Dan sesuai dengan tujuan dari dilakukannya analisis ini, maka kedua analisis tersebut digabungkan dalam satu tabel. Adapun penggabungan dari kedua analisa tersebut dapat dilihat dalam Tabel IV.6.

TABEL IV.6
KETERKAITAN PUSAT SUB WILAYAH PEMBANGUNAN DENGAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH BELAKANG
(1 - 9, merupakan nomor urut sektor yang dimulai dari sektor pertanian sampai dengan jasa jasa)

No. SWP	Kota	Ketersediaan Fasilitas	Jumlah Penduduk	Fasilitas Jalan Menurut Permukaan	Sektor Basis SWP	Sektor Unggul SWP	Kontribusi Terbesar
1	Cilacap	Tetap	Meningkat	Bertambah Kualitas dan Kuantitas, 2003 tidak bertambah	2, 3, 4, 5, 7, 8 dan 9	2, 4, 7 dan 8	3, 6, 1 & 9
2	Jeruklegi	Tetap	Meningkat	Bertambah Kualitas dan Kuantitas, 2003 tidak bertambah	2, 3, 4, 5, 7, 8 dan 9	2, 4, 7 dan 8	3, 6, 1 & 9
3	Sampang	Tetap	Menurun tahun 2003	Jalur jalan semakin pendek, terjadi penurunan kualitas dan kuantitas	2, 3, 4, 5, 7, 8 dan 9	3, 4, 5, 7, 1 dan 6	1, 6, 3 & 5
4	Maos	Tetap	Meningkat	Bertambah Kualitas dan Kuantitas	2, 3, 4, 5, 7, 8 dan 9	3, 4, 5, 7, 1 dan 6	1, 6, 3 & 5
5	Kesugihan	Berkembang (Bertambahnya fasilitas pendidikan)	Menurun tahun 2003	2002 - 2003 terjadi peningkatan kualitas	2, 3, 4, 5, 7, 8 dan 9	3, 4, 5, 7, 1 dan 6	1, 6, 3 & 5
6	Sidareja	Berkembang (Bertambahnya fasilitas pendidikan)	Meningkat	Jalur jalan yang ada semakin pendek, terjadi peningkatan kualitas, 2003 tetap	2, 3, 4, 5, 7, 8 dan 9	3, 4, 5, 7, 1 dan 6	1, 6, 3 & 5
7	Cipari	Berkembang (Bertambahnya fasilitas pendidikan)	Menurun tahun 2003	Jalur jalan yang ada semakin pendek, terjadi peningkatan kualitas, 2003 tetap	2, 3, 4, 5, 7, 8 dan 9	3, 4, 5, 7, 1 dan 6	1, 6, 3 & 5
8	Kedungreja	Tetap	Meningkat	Bertambah Kualitas dan Kuantitas	1, 2, 6 dan 8	2, 7, 8 dan 9	1, 6, 3 & 9
9	Patimuan	Berkembang (Bertambahnya fasilitas pendidikan dan ibadah)	Menurun tahun 2003	Bertambah Kualitas dan Kuantitas, 2003 tidak bertambah	1, 2, 6 dan 8	2, 7, 8 dan 9	1, 6, 3 & 9
10	Gandungmangu	Berkembang (Bertambahnya fasilitas perdagangan)	Menurun tahun 2003	Bertambah Kualitas, 2003 tetap	1, 2, 6 dan 8	2, 7, 8 dan 9	1, 6, 3 & 9
11	Kawunganten	Tetap	Menurun tahun 2003	Bertambah Kualitas dan Kuantitas, 2003 tidak bertambah	1 dan 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9	1, 6, 9 & 8
12	Bantarsari	Berkurang (Fasilitas ibadah)	Meningkat	Bertambah Kualitas dan Kuantitas, 2003 tidak bertambah	1 dan 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9	1, 6, 9 & 8
13	Kroya	Tetap	Meningkat	Bertambah Kualitas dan Kuantitas, 2003 tidak bertambah	1 dan 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9	1, 6, 9 & 8
14	Adipala	Tetap	Meningkat	Jalur jalan yang ada semakin pendek, terjadi peningkatan kualitas	1, 6, 7 dan 9	2, 3, 5, 8 dan 9	1, 3, 6 & 9
15	Binangun	Tetap	Meningkat	Bertambah Kualitas dan Kuantitas, 2003 tidak bertambah	1, 6, 7 dan 9	2, 3, 5, 8 dan 9	1, 3, 6 & 9
16	Nusawungu	Tetap	Meningkat	Jalur jalan yang ada semakin pendek, terjadi peningkatan kualitas	1, 6, 7 dan 9	2, 3, 5, 8 dan 9	1, 3, 6 & 9
17	Majenang	Berkembang (Bertambahnya fasilitas perdagangan)	Menurun tahun 2002 dari tahun 1999	Bertambah Kualitas, 2003 tetap	1 dan 6	2, 3, 4, 6 dan 8	1, 6, 3 & 9
18	Wanareja	Tetap	Meningkat	Bertambah Kualitas dan Kuantitas	1 dan 6	2, 3, 4, 6 dan 8	1, 6, 3 & 9
19	Dayeuhluhur	Tetap	Meningkat	Bertambah kuantitas dan terjadi penurunan kualitas	1 dan 6	2, 3, 4, 6 dan 8	1, 6, 3 & 9
20	Karangpucung	Tetap	Menurun tahun 2003	Bertambah Kualitas, 2003 tetap	1, 8 dan 9	2, 5, 7 dan 9	1, 6, 3 & 9
21	Cimanggu	Tetap	Meningkat	Bertambah Kualitas dan Kuantitas	1, 8 dan 9	2, 5, 7 dan 9	1, 6, 3 & 9

Sumber : Analisis 2005

Dan hasil dari penggabungan kedua analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa, perkembangan yang terjadi dipusat pusat sub wilayah pembangunan yang ada menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas yang ditunjang dengan kelengkapan jaringan jalan yang semakin memadai serta kondisi geografis masing masing pusat sub wilayah pembangunan tidak mempengaruhi perkembangan wilayahnya. Terlihat dari tingkat kelengkapan yang dimiliki oleh Kota Cilacap, Kroya, Majenang dan Sidareja tidak mempengaruhi perkembangan wilayahnya. Karena pertumbuhan ekonomi paling baik justru terjadi di SWP IIb dan SWP Ib, baru kemudian SWP IVa, SWP Ia dan SWP III, sedangkan pertumbuhan ekonomi paling kecil dialami oleh SWP IIa.

Dari hasil penggabungan kedua analisis tersebut juga terlihat bahwa sektor basis belum tentu merupakan sektor sektor yang mengalami peningkatan daya saing, dan sektor sektor yang mengalami peningkatan daya saing belum tentu merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa dari sektor sektor yang memberikan kontribusi terbesar terdapat tiga pola pengembangan, yaitu:

1. Berdasarkan sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restaurant dan sektor jasa jasa. Walaupun untuk Kota Cilacap urutan pertama ditempati oleh sektor industri pengolahan sedangkan sektor pertanian diposisi ketiga.
2. Berdasarkan sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor bangunan, dan sektor perdagangan, hotel dan restaurant.
3. Berdasarkan sektor pertanian, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restaurant, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa jasa.

Berdasarkan sektor basis, sektor yang mengalami peningkatan daya saing dan sektor sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB serta, maka dapat disimpulkan bahwa SWP Ib pola pengembangan pada sektor industri pengolahan dan sektor bangunan,

SWP Iib pada sektor pertanian dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, SWP III dan SWP IVb pada sektor jasa dan SWP IVa pada sektor perdagangan, hotel dan restaurant. Dan jika pola kedua berdasarkan pada sektor basis yang memiliki keterkaitan dengan sektor sektor yang mengalami peningkatan daya saing, maka secara lebih jelas pola pengembangan yang terjadi pada masing masing sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL IV.7
POLA PENGEMBANGAN SUB WILAYAH PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN CILACAP

No.	Kota	SWP	Pola Pengembangan yang Terjadi (Sektor)		Keterangan
			I	II	
1	Cilacap	Ia		2, 4, 7 dan 8	1 - 9 merupakan nomor sektor, mulai dari sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan,; perdagangan, hotel dan restaurant; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa jasa
2	Sampang	Ib	3 dan 5	4 dan 7	
3	Sidareja	Ila		2 dan 8	
4	Kawunganten	Iib	1 dan 8		
5	Kroya	III	9		
6	Majenang	IVa	6		
7	Karangpucung	IVb	9		

Sumber : analisis 2005

Dari tabel tersebut terlihat bahwa sektor pertanian merupakan merupakan sektor basis di 5 (lima) SWP dan mengalami kemunduran di sub sub wilayah pembangunan tersebut dan justru mengalami peningkatan daya saing selain di SWP Iib juga di SWP Ib. Padahal, Kabupaten Cilacap selain memiliki angka kemiskinan \pm 40% menurut hasil pendataan desa mengenai identifikasi penduduk miskin yang telah dilakukan pada tahun 1999, penyumbang terbesar dalam PDRB adalah sektor pertanian, dan sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian di sektor pertanian, yaitu sebanyak 268.605 orang atau 64,91% dari jumlah penduduk bekerja.

Sehingga perlu adanya pola pengembangan baru yang lebih memperhatikan sektor pertanian. Karena keterkaitan dengan kegiatan ekonomi lokal merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan wilayah. Dan pengembangan wilayah di masa yang akan

datang merupakan suatu kerangka untuk tindakan tindakan bagi terbentuknya suatu pembangunan lokal (*local development*), yang diartikan sebagai penumbuhan suatu lokalitas secara sosial ekonomi dengan lebih mandiri, berdasarkan potensi potensi yang dimilikinya, baik sumber daya alam, geografis, kelembagaan maupun yang lainnya.

Orientasi pengembangan wilayah seharusnya memiliki perspektif jangka panjang, karena telah terintegrasinya bagian bagian dunia menjadi suatu ekonomi global maka syarat ketahanan (*survival*) bagi suatu wilayah adalah harus mempunyai akses dan cukup kompetitif. Artinya wilayah harus mampu menempatkan diri dalam jaringan (*networking*) ekonomi nasional dan global. Dan faktor yang berpengaruh dalam penetapan strategi pusat pertumbuhan agar berjalan secara optimal selain pemusatan prasarana kota pada pusat pertumbuhan yang meliputi prasarana jalan terutama yang menghubungkan pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya, juga adanya konsentrasi atau aglomerasi aktivitas ekonomi di kota pusat pertumbuhan terutama industri yang memiliki kaitan ke depan dan belakangnya (*forward dan backward linkage*).

Selain itu, menurut Sukirno (1976) dan Arsyad (1999) dalam Badrul Munir (2002), cara terbaik yang dianut dalam pembangunan daerah adalah dengan pengembangan sektor pertanian. Hal ini dilakukan dengan dengan pertimbangan:

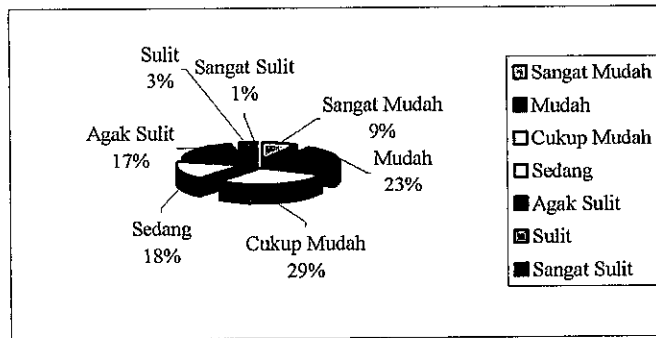
1. Sebagian besar penduduk hidup dan bekerja di sektor pertanian, padahal sektor pertanian merupakan kantong kemiskinan dibarengi laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi.
2. Kalau kemiskinan di daerah pertanian dibiarkan, akan terjadi arus urbanisasi yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan pengangguran di kota kota dengan segala konsekuensinya.

3. jika dilakukan pilihan pembangunan di sektor industri, pengembangan sektor ini tidak dapat menampung tambahan tenaga kerja secara signifikan, selain itu sektor industri sangat rentan terhadap pelestarian lingkungan.
4. Sektor pertanian perlu terus dibangun untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat serta untuk diekspor untuk memperoleh tambahan devisa.
5. Sektor pertanian telah terbukti memiliki daya tahan yang kuat terhadap pengaruh krisis ekonomi, walaupun sektor ini dilai lamban dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

4.4 Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Wilayah

4.4.1 Analisis Kondisi Fisik

Analisis kondisi fisik meliputi aksesibilitas antar kawasan dalam hal ini kemudahan pencapaian tempat yang hendak dituju, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat baik itu kondisi maupun kemudahan pencapaiannya dan kondisi geografis seperti banjir maupun tanah longsor. Berdasarkan hasil persepsi masyarakat, kemudahan pencapaian yang hendak dituju yaitu sebesar 9% termasuk dalam kategori sangat mudah, 23% termasuk dalam kategori mudah, 29% termasuk dalam kategori cukup mudah, 18% termasuk dalam kategori sedang (antara cukup mudah dan agak sulit), 17% termasuk dalam kategori agak sulit, 3% termasuk dalam kategori sulit dan 1% termasuk dalam kategori sangat sulit. Kategori sangat mudah terdapat pada SWP Ia, IIa, IIb, IVa dan IVb, sedangkan kategori sangat sulit terdapat pada SWP IIb. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian relatif mudah, walaupun untuk beberapa wilayah masih relatif agak sulit.



GAMBAR IV.13
KATEGORI AKSESIBILITAS ANTAR KAWASAN

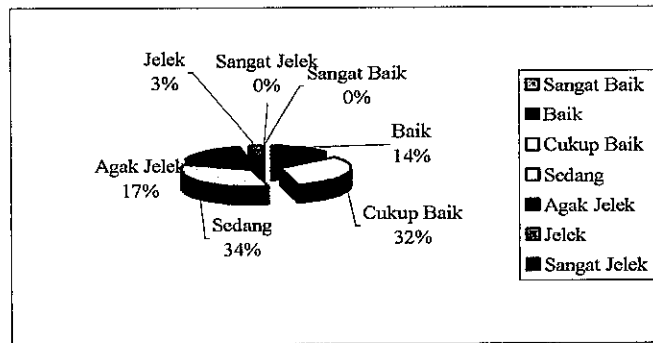
Sumber: Analisis Persepsi Masyarakat, 2005

Kondisi sangat sulit berada di Kecamatan Kawunganten, kondisi sulit berada di Kecamatan Dayeuhluhur, Adipala dan Kroya. Sedangkan kategori agak sulit berada di hampir seluruh kecamatan, Kecamatan Karangpucung, Cipari, Sidareja, Patimuan, Gandrungmangu, Cilacap Selatan, Cilacap Utara, Sampang, Adipala dan Kecamatan Nusawungu. Tingkat kesulitan pencapaian selain dikarenakan kondisi geografisnya juga disebabkan oleh kemudahan aksesibilitas. Dimana terdapat daerah yang hanya bisa diakses lewat laut, dan apabila melalui darat lewat jalan memutar yang relatif jauh dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Sehingga, aksesibilitas di kawasan ini masih cenderung tidak mendukung kelancaran aktivitas masyarakat.

Perbedaan kondisi ini semakin lebar ketika orientasi pembangunan lebih mengarah di pusat kota. Pembangunan tidak saja menghasilkan manfaat, melainkan juga resiko. Oleh karena itu diperlukan membangun mutu hidup sekaligus mutu lingkungan. Faktor lingkungan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan ialah terpeliharanya proses ekologi yang esensial, tersedianya sumber daya yang cukup, dan lingkungan sosial dan ekonomi yang sesuai (Soemarwotto, 2001).

Sedangkan kondisi dan penyediaan sarana dan prasarana transportasi umum Berdasarkan hasil persepsi masyarakat 1% termasuk dalam kategori sangat jelek, 6% termasuk dalam kategori jelek, 29% termasuk dalam kategori agak jelek, 21% termasuk dalam kategori sedang, 21% cukup baik, 29% baik dan 2% termasuk dalam kategori sangat baik. Kondisi sangat jelek berada di Kecamatan Kedungreja, kondisi jelek terdapat di Kecamatan Majenang, Bantarsari, Kawunganten, Adipala dan Kroya. Kondisi agak jelek di hampir semua kecamatan, kecuali Kecamatan Cilacap Tengah, Cilacap Selatan, Sampang dan Nusawungu. Pembangunan jalan sebagai pendukung akses antara kota dan desa atau kawasan lainnya berarti membangun dua sarana yang bertentangan sekaligus, yaitu sarana pembangunan dan sarana eksploitasi desa oleh kota. Bila jalan sebagai sarana eksploitasi tidak disadari walaupun desa dapat tumbuh, laju pertumbuhan desa lebih pelan dari kota dan kesenjangan antara keduanya makin besar. Apabila eksploitasi terlalu intensif akan mengakibatkan kemunduran perkembangan desa yang lambat laun juga berakibat bagi kota, karena kota tak dapat hidup tanpa desa (Soemarwotto, 2001).

Kondisi dari sarana pelayanan masyarakat 3% termasuk dalam kategori jelek, 17% termasuk dalam kategori agak jelek, 34% termasuk dalam kategori sedang, 32% termasuk dalam kategori cukup baik dan 14% termasuk dalam kategori baik, dengan tingkat pencapaian 3% termasuk dalam kategori sulit, 6% agak sulit, 25% sedang, 49% termasuk dalam kategori cukup mudah dan 17% termasuk dalam kategori mudah.





GAMBAR IV.14

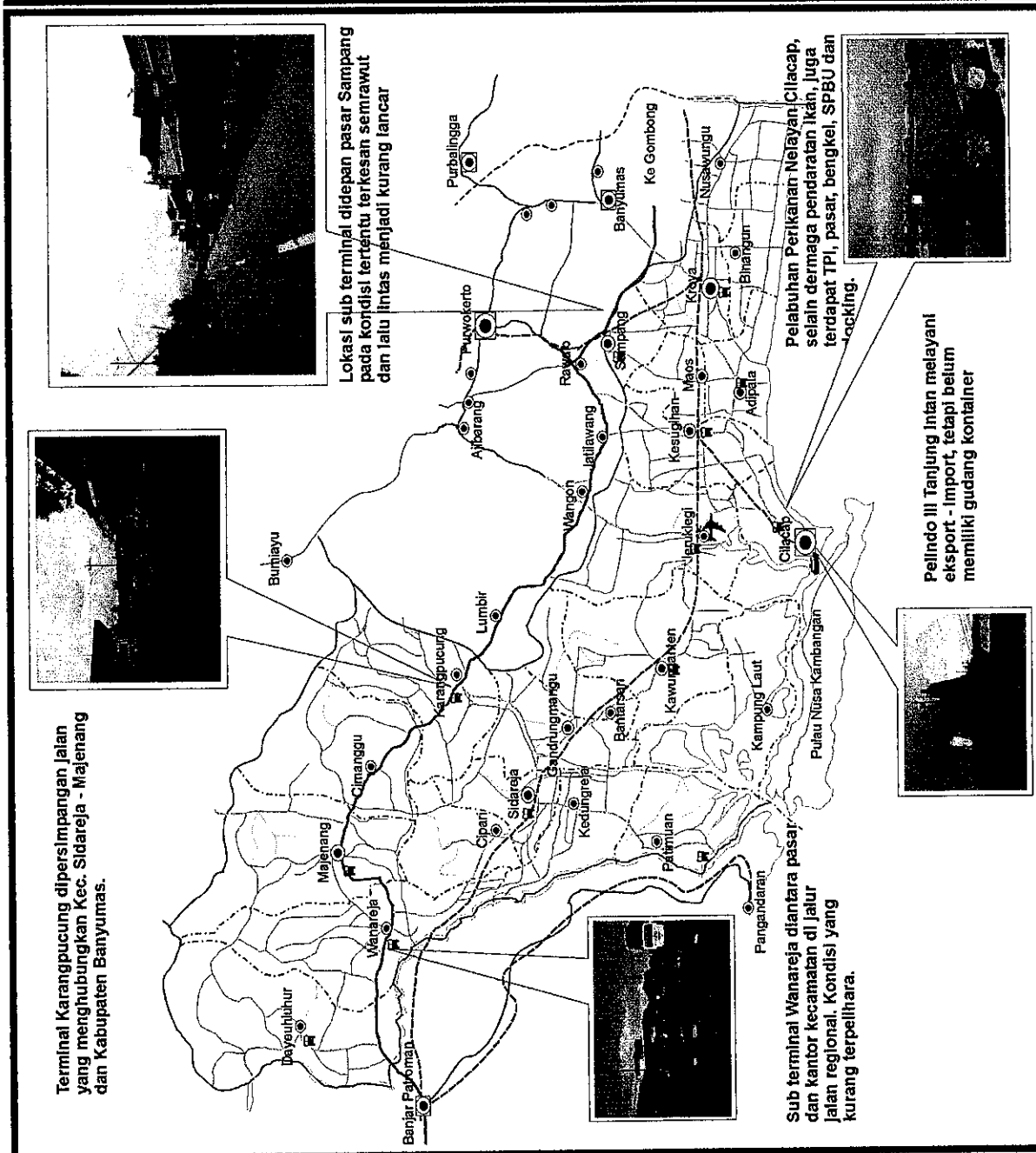
KATEGORI KETERSEDIAAN SARANA PELAYANAN MASYARAKAT

Sumber: Analisis Persepsi Masyarakat, 2005

Hasil persepsi masyarakat jaringan air bersih (PDAM) 47% termasuk dalam kategori sangat tidak lancar, 4% termasuk dalam kategori agak lancar, 9% termasuk dalam kategori sedang, 18% agak lancar, 20% lancar dan 2% termasuk dalam kategori sangat lancar. Untuk jaringan listrik dan telepon 12% termasuk dalam kategori sangat jelek, 1% termasuk dalam kategori jelek, 13% termasuk dalam kategori agak jelek, 21% sedang, 30% termasuk dalam kategori cukup baik, 22% baik dan 1% termasuk dalam kategori sangat baik. Sedangkan untuk kondisi drainase 11% termasuk dalam kategori sangat jelek, 8% termasuk dalam kategori jelek, 19% termasuk dalam kategori agak jelek, 23% sedang, 28% termasuk dalam kategori cukup baik, sedangkan kondisi baik 10% dan sangat baik 1%. Berdasarkan penilaian tersebut dapat terlihat bahwa ketersediaan dan kelengkapan sarana pelayanan masyarakat turut menciptakan daya tarik masyarakat terhadap suatu kawasan.

Kondisi geografis (bebas banjir dan tanah longsor) juga mempengaruhi masyarakat dalam menentukan tempat tinggal dan usahanya, dibanding masyarakat yang tinggal di daerah berbukit. Hasil persepsi masyarakat 2% termasuk dalam kategori sangat tidak berpengaruh, 13% tidak berpengaruh, 14% kurang berpengaruh, 11% sedang, 28% cukup berpengaruh, 21% berpengaruh dan 11% sangat berpengaruh. Hasil ini menunjukkan bahwa

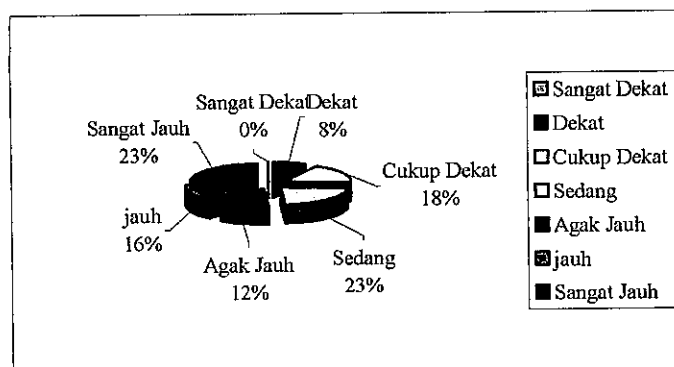
 <p>MAKASUTER TERHUK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	<p>TUGAS MATA KULIAH TESIS</p>																		
<p>PERKEMBANGAN PUSAT WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CILACAP</p>																			
<p>GAMBAR</p>																			
<p>FAKTOR FISIK SUB WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CILACAP</p>																			
<p>Legenda :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; height: 10px;"></td> <td>Batas Kabupaten</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px dashed black; height: 10px;"></td> <td>Batas Kecamatan</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; height: 10px;"></td> <td>Jalan Nasional</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; height: 10px;"></td> <td>Jalan Propinsi</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; height: 10px;"></td> <td>Jalan Kabupaten</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; height: 10px;"></td> <td>Jalan Kereta api</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; height: 10px;"></td> <td>Sungai</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; height: 10px;"></td> <td>Kota Kabupaten/KPPKN</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; height: 10px;"></td> <td>Kantor Kecamatan</td> </tr> </table>			Batas Kabupaten		Batas Kecamatan		Jalan Nasional		Jalan Propinsi		Jalan Kabupaten		Jalan Kereta api		Sungai		Kota Kabupaten/KPPKN		Kantor Kecamatan
	Batas Kabupaten																		
	Batas Kecamatan																		
	Jalan Nasional																		
	Jalan Propinsi																		
	Jalan Kabupaten																		
	Jalan Kereta api																		
	Sungai																		
	Kota Kabupaten/KPPKN																		
	Kantor Kecamatan																		
 <p>UTARA</p>	<p>SKALA 1 : 1.250.000 0 12,5 25km</p>																		
<p>NO. GAMBAR IV.14</p>																			
<p>SUMBER ANALISIS 2005</p>																			



daerah yang bebas banjir maupun tanah lonsor menjadi pilihan dalam menentukan tempat tinggal maupun usahanya.

4.4.2 Analisis Kondisi Ekonomi

Analisis yang dilakukan meliputi kedekatan dengan pusat kota kecamatan, penyediaan lapangan kerja, kondisi dan kelengkapan fasilitas ekonomi dan banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan. Kedekatan dengan pusat kota merupakan faktor ekonomi di mana masyarakat mendapatkan kemudahan dalam memperoleh barang kebutuhan hidup yang ada di pusat kota. Sehingga memiliki rumah yang dekat dengan pusat kota seringkali menguntungkan dan membuat lingkungan permukimannya turut berkembang. Berdasarkan hasil dari persepsi masyarakat 23% termasuk dalam kategori sangat jauh, 16% jauh, 12,5% termasuk dalam kategori agak jauh, 23% sedang, 18% cukup dekat dan 8% termasuk dalam kategori dekat.

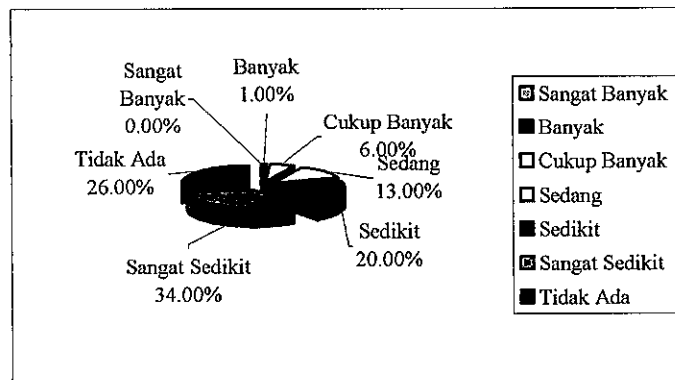


GAMBAR IV.16
KATEGORI KEDEKATAN DENGAN PUSAT KOTA

Sumber: Hasil analisis persepsi masyarakat, 2005

Kecenderungan jauh dari pusat kota terlihat pada SWP IIB, IVA, Kecamatan Gandrungmangu, Kesugihan, Binangun dan Nusawungu. Kedekatan posisi ini berarti: kemudahan mendapat barang kebutuhan hidup di pusat kota, memberi pengaruh harga tanah

yang mahal, aktivitas perekonomian menjadi ramai di kawasan padat penduduk ini, dan mampu memberdayakan para wiraswastawan baik formal maupun non formal.





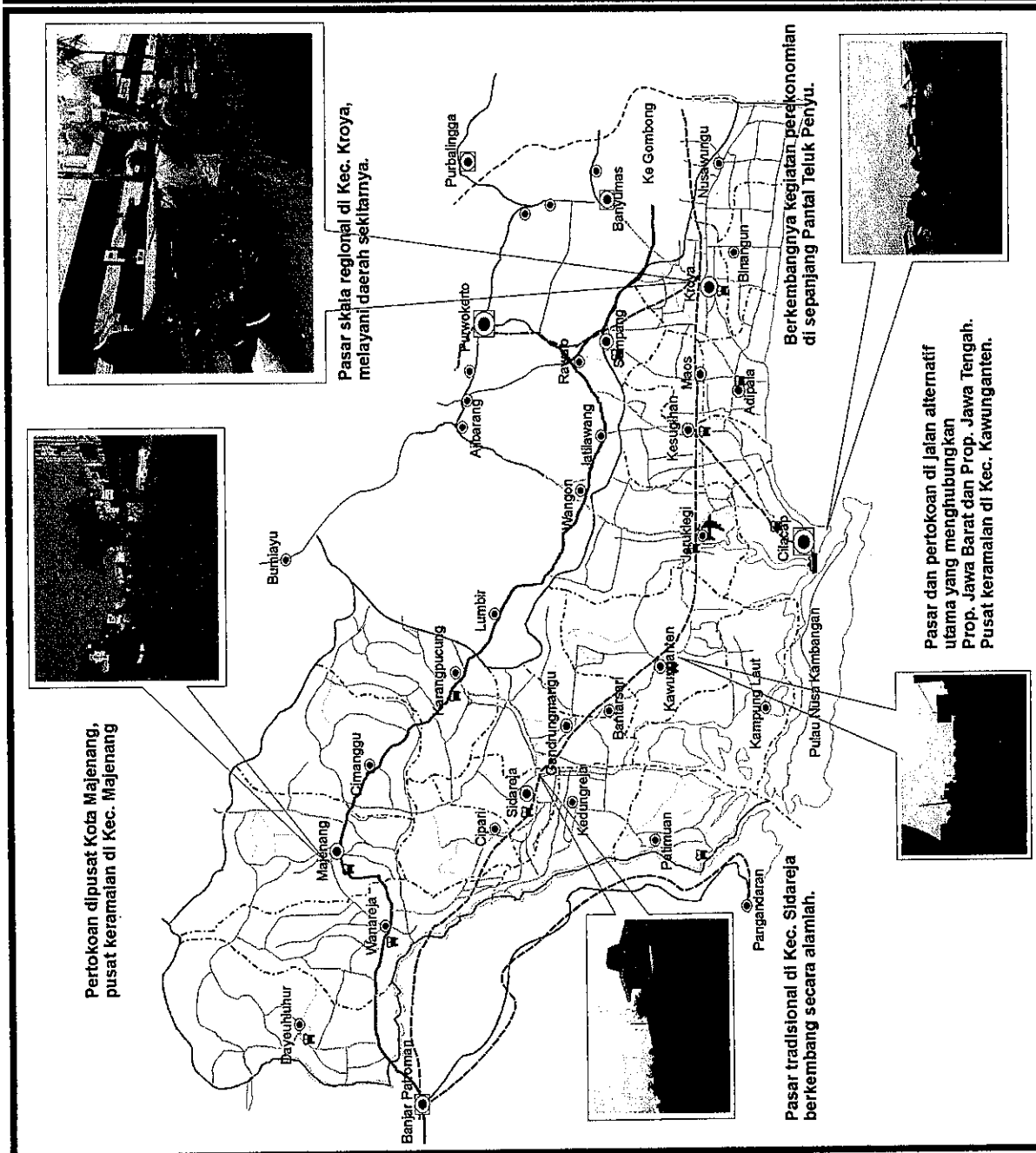
GAMBAR IV.17
KATEGORI PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA

Sumber: Hasil analisis persepsi masyarakat, 2005

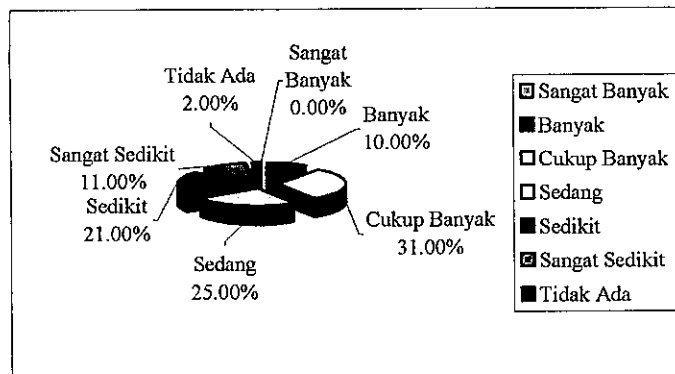
Sangat sedikit dan tidak adanya penyediaan lapangan kerja hampir terdapat di semua kecamatan di Kabupaten Cilacap, kecuali di Kecamatan Sampang dan Maos. Hal ini ditunjukkan pada persepsi masyarakat tentang penyediaan lapangan/pekerjaan 26% termasuk dalam kategori tidak ada, 34% sangat sedikit, 20% sedikit, 13% sedang, 6% cukup banyak dan 1% termasuk dalam kategori banyak. Untuk kategori cukup banyak dan banyak terdapat di Kecamatan Wanareja, Majenang, Cimanggu, Cipari, Cilacap Selatan, Cilacap Tengah dan Kecamatan Kesugihan. Penyediaan lapangan kerja di Kabupaten Cilacap lebih ke industri pengolahan (minyak, semen, dll) yang membutuhkan spesialisasi/keahlian, sehingga kurang menyerap tenaga kerja lokal.

Kurangnya penyediaan lapangan kerja menyebabkan masyarakat cenderung lebih memilih wirausaha seperti berdagang. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi dan kelengkapan fasilitas ekonomi (pasar, toko, kios, perbankan dll) relatif cukup baik, yaitu 4% termasuk dalam kategori sangat jelek, 10% jelek, 16% kategori agak jelek, 26% termasuk dalam kategori sedang, 27% cukup baik, 14% baik, dan 3% termasuk dalam kategori sangat baik.

 <p>MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	<p>TUGAS MATA KULIAH TESIS</p>																		
<p>PERKEMBANGAN PUSAT WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CILACAP</p>																			
<p>GAMBAR</p>																			
<p>FAKTOR EKONOMI SUB WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CILACAP</p>																			
<p>Legenda :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; height: 10px;"></td> <td>Batas Kabupaten</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px dashed black; height: 10px;"></td> <td>Batas Kecamatan</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; height: 10px;"></td> <td>Jalan Nasional</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; height: 10px;"></td> <td>Jalan Propinsi</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; height: 10px;"></td> <td>Jalan Kabupaten</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; height: 10px;"></td> <td>Jalan Kereta api</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; height: 10px;"></td> <td>Sungai</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; height: 10px;"></td> <td>Kota Kabupaten/KPPKN</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; height: 10px;"></td> <td>Kantor Kecamatan</td> </tr> </table>			Batas Kabupaten		Batas Kecamatan		Jalan Nasional		Jalan Propinsi		Jalan Kabupaten		Jalan Kereta api		Sungai		Kota Kabupaten/KPPKN		Kantor Kecamatan
	Batas Kabupaten																		
	Batas Kecamatan																		
	Jalan Nasional																		
	Jalan Propinsi																		
	Jalan Kabupaten																		
	Jalan Kereta api																		
	Sungai																		
	Kota Kabupaten/KPPKN																		
	Kantor Kecamatan																		
 <p>UTARA</p>	<p>SKALA</p> <p>1 : 1.250.000</p> <p>0 12,5 25km</p>																		
<p>No. GAMBAR</p> <p>IV.18</p>																			
<p>SUMBER</p> <p>ANALISIS 2005</p>																			



Dan, Sebagaimana hasil dari persepsi masyarakat tentang banyaknya kegiatan ekonomi, yaitu 2% termasuk dalam kategori sangat sedikit, 11% sedikit, 21% kurang banyak, 25% sedang, 31% cukup banyak dan 10% banyak.

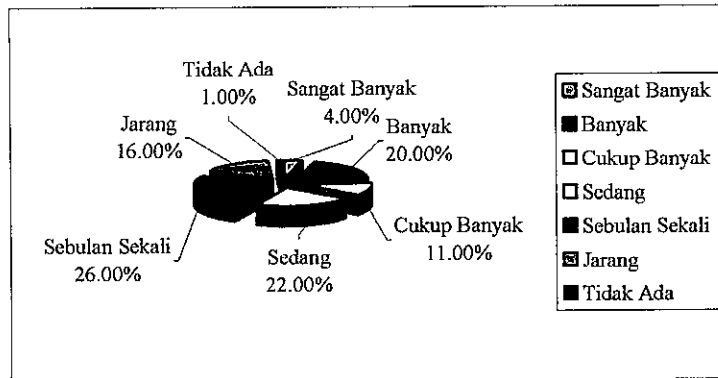


GAMBAR IV.19
KATEGORI KEBERADAAN PUSAT PERDAGANGAN

Sumber: Hasil analisis persepsi masyarakat, 2005

4.4.3 Analisis Kondisi Sosial

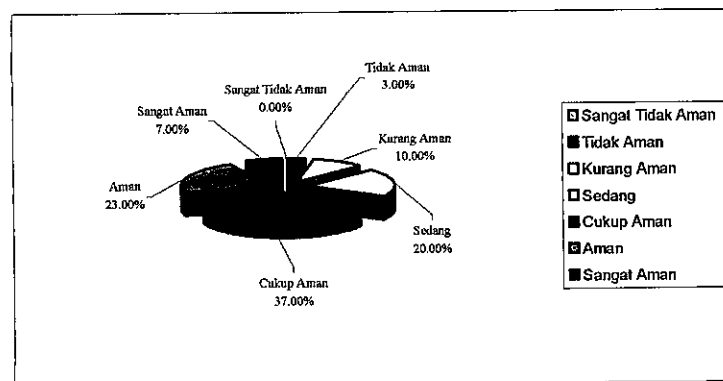
Beragamnya aktivitas sosial yang bisa terselenggara diharapkan dapat meningkatkan sumberdaya manusia dan perannya dalam pelaksanaan program pembangunan. Menurut hasil persepsi masyarakat untuk dukungan pemerintah, kaitannya dengan fasilitas yang ada guna menunjang kegiatan masyarakat sebanyak 1% sangat tidak mendukung, 3% tidak mendukung, 12% termasuk dalam kategori kurang mendukung, 31% sedang, 34% cukup mendukung, 14% mendukung dan 5% termasuk dalam kategori sangat mendukung.



GAMBAR IV.20
KATEGORI BANYAKNYA KEGIATAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN

Sumber: Hasil analisis persepsi masyarakat, 2005

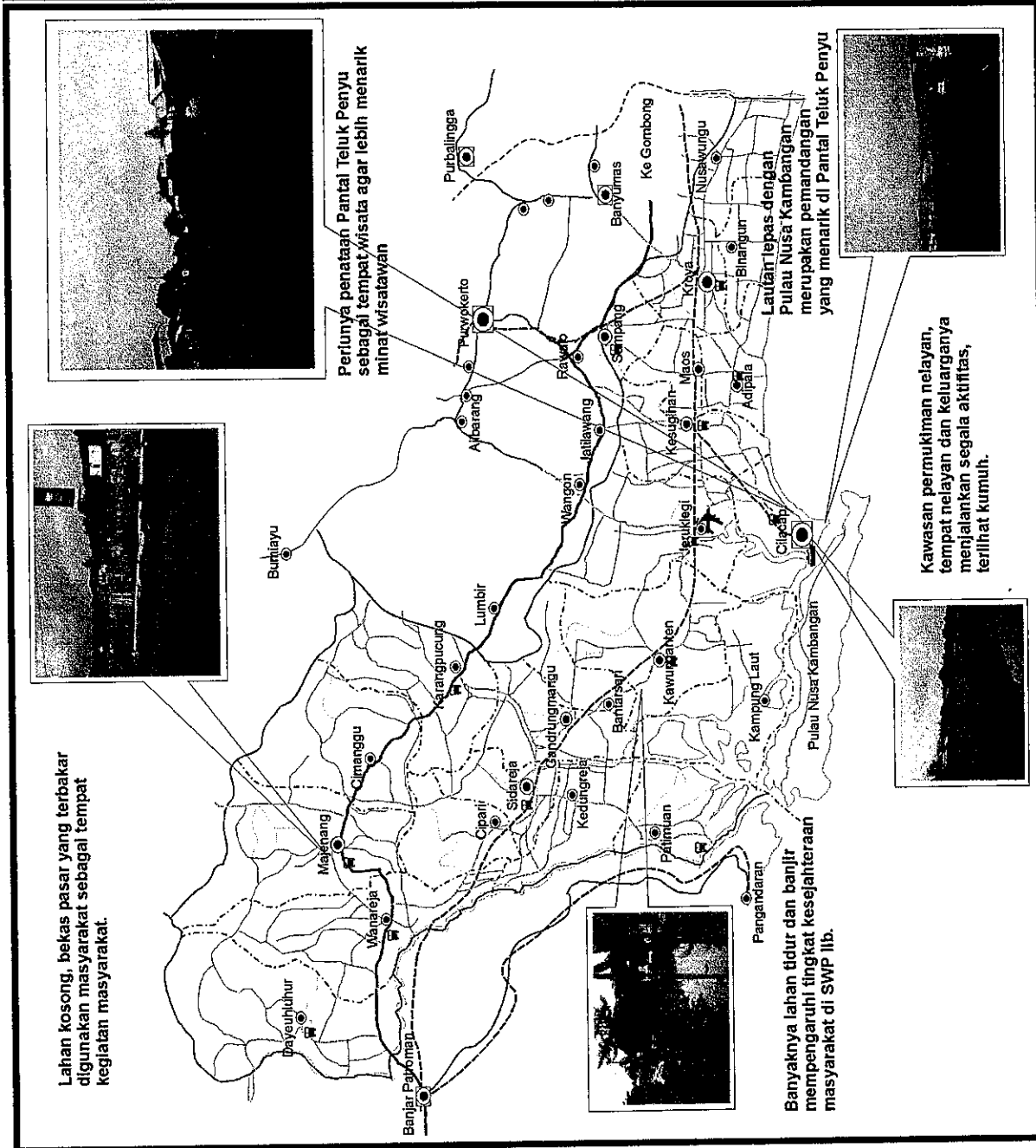
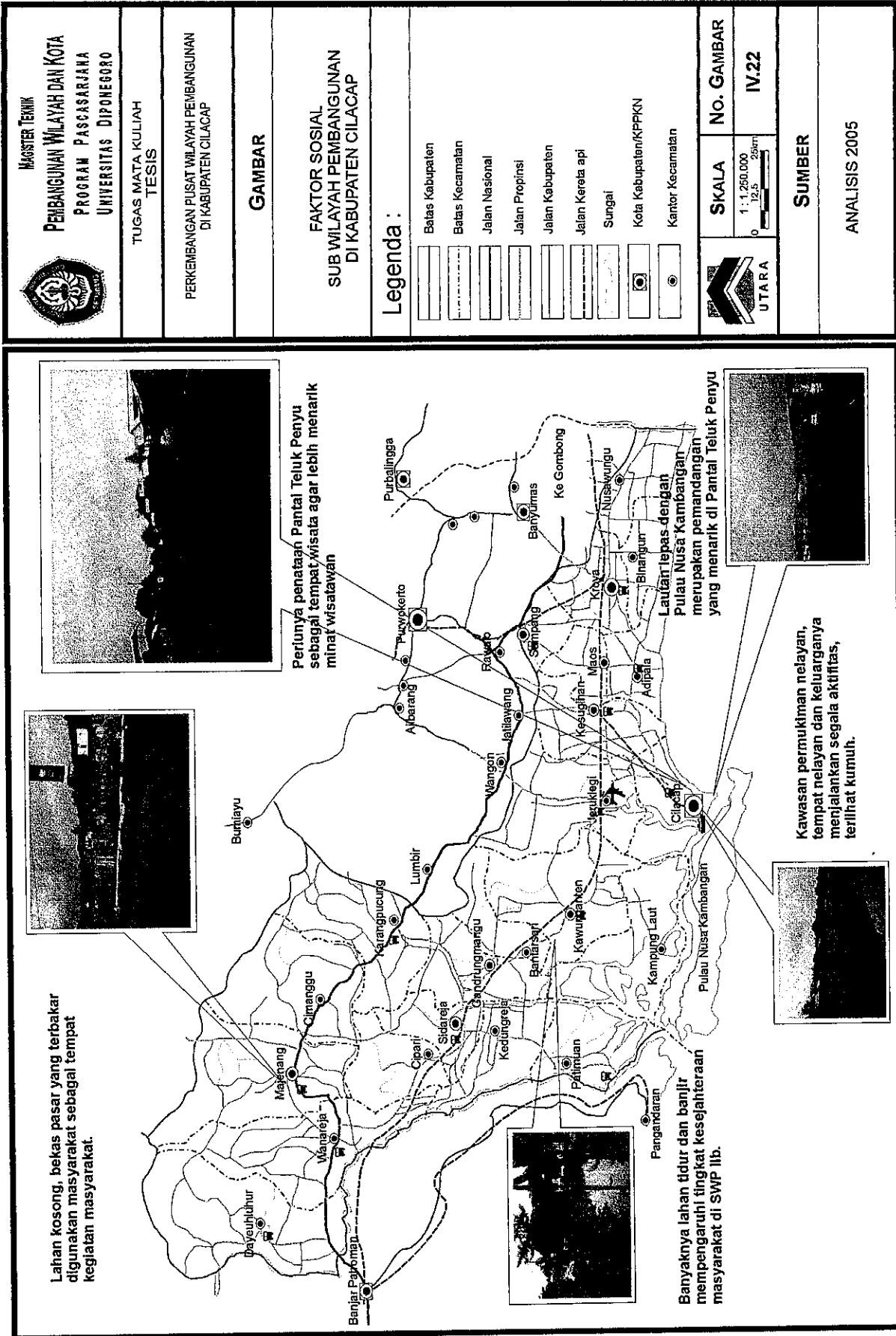
Image rawannya keamanan di kawasan ini kurang terlihat terlihat pada rata-rata hasil persepsi responden sebanyak 3% tergolong dalam kategori tidak aman, 10% kurang aman, 20% sedang, 37% cukup aman, 23% aman dan 7% termasuk dalam kategori sangat aman.



GAMBAR IV.21
KATEGORI TINGKAT KEAMANAN

Sumber: Hasil analisis persepsi masyarakat, 2005

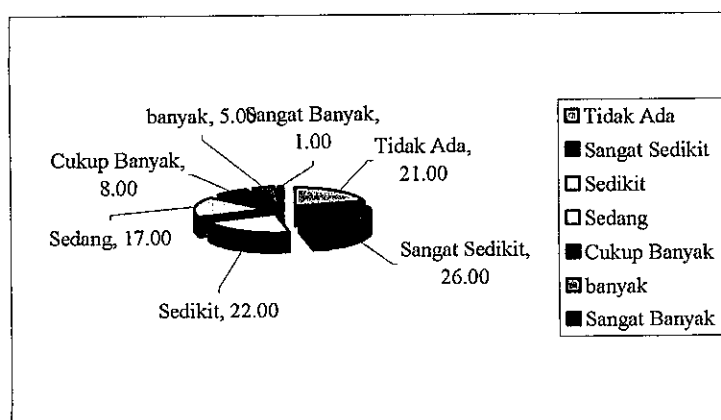
Kondisi psikologis ini merupakan faktor mendasar yang sering dipakai orang untuk memilih lokasi rumah, yaitu berdekatan dengan komunitas yang sudah dikenalnya. Rasa percaya dan aman akan membentuk lingkungan yang harmonis. Pulau Nusakambangan



sebagai tempat pembuangan membentuk informasi-informasi yang buruk dan beredar di masyarakat.

4.4.4 Analisis Kondisi Eksternal

Berdasarkan penilaian keberadaan investasi swasta, hasil persepsi responden dapat terlihat dalam gambar berikut.




GAMBAR IV.23
KATEGORI KEBERADAAN INVESTASI SWASTA

Sumber: Hasil analisis persepsi masyarakat pada lampiran B1, 2003

Kategori banyak terdapat di Kecamatan Cilacap Tengah, Cilacap Selatan, Kesugihan dan Majenang. Sedangkan kategori sangat sedikit dan tidak ada terdapat hampir disemua kecamatan, kecuali Kecamatan Sampang dan Maos. Hal ini juga dapat dilihat dilapangan, yaitu dengan adanya kawasan industri kurang menarik minat swasta dan juga masyarakat lainnya. Sehingga, masih banyak bangunan yang masih belum terpakai bahkan rusak karena kurangnya perawatan.

Berdasarkan penilaian responden tentang keterkaitan dengan Kota Cilacap, sebesar 1% termasuk dalam kategori sangat tidak kuat, 20% tidak kuat, 20% kurang kuat, 33% sedang, 17% cukup kuat, 5% kuat dan 4% termasuk dalam kategori sangat kuat. Sedangkan penilaian responden tentang wilayah lain (diluar Kabupaten Cilacap, sebesar 1% termasuk



MAGISTER TEKNIK
PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO










TUGAS MATA KULIAH
TESIS

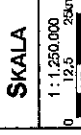
PERKEMBANGAN PUSAT WILAYAH PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN CILACAP

GAMBAR

FAKTOR EKSTERNAL
SUB WILAYAH PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN CILACAP

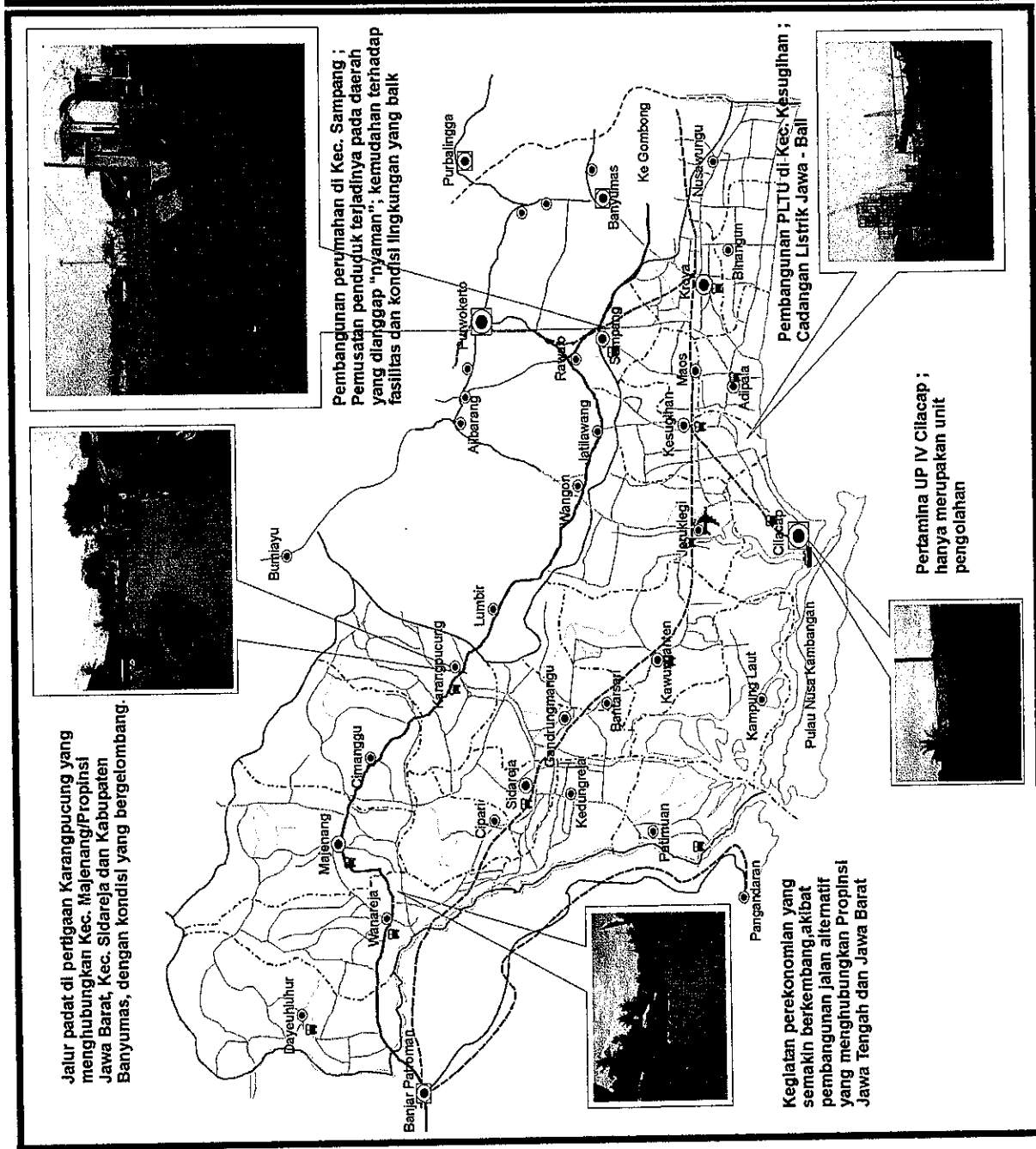
Legenda :

-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Jalan Nasional
-  Jalan Propinsi
-  Jalan Kabupaten
-  Jalan Kereta api
-  Sungai
-  Kota Kabupaten/KPPKN
-  Kantor Kecamatan

SKALA	No. GAMBAR
 1 : 1.250.000	IV.24

SUMBER

ANALISIS 2005



dalam kategori sangat tidak kuat, 10% tidak kuat, 31% kurang kuat, 24% sedang, 25% cukup kuat dan 9% termasuk dalam kategori kuat. hal ini terutama untuk daerah yang memang lokasinya jauh dari Kota Cilacap, seperti SWP IVa, SWP IVb, SWP IIa, dan SWP IIb .

4.5 Analisis Peran Pusat Sub Wilayah Pembangunan di Kabupaten Cilacap

Tujuan dari dilakukannya analisis ini adalah untuk mengetahui sejauhmana peran pusat sub wilayah pembangunan dalam perkembangan wilayah, berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan prosentase PDRB Kecamatan terhadap PDRB Kabupaten dilihat dari luasan wilayahnya, serta diperkuat oleh persepsi masyarakat tentang perkembangan wilayah. Maka dapat diketahui bahwa selain terjadi kesenjangan wilayah antara Kota Cilacap dan kecamatan lainnya dan antara Kabupaten Cilacap bagian barat dan Kabupaten Cilacap bagian timur, pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di pusat sub wilayah pembangunan juga tidak berpengaruh terhadap perkembangan wilayahnya. Kecuali di SWP IVa, perkembangan sektor perdagangan yang terjadi telah didukung dengan adanya peningkatan ketersediaan fasilitas perdagangan. Hal ini akan semakin baik apabila didukung oleh prasarana kota yang memadai, terutama jaringan jalan. Karena yang telah dilakukan saat ini baru peningkatan secara kualitas. Padahal, dalam hal ini perlu adanya peningkatan secara kualitas dan kuantitas.

Hal ini diperkuat oleh adanya persepsi masyarakat, yaitu lebih dari 40% menyebutkan tingkat pencapaian dan ketersediaan prasarana transportasi umum masih kurang baik/mudah. Dan, sebagian besar masyarakat tersebut tinggal di Kabupaten Cilacap bagian barat (SWP IIa, IIb, IVa, dan IVb). Perlu diketahui juga, bahwa sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan paling baik di Kabupaten Cilacap, yaitu sebesar 73,15%, sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restaurant, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menempati peringkat kedua

dan sektor pertanian menempati peringkat ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pembangunan masih banyak dipusatkan dipusat kotanya, menyebabkan tidak seimbangnya perkembangan pusat kota dengan perkembangan wilayah pinggiran kota (pusat kota menjadi sangat dominan terhadap wilayah pinggirannya). Dan kegiatan yang ada tidak berpengaruh besar terhadap daerah *hinterland*nya. Untuk lebih jelasnya tingkat pertumbuhan pada masing masing sektor dari tahun 1993 – 2002 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL IV.8
TINGKAT PERTUMBUHAN TIAP SEKTOR TAHUN 1993 – 2002

No.	Sektor	SWP						
		Ia	Ib	Iia	Iib	III	IVa	IVb
1	Pertanian	20,56	22,10	18,81	65,89	20,81	21,43	19,13
2	Pertambangan dan Penggalian	64,21	62,49	64,21	64,24	64,21	64,21	64,21
3	Industri Pengolahan	41,05	68,14	35,37	59,75	50,78	73,15	40,73
4	Listrik, Gas dan Air bersih	73,74	74,21	72,47	84,68	70,76	77,07	72,13
5	Bangunan	28,98	55,05	27,38	64,90	44,81	27,76	49,25
6	Perdagangan, Hotel dan Restaurant	21,35	36,64	17,82	66,04	26,26	47,77	21,40
7	Pengangkutan dan Komunikasi	52,47	55,93	49,97	68,93	36,89	37,34	53,88
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	22,83	14,77	23,74	60,70	20,47	24,61	11,16
9	Jasa Jasa	9,20	4,77	24,53	60,76	26,51	17,36	29,45

Sumber : PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 – 2002 diolah

Dari tabel tersebut dapat di lihat bahwa sektor pertanian termasuk dalam 3 (tiga) sektor yang mengalami pertumbuhan rata rata paling rendah, walaupun merupakan penyumbang terbesar dalam PDRB kabupaten dan sebagian besar penduduk bekerja pada sektor ini. Selain itu, menurut pendataan desa mengenai Identifikasi Penduduk Miskin yang telah dilakukan pada tahun 1999 masih lebih dari 40%. Sehingga, perlu adanya kegiatan kegiatan yang ada seharusnya mengacu pada sektor sektor yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dan pusat sub wilayah pembangunan merupakan salah satu konsep dalam perencanaan wilayah, yang digunakan untuk menyebarkan kemakmuran dari pusat wilayah ke pinggirannya sehingga wilayah di sekitarnya terpacu untuk berkembang dan mengurangi beban pelayanan yang diemban pusat kota. Dimana, Pusat pusat regional ini akan berfungsi sebagai saluran sehat yang menghubungkan ibu kota dengan pedesaan dipedalaman. Tetapi yang terjadi di Kabupaten Cilacap pusat sub wilayah pembangunan kurang berpengaruh terhadap perkembangan wilayahnya. Antara lain terlihat dari adanya penurunan jumlah penduduk pada beberapa kota pusat sub wilayah pembangunan seperti Kota Sampang, Kawunganten dan Karangpucung, tidak adanya peningkatan ketersediaan fasilitas dan kurangnya peningkatan jaringan jalan baik secara kualitas maupun kuantitas kecuali di Kota Cilacap.

Selain itu juga terdapat ketidakkonsistenan pelaksanaan pembangunan dengan prioritas pengembangan sesuai dengan prioritas pengembangan dalam RTRW. Padahal sektor basis merupakan yang ada di suatu daerah akan memberikan kontribusi berupa peningkatan pendapatan daerah. Dengan demikian sektor basis merupakan penggerak utama, dimana setiap perubahan yang terjadi akan memberikan efek menyebar terhadap sistem perekonomian wilayah.

Guna mencapai pertumbuhan yang lebih baik perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan pembangunan, kaitannya dengan peningkatan peran pusat sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap. Sebagaimana telah disebutkan, bahwa peran pusat pusat tersebut menurut Friedmann, pusat-pusat pertumbuhan harus dapat berperan dalam kegiatan (Friedmann, 1966):

1. Mengkoordinasi kemajuan daerah dalam suatu sistem dengan memperhatikan daerah-daerah pendukung pasaran dan pelayanan administratif.

2. Untuk memudahkan koordinasi tersebut, ada jenjang pusat yang menentukan posisi pusat pertumbuhan.
3. Pusat pertumbuhan harus membawa pengaruh pembaharuan kepada daerah-daerah pengaruhnya.

Pusat pertumbuhan berperan sebagai pendorong pengembangan ekonomi wilayah pinggiran kota, menyebabkan perpindahan sebagian penduduk dari luar wilayah pusat pertumbuhan ke pusat pertumbuhan karena daya tarik dari pusat pertumbuhan dan daya tolak wilayah di sekitar pusat pertumbuhan. Peranan pusat-pusat pertumbuhan yang lain adalah :
(Misra dalam Kuklinski, 1972 : 162)

1. Sebagai pusat industri dari daerah-daerah yang dilayani, sehingga memiliki fasilitas-fasilitas untuk kegiatan industri, pengolahan hasil pertanian (agro industri) dan fasilitas umum.
2. Sebagai alat penahan guncangan (*shock absorbers*) dalam proses migrasi yaitu menampung penduduk dari luar pusat pertumbuhan yang bermigrasi ke wilayah pusat pertumbuhan tersebut dan menyediakan lapangan pekerjaan.
3. Sebagai penarik tandingan (*counter magnet*) terhadap pusat-pusat perkotaan yang lebih besar.
4. Membantu distribusi barang (barang jadi dan setengah jadi) dan hasil-hasil pertanian dari pusat-pusat pelayanan yang lebih kecil.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa kecamatan yang memiliki prosentase PDRB relatif kecil terhadap PDRB Kabupaten, masih memiliki sektor sektor yang dapat dikembangkan untuk meningkatkannya. Karena perencanaan wilayah dan kota yang dipengaruhi globalisasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, memperkecil perbedaan pertumbuhan kemakmuran antar wilayah atau antar

daerah (perbedaan kemakmuran perkotaan dan pedesaan), dengan melakukan perencanaan fisik yang diterapkan secara terpadu dengan perencanaan sosial dan ekonomi serta berkaitan dengan lingkungan. Dan perpaduan perencanaan ini harus dilakukan dalam skala regional, yang mencakup kota dan daerah pedalaman sekitarnya (*urban conurbation*).

Pengembangan wilayah di masa yang akan datang merupakan suatu kerangka untuk tindakan tindakan bagi terbentuknya suatu pembangunan lokal (*local development*), yang diartikan sebagai penumbuhan suatu lokalitas secara sosial ekonomi dengan lebih mandiri, berdasarkan potensi potensi yang dimilikinya, baik sumber daya alam, geografis, kelembagaan maupun yang lainnya. Orientasi pengembangan wilayah seharusnya memiliki perspektif jangka panjang, karena telah terintegrasinya bagian bagian dunia menjadi suatu ekonomi global, maka syarat ketahanan (*survival*) bagi suatu wilayah adalah harus mempunyai akses dan cukup kompetitif. Artinya wilayah harus mampu menempatkan diri dalam jaringan (*networking*) ekonomi nasional dan global. Dimana keterkaitan kota kota dapat mendatangkan manfaat tertentu bagi kota kota itu dan juga lingkungan sekitar.

Berdasarkan pertumbuhan dan perkembangan pada masing masing pusat sub wilayah pembangunan dan potensi ekonomi dari masing masing sub wilayah pembangunannya serta didukung oleh persepsi masyarakat tentang perkembangan wilayah yang terjadi, dilihat dari faktor fisik, ekonomi, sosial dan eksternal, maka peran yang sedang dan layak untuk dikembangkan pada masing masing pusat sub wilayah pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

LPT-PUSTAK-UNDIP

TABEL IV.9
IDENTIFIKASI PERAN PUSAT SWP DAN KOTA KOTA KECAMATAN LAINNYA
DI KABUPATEN CILACAP

No.	Kota	SWP	Peran	Keterangan
1	Cilacap	Ia	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ Pusat pengembangan industri yang memiliki <i>linkage (forward dan backward linkage)</i>. + Pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, sosial dan jasa. ⊖ Pusat pengembangan perhubungan. + Pusat pengembangan pariwisata. 	<ul style="list-style-type: none"> ⊖ Perlu adanya pengembangan sektor pertanian, dan penataan tempat wisata yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana, terutama aksesibilitas darat, laut dan udara. ⊕ Pemanfaatan Kawasan Industri Cilacap bukan hanya sebagai pusat industri tetapi juga <i>show room</i> dari potensi perekonomian yang ada di Kabupaten Cilacap dan sekitarnya.
2	Jeruklegi		<ul style="list-style-type: none"> ⊖ Pengembangan sektor pertanian dan pariwisata. + Pengembangan perhubungan (udara). ⊖ Pengembangan permukiman. ⊖ Pengembangan industri. 	
3	Sampang	Ib	<ul style="list-style-type: none"> ⊖ Pengembangan sektor pertanian ⊖ Pengembangan perhubungan (darat) + Pengembangan industri + Pengembangan permukiman, dan ⊖ Pengembangan perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> ⊖ Dilewati irigasi teknis, pengembangan pertanian lahan basah. ⊖ Peningkatan sarana dan prasarana, terutama jaringan jalan yang menghubungkan pusat dengan daerah <i>hinterlandnya</i>
4	Kesugihan		<ul style="list-style-type: none"> + Pengembangan industri ⊖ Pengembangan permukiman ⊖ Pengembangan perdagangan ⊖ Pengembangan perhubungan 	
5	Maos		<ul style="list-style-type: none"> ⊖ Pengembangan permukiman ⊖ Pengembangan sektor jasa 	

No.	Kota	SWP	Peran	Keterangan
6	Sidareja	Ila	+ Pengembangan sektor pertanian + Pengembangan permukiman + Pengembangan perekonomian, perdagangan, sosial dan jasa + Pengembangan perhubungan (darat)	⇨ Perlu pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana ekonomi dan perkotaan terutama yang menghubungkan pusat dengan daerah <i>hinterlandnya</i>
7	Cipari		+ Pengembangan pertanian	
8	Kedungreja		+ Pengembangan pertanian	
9	Patimuan		+ Pengembangan pertanian + Pengembangan perekonomian dan jasa	
10	Gandrungmangu		+ Pengembangan pertanian + Pengembangan perekonomian, perdagangan, sosial dan jasa	
11	Kawunganten	Iib	+ Pengembangan pertanian + Pengembangan hubungan (darat dan laut) + Pengembangan perekonomian	
12	Bantarsari		+ Pengembangan pertanian + Pengembangan perekonomian, perdagangan, sosial dan jasa + Pengembangan permukiman	
13	Kroya	III	+ Pengembangan perdagangan dan jasa + Pengembangan perhubungan (darat)	⇨ Perlu adanya pengembangan sektor pertanian, dan penataan tempat wisata yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana, terutama aksesibilitas darat dan laut. ⇨ Pembagian yang adil terhadap fungsi dan peran masing masing wilayah/kota ⇨ Revitalisasi peran pemerintah
14	Adipala		+ Pengembangan pertanian + Pengembangan permukiman + Pengembangan perhubungan dan + Pengembangan perekonomian	
15	Binangun		+ Pengembangan pertanian + Pengembangan permukiman + Pengembangan perekonomian, sosial dan jasa	
16	Nusawungu		+ Pengembangan pertanian + Pengembangan industri + Pengembangan perhubungan (darat dan laut) + Pengembangan perekonomian, sosial dan jasa)	

No	Kota	SWP	Peran	Keterangan
17	Majenang	IVa	+ Pengembangan industri + Pengembangan perdagangan dan jasa + Pengembangan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> ⇨ Perlu adanya pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana, terutama jaringan jalan yang menghubungkan pusat dengan daerah <i>hinterlandnya</i> ⇨ Peningkatan fasilitas perekonomian dan perdagangan ⇨ Manajemen lahan yang optimal ⇨ Revitalisasi peran pemerintah
18	Wanareja		+ Pengembangan pertanian + Pengembangan perdagangan dan jasa + Pengembangan permukiman	
19	Dayeuhluhur		+ Pengembangan pertanian + Pengembangan perdagangan dan jasa	
20	Karangpucung	IVb	+ Pengembangan pertanian + Pengembangan perhubungan (darat)	<ul style="list-style-type: none"> ⇨ Perlu adanya pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana, terutama jaringan jalan yang menghubungkan pusat dengan daerah <i>hinterlandnya</i> ⇨ Peningkatan fasilitas perekonomian dan perdagangan ⇨ Manajemen lahan yang optimal ⇨ Revitalisasi peran pemerintah
21	Cimanggu		+ Pengembangan pertanian + Pengembangan perdagangan + Pengembangan industri + Pengembangan pariwisata + Pengembangan permukiman	

Sumber: analisis 2005

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan studi dapat disimpulkan bahwa selain kondisi geografis dari masing masing sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap yang beragam, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan saat ini banyak dipusatkan di pusat kota (pusat kota menjadi sangat dominan terhadap wilayah pinggirannya), terutama Kota Cilacap, menyebabkan Kota Cilacap berkembang jauh meninggalkan kota kota lainnya di Kabupaten Cilacap. Dan perkembangan yang terjadi di pusat sub wilayah pembangunan tidak berpengaruh terhadap perkembangan wilayahnya.

Padahal pengembangan wilayah di masa yang akan datang merupakan suatu kerangka untuk tindakan tindakan bagi terbentuknya suatu pembangunan lokal (*local development*), yang diartikan sebagai penumbuhan suatu lokalitas secara sosial ekonomi dengan lebih mandiri, berdasarkan potensi potensi yang dimilikinya, baik sumber daya alam, geografis, kelembagaan maupun yang lainnya. Dan faktor yang berpengaruh dalam penetapan strategi pusat pertumbuhan agar berjalan secara optimal selain pemusatan prasarana kota pada pusat pertumbuhan yang meliputi prasarana jalan terutama yang menghubungkan pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya, juga adanya konsentrasi atau aglomerasi aktivitas ekonomi di kota pusat pertumbuhan terutama industri yang memiliki kaitan ke depan dan belakangnya (*forward dan backward linkage*).

Konsep pusat sub wilayah pembangunan dan sub wilayah pembangunan digunakan dengan tujuan mencapai pertumbuhan yang lebih baik. Karena pusat sub wilayah pembangunan diharapkan dapat menghubungkan ibu kota dengan pedesaan dipedalaman. Dan untuk menyebarkan kemakmuran dari pusat wilayah ke pinggirannya sehingga wilayah

di sekitarnya terpacu untuk berkembang dan mengurangi beban pelayanan yang diemban pusat kota. Tetapi kebijakan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Secara tidak langsung hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan pusat sub wilayah pembangunan dan sub wilayah pembangunan yang diterapkan di Kabupaten Cilacap tidak efektif. Karena perkembangan pusat sub wilayah pembangunan tidak berpengaruh terhadap perkembangan wilayahnya, dan pelaksanaan pembangunan kurang mengacu pada prioritas pengembangan sesuai RTRW. Dan hal ini perlu adanya evaluasi secara menyeluruh, baik terhadap RTRW maupun kebijakan pelaksanaan pembangunan berdasarkan pada kondisi yang ada di lapangan. Karena Pengembangan wilayah di masa yang akan datang merupakan suatu kerangka untuk tindakan tindakan bagi terbentuknya suatu pembangunan lokal (*local development*), yang diartikan sebagai penumbuhan suatu lokalitas secara sosial ekonomi dengan lebih mandiri, berdasarkan potensi potensi yang dimilikinya, baik sumber daya alam, geografis, kelembagaan maupun yang lainnya.

Berdasarkan pertumbuhan dan perkembangan pada masing masing pusat sub wilayah pembangunan dan potensi ekonomi dari masing masing sub wilayah pembangunannya serta didukung oleh persepsi masyarakat tentang perkembangan wilayah yang terjadi, dilihat dari faktor fisik, ekonomi, sosial dan eksternal, walaupun memiliki prosentase PDRB yang relatif kecil terhadap PDRB Kabupaten, tetapi masing masing kecamatan memiliki sector sector yang layak untuk dikembangkan untuk meningkatkan perkembangan wilayahnya. Maka berdasarkan hal tersebut, peran yang sedang dan layak untuk dikembangkan pada masing masing pusat sub wilayah pembangunan dapat dilihat dalam Tabel V.1.

TABEL V.1
IDENTIFIKASI PERAN PUSAT SWP DAN KOTA KOTA KECAMATAN
LAINNYA DI KABUPATEN CILACAP

No.	Kota	SWP	Peran	Keterangan
1	Cilacap	Ia	<ul style="list-style-type: none"> + Pusat pengembangan industri yang memiliki <i>linkage (forward dan backward linkage)</i>. + Pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, sosial dan jasa. + Pusat pengembangan perhubungan. ⊕ Pusat pengembangan pariwisata. 	<ul style="list-style-type: none"> ⇨ Perlu adanya pengembangan sektor pertanian, dan penataan tempat wisata yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana, terutama aksesibilitas darat, laut dan udara. ⇨ Pemanfaatan Kawasan Industri Cilacap bukan hanya sebagai pusat industri tetapi juga <i>show room</i> dari potensi perekonomian yang ada di Kabupaten Cilacap dan sekitarnya.
2	Jeruklegi		<ul style="list-style-type: none"> ⊕ Pengembangan sektor pertanian dan pariwisata. ⊕ Pengembangan perhubungan (udara). + Pengembangan permukiman. ⊕ Pengembangan industri. 	
3	Sampang	Ib	<ul style="list-style-type: none"> + Pengembangan sektor pertanian ⊕ Pengembangan perhubungan (darat) + Pengembangan industri + Pengembangan permukiman, dan ⊕ Pengembangan perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> ⇨ Dilewati irigasi teknis, pengembangan pertanian lahan basah. ⊕ Peningkatan sarana dan prasarana, terutama jaringan jalan yang menghubungkan pusat dengan daerah <i>hinterlandnya</i>.
4	Kesugihan		<ul style="list-style-type: none"> + Pengembangan industri + Pengembangan permukiman ⊕ Pengembangan perdagangan ⊕ Pengembangan perhubungan 	
5.	Maos		<ul style="list-style-type: none"> + Pengembangan permukiman ⊕ Pengembangan sektor jasa 	

No.	Kota	SWP	Peran	Keterangan
6	Sidareja	IIa	+ Pengembangan sektor pertanian + Pengembangan permukiman + Pengembangan perekonomian, perdagangan, sosial dan jasa + Pengembangan perhubungan (darat)	⇨ Perlu pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana ekonomi dan perkotaan terutama yang menghubungkan pusat dengan daerah <i>hinterlandnya</i>
7	Cipari		+ Pengembangan pertanian	
8	Kedungreja		+ Pengembangan pertanian	
9	Patimuan		+ Pengembangan pertanian + Pengembangan perekonomian dan jasa	
10	Gandrungmangu		+ Pengembangan pertanian + Pengembangan perekonomian, perdagangan, sosial dan jasa	
11	Kawunganten	IIb	+ Pengembangan pertanian + Pengembangan hubungan (darat dan laut) + Pengembangan perekonomian	⇨ Peningkatan aksesibilitas (darat dan laut) ⇨ Manajemen lahan yang optimal ⇨ Pembentukan dan pengembangan mental wirausahaan ⇨ Revitalisasi peran pemerintah
12	Bantarsari		+ Pengembangan pertanian + Pengembangan perekonomian, perdagangan, sosial dan jasa + Pengembangan permukiman	
13	Kroya	III	+ Pengembangan perdagangan dan jasa + Pengembangan perhubungan (darat)	
14	Adipala		+ Pengembangan pertanian + Pengembangan permukiman + Pengembangan perhubungan dan + Pengembangan perekonomian	⇨ Perlu adanya pengembangan sektor pertanian, dan penataan tempat wisata yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana, terutama aksesibilitas darat dan laut. ⇨ Pembagian yang adil terhadap fungsi dan peran masing masing wilayah/kota ⇨ Revitalisasi peran pemerintah
15	Binangun		+ Pengembangan pertanian + Pengembangan permukiman + Pengembangan perekonomian, sosial dan jasa	
16	Nusawungu		+ Pengembangan pertanian + Pengembangan industri + Pengembangan perhubungan (darat dan laut) + Pengembangan perekonomian, sosial dan jasa)	

No	Kota	SWP	Peran	Keterangan
17	Majenang	IVa	+ Pengembangan industri + Pengembangan perdagangan dan jasa + Pengembangan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> ⊖ Perlu adanya pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana, terutama jaringan jalan yang menghubungkan pusat dengan daerah <i>hinterlandnya</i> ⊖ Peningkatan fasilitas perekonomian dan perdagangan ⊖ Manajemen lahan yang optimal ⊖ Revitalisasi peran pemerintah
18	Wanareja		+ Pengembangan pertanian + Pengembangan perdagangan dan jasa + Pengembangan permukiman	
19	Dayeuhluhur		+ Pengembangan pertanian + Pengembangan perdagangan dan jasa	
20	Karangpucung	IVb	+ Pengembangan pertanian + Pengembangan perhubungan (darat)	<ul style="list-style-type: none"> ⊖ Perlu adanya pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana, terutama jaringan jalan yang menghubungkan pusat dengan daerah <i>hinterlandnya</i> ⊖ Peningkatan fasilitas perekonomian dan perdagangan ⊖ Manajemen lahan yang optimal ⊖ Revitalisasi peran pemerintah
21	Cimanggu		+ Pengembangan pertanian + Pengembangan perdagangan + Pengembangan industri + Pengembangan pariwisata + Pengembangan permukiman	

Sumber: analisis 2005

Berkaitan dengan kebijakan pusat sub wilayah pembangunan dan sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga perlu ditinjau ulang, karena pelaksanaannya tidak efektif. Padahal pusat sub wilayah pembangunan merupakan salah satu konsep dalam perencanaan wilayah, yang digunakan untuk menyebarkan kemakmuran dari pusat wilayah ke pinggirannya sehingga wilayah di sekitarnya terpacu untuk berkembang dan mengurangi beban pelayanan yang diemban pusat kota. Sehingga diperlukan dukungan kebijakan pemerintah yang efektif, agar pelaksanaan

kebijakan pusat SWP dan sub wilayah pembangunan ini menjadi efektif. Intervensi kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung perkembangan kawasan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasarannya, yang ditentukan oleh beberapa faktor yang berkenaan dengan proses perumusan dan implementasinya (Mayer dan Greenwood, 1984).

Secara implementatif, upaya pengembangan pusat sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap seharusnya tidak hanya melihat dari fisik semata tetapi juga memandang eksistensi kehidupan sosial ekonomi yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Karena pengembangan wilayah tidak hanya dengan *local economic development* tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi fisik, sosial dan budaya setempat.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dapat direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap dan masyarakat di dalam meningkatkan peran pusat sub wilayah pembangunan dalam mengembangkan wilayahnya, yaitu:

1. Perlunya pengembangan wilayah yang memperhatikan keterkaitan antara masalah sosial ekonomi dan lingkungan yang berhubungan dengan perubahan wilayah perkotaan dan perdesaan.
2. Perlunya konsep pengembangan wilayah yang jelas, karena dengan memiliki konsep pembangunan yang jelas sebelum pembangunan dilaksanakan dapat meningkatkan keberhasilan dalam pengembangan wilayahnya.. antara lain dengan melakukan:
 - a Rencana pembangunan yang komprehensif dan terpadu.
 - b Jaminan kepastian hukum dan stabilitas bagi investasi dunia usaha
 - c Menggali keanekaragaman komoditas dan spesialisasi produk, dengan orientasi utama ekspor (walaupun sebelumnya diserap oleh pasar dalam negeri.)

- d Pembagian yang adil terhadap peran dan fungsi masing masing wilayah/kota
 - e Penyediaan infrastruktur yang terintegrasi bagi berbagai peruntukan
 - f kemudahan perijinan dan birokrasi pelayanan kepada masyarakat
 - g Manajemen lahan yang optimal
 - h Pemberian kemudahan/keringanan pajak, bea dan beban usaha secara bijaksana
 - i ketaatan terhadap *masterplan* yang telah ditetapkan
 - j Revitalisasi peran pemerintah dalam mengontrol dan memfasilitasi usaha kecil dan menengah
 - k Pembentukan dan pengembangan sikap mental wirausaha
 - l Insentif dan kompensasi bagi masyarakat yang menjadi korban pembangunan
 - m Adanya keterbukaan untuk menjalin kerjasama dan pembelajaran dengan wilayah/daerah dan negara lain
 - n Terbukanya akses informasi
3. Peningkatan sarana dan prasarana permukiman yang memadai, pengaturan kembali aksesibilitas kawasan (darat/laut) agar dapat mendukung aktivitas.
 4. Karena Kabupaten Cilacap, sebagian wilayahnya merupakan wilayah pesisir, rencana tata ruang yang ada dapat dijadikan acuan dalam membuat rencana tata ruang kota maupun pesisir.
 5. Pemerintah hendaknya dalam mengeluarkan perijinan bagi kegiatan ekonomi mengoptimalkan kawasan-kawasan yang memang diarahkan untuk itu, karena sebenarnya masih banyak yang belum dimanfaatkan, serta mengembalikan kawasan yang berfungsi konservasi. Dengan demikian trend ekonomi yang terjadi dapat di jadikan potensi perkembangan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

6. Diperlukan kekonsistenan dalam mengimplementasikan arahan penggunaan ruang pada masa berikutnya untuk memenuhi fungsi dan perannya dalam perekonomian sekaligus dalam pelestarian lingkungan karena hal ini merupakan langkah yang paling murah, dan efektif untuk mengatasi trend perkembangan yang ada.
7. Sosialisasi secara terus-menerus pada masyarakat serta menggalakkan peran serta masyarakat dan kemitraan dengan swasta tanpa harus ada yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK BUKU

- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Manajemen Penelitian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin. 1999. *Penyusunan Skala Psikologis*. Pustaka Pelejar Offset, Yogyakarta
- Branch, Melville C. 1996. *Perencanaan Kota Komprehensif*. Terjemahan Bambang Hari Wibisono. Gajah Mada University Press.
- Budihardjo, Eko. 1997. *Tata Ruang Perkotaan*. Bandung: Alumni.
- Budihardjo, Eko. dan Djoko Sujarto. 1999. *Kota Berkelanjutan*. Bandung: Alumni.
- Budihardjo, Eko. dan Sudanti Hardjohubojo. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Bandung: Alumni.
- Budihardjo, Eko. 1992. *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*. Bandung: Alumni.
- Catanese, Anthony J. Snyder, James C. 1996. *Perencanaan Kota*. Jakarta: Erlangga.
- Chaniago, Andrinof A. 2001. *Gagalnya Pembangunan; Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia*
- Charter, Harold. 1981. *The Study of Urban Geography*. London: Edward Arnold Ltd.
- Daldjoeni, Nathaniel. 1992. *Geografi Baru: Organisasi Ruang dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni.
- Daldjoeni, Nathaniel. 1998. *Geografi Kota dan Desa Untuk Mahasiswa dan Guru SMU*. Bandung: Alumni.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Glasson, John. 1977. *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Hadi, Sudharto P. 2001. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta : Gadjahmada University Press.
- Ilhami. 1990. *Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: ITB.

Kozlowski, Jerzy. 1997. *Pendekatan Ambang Batas Dalam Perencanaan Kota, Wilayah dan Lingkungan*. Terjemahan Bambang Purbowaseso. Bandung: Universitas Indonesia.

Nurmandi, Achmad. 1999. *Manajemen Perkotaan. Aktor, Organisasi dan Pengelolaan Daerah Perkotaan di Indonesia*. Yogyakarta: Lingkaran Bangsa.

Moleong, Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

Mubyarto, et al. 2000. *Pengembangan Wilayah Perdesaan dan Kawasan Tertentu: Sebuah Kajian Eksploratif*. BPPT.

Munir, Badrul, 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Bappeda Propinsi NTB.

Rankin. 1983. *Scalling Methods*, London: Lawrence Erlbaun Associates.

Richardson, Harry W. 1978. *Urban Economic*, Illinois: The Dryden Press, Hinsdale.

Rukmana, Nana. Steinberg, Florian. Van Der Hoff, Robert. 1993. *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.

Salim, Emil. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.

Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES.

Soefaat, et al. 1997. *Kamus Tata Ruang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum-Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.

Sumadibyo, Rachmadi B. *Kajian Perkembangan Kota dan Wilayah Dalam Dasa warsa Terakhir*. Yogyakarta: P4N UGM.

Tjokroamidjojo, Bintoro & Mustopadidjaya 1996. *Kebijakan Dan administrasi Pembangunan; Perkembangan Teori dan Penerapan*. PT Pustaka LP3ES.

Warpani, Suwardjoko. 1984. *Analisis Kota dan Daerah*. Bandung: ITB.

Yunus, Hadi Sabari, 2002. *Struktur tata Ruang Kota*. Pustaka Pelajar. PT Pustaka LP3ES.

B. BUKU DATA/LAPORAN

RTRW Kabupaten Cilacap 1990/1991 – 2000/2001. Bappeda Kabupaten Cilacap, 1994.

Kabupaten Cilacap dalam Angka Tahun 1997. BPS Kabupaten Cilacap.

Kabupaten Cilacap dalam Angka Tahun 2002. BPS Kabupaten Cilacap.

Pendapatan Regional Kabupaten Cilacap Tahun 1997. BPS Kabupaten Cilacap.

Pendapatan Regional Kabupaten Cilacap Tahun 2002. BPS Kabupaten Cilacap.

C. MAKALAH SEMINAR/JURNAL

Soetomo, Sugiono., Prof.Dr.Ir., DEA. 12 Agustus 2004. *Regionalisasi dalam Perspektif Otonomi Daerah dan Pembangunan Wilayah; Regionalisasi sebagai Politik Pembangunan Wilayah dalam Era Otonomi Daerah*. Semarang: MPWK Undip

Deni Dj, Ruchyat., Ir., M.Eng. 12 Agustus 2004. *Regionalisasi dalam Perspektif Otonomi Daerah dan Pembangunan Wilayah; Regionalisasi sebagai Strategi Pengembangan Wilayah Nasional*. Semarang: MPWK Undip

Sumarsono, Soni. 12 Agustus 2004. *Regionalisasi dalam Perspektif Otonomi Daerah dan Pembangunan Wilayah; Peran Pemerintah dalam Mendukung Konsolidasi dan Kekuatan Lokal Pembangunan*. Semarang: MPWK Undip

D. SURAT KABAR/MAJALAH

Harian Kompas. Firman, Tommy. 1995. *Kesenjangan Wilayah*

Harian Kompas. Firman, Tommy. 5 Agustus 1996. *Disparitas Wilayah: Tanggapan Atas laporan Bank Dunia*

Harian Kompas. Firman, Tommy. 4 September 1998. *Krisis Perkotaan, Pelajaran dari Amerika Latin dan Afrika*

Harian Kompas. Firman, Tommy. 9 Desember 1999. *Dari Pengembangan Wilayah ke Pengembangan Lokal*

Harian Suara Merdeka. *Jalur Penerbangan Telah Dibuka Kembali*. Edisi 10 Nopember 2004.

E. TESIS/TUGAS AKHIR

Wicaksono, Bambang. 2003. *Kajian Perkembangan Kawasan Seberang Ulu Sebagai arahan Pengembangan Kota Palembang Bagian Selatan*. Tesis. Semarang: Program Magister Teknik Pembangunan Kota, Program Pasca Sarjana, Undip.

Djalante, Dody P. 1992. *Evaluasi Penerapan Strategi Pusat-pusat Pertumbuhan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Kabupaten Kendari*. Tesis. Bandung: Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pasca Sarjana, ITB.

Maziah, Sri Agustina. 2002. *Evaluasi Kinerja Pusat-pusat Pertumbuhan Kota Semarang*. Tugas Akhir. Semarang: Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Undip.

- Yustiawan, Yudi. 1994. *Efektifitas Kebijakan Pembangunan Prasarana Kota Dalam Mendukung Kinerja Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Cirebon*. Tesis. Semarang: Program Magister Teknik Pembangunan Kota, Pascasarjana, Undip.
- Darusman. 2003. *Pengembangan Sistem Transportasi Darat dan Laut dalam Mendukung Pengembangan Wilayah Pulau Bangka*. Tesis. Semarang: Program Magister Teknik Pembangunan Kota, Pascasarjana, Undip.
- Nugroho, Wahyudi P. 2003. *Analisis Faktor Faktor yang Dapay Mendorong Pertumbuhan Kota Baru Kajan*. Tesis. Semarang: Program Magister Teknik Pembangunan Kota, Pascasarjana, Undip.
- W, Rina Esti. 2004. *Interaksi Kewilayahan Kecamatan Depok Terhadap Kota Yogyakarta*. Tesis. Semarang: Program Magister Teknik Pembangunan Kota, Pascasarjana, Undip.